KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan petunjukNya dapat menyelesaikan penyusunan buku bacaan yang juga diharapkan menjadi buku ajar bagi para mahasiswa Tinggi berbagai Perguruan Kesehatan untuk mempelajari, dan memahami mengenal, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat besar dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa guna mencapai kompetensi yang disyaratkan dalam kurikulum.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong dan memberikan motivasi penyusunan buku ajar ini. Buku ini memang dirasakan jauh dari lengkap dan sempurna, keterangan detail tetap dianjurkan untuk membaca buku-buku dan kepustakaaan yang tercantum dalam daftar referensi. Akhirnya guna penyempurnaan buku ini, kami tetap menerima masukan, kritik, dan saran agar nantinya terwujud sebuah buku ajar praktis, informatif, penuh manfaat dan menjadi rujukan dalam memahami konsep Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Banjarbaru, Mei 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - ii DAFTAR ISI - iii DAFTAR TABEL - iv

Bab I

Konsep Dasar Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat -

Bab II

Unsur Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat -

Bab III

Pendekatan dalam Pengorganisasian Masyarakat -

Bab IV

Peran Fasilitator Beserta Fungsinya dalam Menjalankan Kerjasama dalam Rangka Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat -

Bab V

Media Promosi Kesehatan dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat –

Bab VI

Teknik Persiapan Sosial dan Pendekatan dalam Melakukan Perubahan Sosial -

Bab VII

Perubahan Budaya -

Bab VIII

Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Sosial -

Bab IX

Partisipasi dari Perusahaan Melalui Program CSR dalam Memberdayakan Masyarakat di Wilayah Kerja Perusahaan –

Bab X

Penutup - 152

DAFTAR TABEL

Tabel 8.1. Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi -

Tabel 8.2. Tipe Partisipasi -

BAB I KONSEP DASAR PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat (community development) merupakan wawasan dasar bersistem tentang asumsi perubahan sosial terancang yang tepat dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan teori dasar pengembangan masyarakat yang menonjol pada saat ini adalah teori ekologi dan teori sumber daya manusia. Teori ekologi mengemukakan tentang "batas pertumbuhan". Untuk sumber-sumber yang tidak dapat diperbarui perlu dikendalikan pertumbuhannya. Teori ekologi menyarankan kebijaksanaan pertumbuhan diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat membekukan proses pertumbuhan (zero growth) untuk produksi dan penduduk.

Teori sumber daya manusia memandang mutu penduduk sebagai kunci pembangunan dan pengembangan masyarakat. Banyak penduduk bukan beban pembangunan bila mutunya tinggi. Pengembangan hakikat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan. Perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewirausahaan. Teori sumber daya manusia diklasifikasikan ke dalam teori yang menggunakan pendekatan yang fundamental (1).

Pengembangan Masyarakat ini memiliki sejarah panjang dalam praktek pekerjaan sosial. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat memungkinkan pemberi dan penerima pelayanan terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Pengembangan masyarakat meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah (2).

Meskipun pengembangan masyarakat memiliki peran penting dalam pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat belum sepenuhnya menjadi ciri khas praktek pekerjaan sosial. pengembangan masyarakat masih menjadi bagian dari

kegiatan profesi lain, seperti perencana kota dan pengembang perumahan. Pengembangan masyarakat juga masih sering dilakukan oleh para voluntir dan aktivis pembangunan yang tidak dibayar. Telah terjadi perdebatan panjang mengenai apakah pengembangan masyarakat dapat dan harus didefinisikan sebagai kegiatan profesional dan yang jelas, pengembangan masyarakat memiliki tempat khusus dalam khazanah pendekatan pekerjaan sosial, meskipun belum dapat dikategorikan secara tegas sebagai satu-satunya metode milik pekerjaan sosial (3).

Pengembangan masyarakat (community development) model pendekatan salah pembangunan sebagai satu (bottoming up approach) merupakan upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada. Dan dalam pengembangan masyarakat hendaknya diperhatikan bahwa masyarakat punya tradisi, dan punya adat-istiadat, kemungkinan sebagai potensi vang dapat dikembangkan sebagai modal sosial (4).

Adapun pertimbangan dasar dari pengembangan masyarakat adalah yang pertama, melaksanakan perintah agama untuk membantu sesamanya dalam hal kebaikan. Kedua, adalah pertimbangan kemanusiaan, karena pada dasarnya manusia itu bersaudara. Sehingga pengembangan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat, agar mereka dapat hidup lebih baik dalam arti mutu atau kualitas hidupnya.

B. Ruang Lingkup Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap menolong anggota masyarakat memiliki yang kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan kebutuhan untuk memenuhi Pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan (a) proyek-proyek pembangunan bentuk memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye

dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab (1).

Pengembangan masyarakat (community development) terdiri dari dua konsep, yaitu "pengembangan" dan "masyarakat". Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidangbidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu (3):

- 1. Masyarakat sebagai sebuah "tempat bersama", yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
- 2. Masyarakat sebagai "kepentingan bersama", yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Istilah masyarakat dalam pengembangan masyarakat biasanya diterapkan terhadap pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan yang membedakannya dengan pelayanan-pelayanan sosial kelembagaan. Pelayanan perawatan manula yang diberikan di rumah mereka dan/atau di pusat-pusat pelayanan yang terletak di suatu masyarakat merupakan contoh pelayanan sosial kemasyarakatan. Sedangkan perawatan manula di sebuah rumah sakit khusus manula adalah contoh pelayanan sosial kelembagaan. Istilah masyarakat juga sering dikontraskan dengan "negara". Misalnya, "sektor masyarakat" sering diasosiasikan dengan bentuk-bentuk pemberian pelayanan sosial yang kecil, informal dan bersifat bottom-up. Sedangkan lawannya, yakni

"sektor publik", kerap diartikan sebagai bentuk-bentuk pelayanan sosial yang relatif lebih besar dan lebih birokratis.

Pengembangan masyarakat yang berbasis masyarakat seringkali diartikan dengan pelayanan sosial gratis dan swadaya yang biasanya muncul sebagai respon terhadap melebarnya kesenjangan antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan. Pengembangan masyarakat juga umumnya diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan (empowerment) yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan (5).

Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Menurut Twelvetrees, pengembangan masyarakat adalah "the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions." Secara khusus pengembangan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.

C. Model-Model Pengembangan Masyarakat

Secara teoretis, pengembangan masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri (sosialis-Marxis) dan kanan (kapitalis-demokratis) dalam spektrum politik. Dewasa ini, terutama dalam konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan "swastanisasi" kesejahteraan sosial, pengembangan masyarakat semakin menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan, maupun dalam memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Secara garis besar, Twelvetrees membagi perspektif pengembangan masyarakat ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan "profesional" pendekatan "radikal". dan Pendekatan profesional menunjuk pada upaya meningkatkan kemandirian memperbaiki dan pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu, berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasirelasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompokkelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya (6).

Sebagaimana diungkapkan oleh Payne, "This is the type of approach which supports minority ethnic communities, for example, in drawing attention to inequalities in service provision and in power which lie behind severe deprivation." Sebagai contoh, pendekatan profesional dapat diberi label sebagai perspektif (yang) tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai perspektif transformasional (1).

Berdasarkan perspektif di atas, pengembangan masyarakat dapat diklasifikasikan kedalam enam model sesuai dengan gugus profesional dan radikal. Keenam model tersebut meliputi (7):

- 1. Perawatan Masyarakat merupakan kegiatan volunter yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan legalitas pemberian pelayanan.
- 2. Pengorganisasian Masyarakat memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial.
- 3. Pembangunan Masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- 4. Aksi Masyarakat Berdasarkan Kelas bertujuan untuk membangkitkan kelompok-kelompok lemah untuk secara

bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung dan konfrontasi.

- 5. Aksi Masyarakat Berdasarkan Jender bertujuan untuk mengubah relasi-relasi sosial kapitalis-patriakal antara lakilaki dan perempuan, perempuan dan negara, serta orang dewasa dan anak-anak.
- 6. Aksi Masyarakat Berdasarkan Ras (Warna Kulit) merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi rasial.

D. Pengetahuan dan Keterampilan Dalam Pengembangan Masyarakat

Model-model pengembangan masyarakat perlu dibangun berdasarkan perspektif alternatif (baik profesional maupun radikal) yang secara kritis mampu memberikan landasan teoritis dan pragmatis bagi praktek pekerjaan sosial. Apapun perspektif dan model yang digunakan, pekerja sosial perlu meningkatkan perangkat pengetahuan, teknik dan keterampilan profesionalnya yang saling melengkapi. Secara umum, beberapa bidang yang harus dikuasai adalah:

- 1. *Engagement* (dengan beragam individu, kelompok, dan organisasi).
- 2. Assessment (termasuk assessment kebutuhan dan profile wilayah).
- 3. Penelitian (termasuk penelitian aksi-partisipatif dengan masyarakat).
- 4. *Group work* (termasuk bekerja dengan kelompok pemecah masalah maupun kelompok-kelompok kepentingan).
- 5. Negosiasi (termasuk bernegosiasi secara konstruktif dalam situasi-situasi konflik).
- 6. Komunikasi (dengan berbagai pihak dan lembaga).
- 7. Konseling (termasuk bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dengan beragam latar kebudayaan)
- 8. Manajemen sumber (termasuk manajemen waktu dan aplikasi-aplikasi untuk memperoleh bantuan).
- 9. Pencatatan dan pelaporan.
- 10. Monitoring dan evaluasi (8).

Pekerja sosial juga memerlukan pengetahuan mengenai kebijakan sosial, sistem negara kesejahteraan (welfare state), dan hak-hak sosial masyarakat, termasuk pengetahuanpengetahuan khusus dalam bidang-bidang dimana praktek pekerjaan sosial beroperasi, seperti: kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan, praktek perawatan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan perlindungan anak, serta perencanaan sosial termasuk perencanaan wilayah (perkotaan dan pedesaan) dan perumahan. Sebagai tambahan, seperti diungkapkan oleh Mayo, pekerja sosial perlu memiliki "The socio-economic and political pengetahuan mengenai: backgrounds of the areas in which they are to work, including knowledge and understanding of political structures, and of relevant organisations and resources in the statutory, voluntary and community sectors. And they need to have knowledge and understanding of equal opportunities policies and practice, so that they can apply these effectively in every aspect of their work" (8).

E. Perencanaan Pengembangan Masyarakat

Pelaksanaan pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan. Secara garis besar, perencanannya dapat dilakukan dengan mengikuti 6 langkah perencanaan.

1. Perumusan masalah.

Pengembangan masyarakat dilaksanakan berdasarkan masalah atau kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa masalah yang biasanya ditangani oleh pengembangan masyarakat berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, pemberantasan buta hurup, dan lain-lain. Perumusan masalah dilakukan dengan menggunakan penelitian (survei, wawancara, observasi), diskusi kelompok, rapat desa, dan seterusnya.

2. Penetapan program.

Setelah masalah dapat diidentifikasi dan disepakati sebagai prioritas yang perlu segera ditangani, maka dirumuskanlah program penanganan masalah tersebut.

3. Perumusan tujuan.

Agar program dapat dilaksanakan dengan baik dan keberhasilannya dapat diukur perlu dirumuskan apa tujuan dari program yang telah ditetapkan. Tujuan yang baik memiliki karakteristik jelas dan spesifik sehingga tercermin bagaimana cara mencapai tujuan tersebut sesuai dengan dana, waktu dan tenaga yang tersedia.

4. Penentuan kelompok sasaran.

Kelompok sasaran adalah sejumlah orang yang akan ditingkatkan kualitas hidupnya melalui program yang telah ditetapkan.

5. Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana.

Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang program kegiatan, termasuk didalamnya adalah sarana, sumber dana, dan sumber daya manusia.

6. Penentuan strategi dan jadwal kegiatan.

Strategi adalah cara atau metoda yang dapat digunakan dalam melaksanakan program kegiatan.

7. Monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau proses dan hasil pelaksanaan program. Apakah program dapat dilaksanakan sesuai dengan strategi dan jadwal kegiatan? Apakah program sudah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? suatu kegiatan indikator keberhasilan (30).

Sejalan dengan menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan swastanisasi kesejahteraan sosial, pengembangan masyarakat memiliki tantangan yang lebih besar daripada waktu-waktu sebelumnya. Pekerja sosial harus mampu memobilisasi masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhankebutuhannya, dan kemudian kerjasama memenuhinya. Pekerja sosial juga perlu mampu mengurangi dalam pemberian pelayanan, penghapusan kesenjangan ketelantaran melalui strategi-strategi diskriminasi dan pemberdayaan masyarakat. Fragmentasi dan konflik antar masyarakat yang cederung meningkat dewasa ini semakin pekerja menuntut sosial untuk lebih meningkatkan

kemampuan profesionalnya, khususnya dalam bidang pendekatan-pendekatan kritis dan alternatif (2).

Tanpa perubahan-perubahan dalam konteks yang lebih luas, seperti perubahan dalam kebijakan sosial dan sistem pemberian pelayanan sosial, pengembangan masyarakat akan menjadi metoda yang kurang efektif. Pengembangan masyarakat hanya akan menjadi sebatas jargon, bukan sebagai pendekatan pekerjaan sosial.

F. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (9). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (10). Dalam beberapa kajian pembangunan komunitas, pemberdayaan mengenai sering upaya masvarakat dimaknai sebagai memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya (11). Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan (12).

Menurut Mubarak, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat (13).

Pada pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat

tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahaptahap berikutnya (14).

G. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Istilah konsep berasal dari bahasa latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata symbol. Secara konseptual, pemberdayaan pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan penguatan modal sosial di masyarakat dari berawal (kelompok) yang meliputi Kepercayaan (trusts), Patuh Aturan (role), dan Jaringan (networking). Apabila kita sudah memiliki modal social yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (direct) masyarakat serta mudah mentransfer knowledge kepada masyarakat. Dengan memiliki modal social yang kuat maka kita akan dapat menguatkan Knowledge, modal (money), dan people. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal social kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk kesejahteraan sosial. Modal sosial yang kuat akan menjamin suistainable didalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (how to build the trust).

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan social (15). Pemberdayaan

merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (16).

(2008) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi memiliki arti yang kemungkinan perkembangan ditingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat dimana mereka berada. Masyarakat adalah sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. Tapi ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada orang-orang sejauh struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang lakukan. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan yang dasar dalam kewajiban sosial yang individu memiliki terhadap masyarakat vang mengembangkan bakat mereka (17).

Adedokun, et all., (2010) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif akan menimbulkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam pengembangan masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa ketika kelompok masyarakat yang terlibat dalam strategi komunikasi, membantu mereka mengambil kepemilikan inisiatif pembangunan masyarakat

dari pada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan bahwa para pemimpin masyarakat serta agen pengembangan masyarakat harus terlibat dalam komunikasi yang jelas sehingga dapat meminta partisipasi anggota masyarakat dalam isu-isu pembangunannya (18).

Jimmu (2008) menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat tidak khususnya masalah ekonomi, teknis atau infrastruktur. Ini adalah masalah pencocokan dukungan eksternal yang ditawarkan oleh agen pembangunan pedesaan dengan karakteristik internal sistem pedesaan itu sendiri. Oleh karena itu, agen pembangunan pedesaan harus belajar untuk 'menempatkan terakhir terlebih dahulu'. Secara teori, peran pemerintah pusat dan agen luar lainnya harus menginspirasi inisiatif lokal bahwa hal itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (14). Dalam prakteknya, top-down perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan harus memberi jalan kepada bottom-up atau partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai apa yang disebut 'pembangunan melalui negosiasi'. Hal ini sesuai Menurut Talcot Parsons merupakan power sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan power dalam empowerment adalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan vang berasal dari bawah (Bottom-Up) (19).

Shucksmith, (2013) menyatakan pendekatan bottom-up untuk pembangunan pedesaan ('didorong dari dalam', atau kadang-kadang disebut endogen) berdasarkan pada asumsi bahwa sumber daya spesifik daerah-alam, manusia dan memegang perkembangannya. budaya kunci untuk pembangunan pedesaan Sedangkan top-down tantangan utamanya sebagai mengatasi perbedaan pedesaan dan kekhasan melalui promosi keterampilan teknis universal modernisasi infrastruktur fisik, bawah melihat tantangan sebagai Pengembangan utama memanfaatkan selisih memelihara melalui khas kapasitas manusia dan lingkungan itu. Model bottom-up terutama menyangkut mobilisasi sumber daya lokal dan aset.

Artinya, masyarakat pembangunan harus dianggap bukan sebagai teori pembangunan, tetapi praktek pembangunan yang menekankan emansipasi dari lembaga yang tidak pantas dan setiap melemahkan situasi yang mengarah pada perias partisipasi, pengembangan masyarakat harus mekanisme untuk menarik kekuatan anggota kolektif masyarakat tertentu terdiri dari laki-laki vang perempuan, kaya dan miskin, mampu dan cacat, dan lain-lain untuk mengubah di wilayah mereka (20).

Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, vaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun social seperti memiliki kepercayaan menyampaikan diri mampu mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan melaksanakan sosial, dan mandiri dalam tugas-tugas kehidupannya (15).

Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung (21). Menurut Chambers, (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people centred, participatory, empowering, and sustainable" (22).

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, vaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, vaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu mempunyai kemampuan keberdayaan atau menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (23). Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (13).

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. masyarakat diharapkan Pada tahav kedua. halangan-halangan atau factor-faktor melepaskan bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan

Tahap vaitu komunitasnya. keempat upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada tahap kelima ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada tahap ketujuh masyarakat vang telah dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi (24).

Apabila kita cermati dari serangkaian literature tentang konsep-konsep pemberdayaan masyarakat maka konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

H. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis melalui pengkhususan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan/menduga. Teori pemberdayaan masyarakat memberikan petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan di dalam situasi tertentu. Teori dapat dalam bentuk luas atau ringkas mengenai pola pola interaksi dalam masyarakat atau menggambarkan pola yang terjadi dalam situasi tertentu (contoh: masyarakat, organisasi, atau kelompok populasi tertentu).

Sebuah teori dalam pemberdayaan masyarakat dapat ditemukan atau diungakp menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu *Deductive Theory Construction* yaitu teori yang sudah ada atau ditemukan di awal kemudian dilakukan penelitian pemberdayaan pada masyarakat. Pendekatan kedua yaitu Konstructive theory yaitu teori yang belum ada atau masih di duga dan untuk menyusunnya dilakukan penelitian pemberdayaan pada masyarakat.

I. Peranan Teori

Teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat menggambarkan distribusi kekuasaan dan sumberdaya dalam masyarakat, bagaimana fungsi fungsi organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. Teori di dalam pemberdayaan masyarakat mengandung hubungan sebab dan pengaruh yang harus dapat di uji secara empiris.

Hubungan sebab dan akibat/outcome yang terjadi karena kejadian/aksi tertentu akan dapat memunculkan jenis intervensi yang dapat digunakan oleh pekerja sosial/LSM dalam memproduksi outcome. Dalam kerja sosial (social work), kita dapat menggunakan teori untuk menentukan jenis aksi/kegiatan atau intervensi yang dapat digunakan untuk memproduksi outcome/hasil. Pada umumnya beberapa teori digabung untuk memproduksi model outcome.

1. Teori Ketergantungan Kekuasaan (*Power-Dependency*)

Power merupakan kunci konsep untuk memahami proses pemberdayaan. Pemikiran modern tentang kekuasaan dimulai dalam tulisan-tulisan dari Nicollo Machiavelli (The Prince, awal abad ke-16) dan Thomas Hobbes (Leviathan abad, pertengahan-17). Tujuan dari kekuasaan adalah untuk mencegah kelompok dari berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga untuk memperoleh persetujuan pasif kelompok ini untuk situasi ini. Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan adalah fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini selalu menjadi bagian dari

hubungan, dan tanda-tanda yang dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro (12).

Lebih lanjut Abbot (1996)menyatakan pengembangan masyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality), konflik dan hubungan pengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannya rendah. kegagalan teori modernisasi muncul Setelah teori ketergantungan ketergantungan, dimana teori prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antar negara yang timpang, utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran (tidak maju). Menurut Abbot (1996) dari ketergantungan muncul pemahaman keseimbangan dan kesetaraan, vang pada akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan (empowerment) partisipasi masyarakat dikenal sebagai teori keadilan.

"ketergantungan-kekuasaan" contoh: Sebagai Teori (power-dependency) mengatakan kepada kita bahwa pemberi dana (donor) memperoleh kekuasaan dengan memberikan uang dan barang kepada masyarakat yang tidak dapat membalasnya. Hal ini memberikan ide bahwa lembaga atau organisasi (non profit organization) atau LSM sebaiknya tidak hanya menerima dana dari satu donor jika ingin merdeka/bebas.

Pada konteks pemberdayaan maka teori ketergantungan dikaitkan dengan kekuasaan yang biasanya dalam bentuk kepemilikan uang atau modal. Untuk mencapai suatu kondisi berdaya atau kuat, maka sekelompok masyarakat harus mempunyai keuangan atau modal yang kuat. Selain uang atau modal, maka ilmu pengetahuan atau *knowledge* dan aspek *people* atau sekumpulan orang atau massa yang besar juga harus dimiliki agar kelompok tersebut mempunyai power. Kelompok yang memiliki power maka kelompok itu akan berdaya.

2. Teori Sistem (The Social System)

Talcott Parsons (1991) melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Seperti para pendahulunya, Parsons juga menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti

halnya pertumbuhan pada mahkluk hidup. Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons masyarakat berasumsi bahwa setiap tersusun yang sekumpulan subsistem berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut tumbuh akan kemampuan vang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan (25).

Parsons (1991) menyampaikan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, yaitu :

- a. Adaptasi, sebuah sistem hatus mampu menanggulangu situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- b. Pencapaian, sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya.
- d. Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (25).

Apabila dimasukkan dalam aspek pemberdayaan masyarakat, maka teori system social ini mengarah pada salah satu kekuatan yang harus dimiliki kelompok agar kelompok itu berdaya yaitu memiliki sekumpulan orang/massa. Apabila kelompok itu memiliki massa yang besar dan mampu bertahan serta berkembang menjadi lebih besar maka kelompok itu dapat dikatakan berdaya.

3. Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi)

Organisasi merupakan sesuatu yang telah melekat dalam kehidupan kita, karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan sebagai manifestasi

makhluk sosial, kita hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Struktur organisasi merupakan kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu. Struktur organisasi akan tampak lebih tegas apabila dituangkan dalam bentuk bagan organisasi.

Seseorang masuk dalam sebuah organisasi tentu dengan berbagai alasan karena kelompok akan membantu beberapa kebutuhan atau tujuannya seperti perlindungan, cinta dan kasih sayang, pergaulan, kekuasaan, pemenuhan sandang pangan. Berbagai tujuan tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan saling pengaruh antar orang jauh lebih bermanfaat daripada kehidupan seorang diri. Seseorang pada umumnya mempunyai kebutuhan yang bersifat banyak yang menginginkan dipenuhinya lebih sehingga keberadaan macam kebutuhan, dari satu kelompok merupakan suatu keharusan.

Menurut Lubis dkk. (1987) bahwa teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang lebih atau secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. merupakan organisasi sebuah teori mempelajari kerjasama pada setiap individu. Hakekat kelompok dalam individu untuk mencapai tujuan beserta cara-cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menerangkan tingkah laku, terutama motivasi, dalam proses kerjasama. Pada teori ekologi, individu tentang organisasi sebagai wadah membahas sekumpulan masyarakat dengan tujuan yang sama agar tertatur, jelas, dan kuat. Orientasi organisasi mengacu pada sekumpulan orang/massa yang harus dimiliki kelompok untuk dapat memiliki power/daya. Kelompok yang memiliki organisasi dengan kuat dan berkelanjutan maka kelompok ini dikatakan berdaya (26).

4. Teori Konflik

Konflik akan selalu muncul dan akan selalu dapat ditemukan dalam semua level kehidupan masyarakat. Dalam interaksi, semua pihak bersinggungan dan sering malahirkan konflik. Belajar dari konflik yang kemudian disadari menghasilkan kerugian para pihak akan memunculkan inisiatif meminimalisir kerugian itu. Caranya mengupayakan damai untuk kembali hidup bersama. Dalam konteks demikian, konflik didefinisikan bukan dari aspek para pelaku konflik, tetapi merupakan sesuatu yang givendalam interaksi sosial. Malahan konflik menjadi motor pergaulan yang selalu melahirkan dinamika masyarakat. Dikenal beberapa pendekatan teoritis untuk menjelaskan konflik. Sebagai kenyataan sosial. Diantaranya pendekatan ketimpangan dalam dunia ekonomi yang munculnya menjelaskan bahwa konflik dikarenakan ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan yang menciptakan kelangkaan. Sementara disisi lain, individu bersifat individualis, mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan surplus yang ada. Adanya kesamaan antara individu membuka peluang terjadinya perebutan pada satu komoditi dan sebaliknya juga membuka kerjasama di antara para pelaku (27).

Pada proses pemberdayaan yang dilakukan di suatu lingkungan sosial (masyarakat) akan sangat sering menemui yang terjadi berkaitan erat konflik. Konflik ketidakpercayaan dan adanya perubahan kepada mereka. Perubahan terhadap kebiasaan, adat istiadat dn berbagai norma social yang sudah tertanam sejak lama di dalam masyarakat. Hal ini sesuai pendapat Stewart, 2005 dalam Chalid (2005) Terdapat tiga model penjelasan yang dapat dipakai untuk menganalisis kehadiran konflik kehidupan masyarakat, pertama penjelasan budaya, kedua, penjelasan ekonomi, ketiga penjelasan politik. Perspektif budaya menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya perbedaan budaya dan suku. Dalam sejarah, konflik cenderung seringkali terjadi karena persoalan

perbedaan budaya yang melahirkan penilaian stereotip. Masing-masing kelompok budaya melihat sebagai anggota atau bagian dari budaya yang sama dan melakukan pertarungan untuk mendapatkan otonomi budaya. Terdapat perdebatan tentang pendekatan primordial terhadap realitas konflik. Sebagian antropolog ada yang menerima dan sebagian menolak. Argumentasi kalangan yang menolak beralasan bahwa terdapat masalah serius bila hanya menekankan penjelasan konflik dari aspek budaya semata. Pendekatan budayatidak memasukkan faktor-faktor penting dari aspek sosial dan ekonomi (27).

Pandangan teori konflik mengacu pada dua aspek, yang pertama tentang ekonomi/uang yaitu berkaitan dengan modal sebagai sarana untuk kelompok dapat dikatakan berdaya dan mandiri. Aspek kedua menyangkut tentang organisasi, apabila kelompok dapat memanajemen konflik dengan baik, maka keutuhan dan kekuatan organisasi/kelompok orang akan terus kuat dan lestari sehingga mereka akan memiliki daya dari sisi finansial dan sisi keanggotaan massa.

5. Teori Mobilisasi Sumberdaya

Jasper, (2010) menyatakan gerakan sosial terdiri dari individu-individu dan interaksi di antara anggota suatu pilihan rasional (rational choice) masvarakat. Pendekatan menyadari akan hal ini, tetapi versi mereka memperhitungkan individu sebagai yang abstrak menjadi realistis. Pragmatisme, feminisme, dan yang terkait dengan berbagai tradisi yang mendorong lahirnya studi tentang aksi-aksi individu (individual action) dan aksiaksi kolektif (collective action) sejak tahun 1960-an, yakni penelitian tentang perlawanan (social resistence), gerakan sosial (social tindakan kolektif (collective movement) dan berkembang di bawah inspirasi dari teori-teori besar tersebut. Dua dari mereka di antaranya dipengaruhi oleh pandangan Marxisme, terutama sosiologi makro versi Amerika yang daya menekankan mobilisasi sumber teori mobilization theory) dan interaksi dengan Negara (28).

Rusmanto, (2013) menyimpulkan bahwa untuk mengetahui keinginan seseorang akan sangat terkait dengan tujuan di akhir orang tersebut. Seseorang dari pertanyaan tersebut mengarah kepada sebuah tujuan. Dalam hal ini, maka tujuan adalah pusat pendekatan yang strategis sebagai taktik, meskipun dalam pemahaman umum, telah keliru memahami bahwa strategi merupakan instrumen tujuan yang bersifat sementara mencerminkan budaya dan emosi (29).

Pada konteks pemberdayaan masyarakat maka teori mobilisasi menjadi salah satu dasar yang kuat, karena untuk menjadi seorang atau kelompok masyarakat yang berdaya/memiliki power selain uang, knowledge maka people juga mempunyai peranan yang penting. Kumpulan orang akan memberikan kekuatan, kekuatan itu akan memberikan power pada orang atau masyarakat itu.

6. Teori Constructivist

Glasersfeld (1987) menyatakan konstruktivisme sebagai "teori pengetahuan dengan akar dalam filosofi, psikologi dan cybernetics". Von Glaserfeld mendefinisikan konstruktivisme radikal selalu membentuk konsepsi pengetahuan. Ia melihat pengetahuan sebagai sesuatu hal yang dengan aktif menerima apapun melalui pikiran sehat atau melalui komunikasi. Hal itu secara aktif terutama dengan membangun pengetahuan (30). Kognisi adalah adaptif dan membiarkan sesuatu untuk mengorganisir pengalaman dunia itu, bukan menemukan suatu tujuan kenyataan. Konstruktivisme pada dasarnya adalah pandangan yang didasarkan pada aktivitas siswa dengan untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan mereorganisasikan pengetahuan dengan jalan individual (31).

Konstruktivisme didefinisikan Teori sebagai bersifat generatif, pembelajaran vang vaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan teori behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon, sedangkan teori kontruktivisme lebih memahami sebagai kegiatan belajar manusia membangun menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada

pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting (32).

Pada proses pemberdayaan masyarakat pendekatan teori konstructivisme perlu ditanamkan diupavakan masyarakat menkonstruksi agar mampu untuk berubah. Pemberdayaan masyarakat pemahaman hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah melekat di masyarakat selam nilai tersebut baik dan benar. kebersamaan. keikhlasan, Nilai-nilai gotong-rovong, kejujuran, kerja keras harus di bangun dan di konstruksikan sendiri oleh masyarakat untuk menciptakan perubahan agar lebih berdaya. Keterkaitan dengan konsep pemberdayaan maka aspek ilmu (knowledge) yang ada di dalam masyarakat perlu dibangun dengan kuat dan di kontruksikan di dalam masyarakat itu sendiri.

Referensi

- 1. Payne, M. 1995, Social Work and Community Care, London: McMillan.
- 2. Suharto E. 1997, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- 3. Mayo, M. 1998, "Community Work", dalam Adams, Dominelli dan Payne (eds), Social Work: Themes, Issues and Critical Debates, London: McMillan
- 4. Anonimus, 2008. Sepotong tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development). http://islamkuno.com/2008/01/16/sepotongtentangpengem bangan-masyarakat-community-development/. Diakses tanggal 12 Maret 2011.

- 5. AMA. 1993. Local Authorities and Community Development: A Strategic Opportunity for the 1990s, London: Association of Metropolitan Authorities
- 6. Twelvetrees, A. (1991), Community Work, London: McMillan
- 7. Dominelli, L. 1990, *Women and Community Action*, Birmingham: Venture Press.
- 8. Mayo, M. 1994, "Community Work", dalam Hanvey and Philpot (eds), Practising Social Work, London: Routhledge.
- 9. Depdiknas. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- 10. Koentjaraningrat. 2009: *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambangan. Jakarta. Longman.
- 11. Foy, Nancy. 1994. *Empowering People at Work*, London: Grower Publishing Company.
- 12. Sadan, Elisheva. 1997. Empowerment and Community Planning: *Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers.in Hebrew. [ebook].
- 13. Mubarak, Z. 2010. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. *Tesis*. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang.
- 14. Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat,* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- 15. Sipahelut, Michel. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Tesis*. IPB. Bogor.
- 16. Suharto E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- 17. Jimu, M.I. 2008. *Community Development*. Community Development: A Cross-Examination of Theory and Practice Using Experiences in Rural Malawi. *Africa Development*, Vol. XXXIII, No. 2, 2008, pp. 23–3.

- 18. Adedokun, O.M. C.W, Adeyamo, and E.O. Olorunsula. 2010. The Impact of Communication on Community Development. J Communication, 1(2): 101-105.
- 19. Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- 20. Shucksmith, Mark. 2013. Future Direction in Rural Development. Carnegie UK Trust. England.
- 21. Friedman, John. 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA.
- 22. Chambers, R. 1985. Rural Development: Putting The Last First. London; New York.
- 23. Sukmaniar. 2007. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (Ppk) Pasca Tsunami Dikecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. *Tesis*. UNDIP. Semarang.
- 24. Wilson, Terry. 1996. *The Empowerment Mannual*, London: Grower Publishing Company.
- 25. Pearsons, Talcot. 1991. *The Social System*. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
- 26. Lubis, Hari & Huseini, Martani. 1987. *Teori Organisasi; Suatu Pendekatan Makro*. Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta.
- 27. Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Penebar Swadaya. Cetakan pertama. Jakarta.
- 28. Jasper, James M. 2010. Social Movement Theory Today: Toward a Theory of Action?. *Sociology Compass 4/11 (2010): pp.,965-976,* 10.1111/j.9020.2010.000329.x,.New York: Graduate Center of the City University of New York.
- 29. Rusmanto, Joni. 2013. *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya*. Zifatama Publishing. Sidoarjo.
- 30. Glasserfield, E. (1987). A Constructivist Approach to Teaching. In L. Steffe & J. Gale (Eds.), Constructivism In Education. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum. (pp. 3-16).
- 31. Abbeduto, Leonard. 2004. Taking Sides: Clashing Views on Controversial Issues in Educational Psychology Third Edition. McGraw-Hill, Dushkin.

32. Ife, J.W. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysiis and Practice. Melbourne: Longman.

BAB II UNSUR PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Di negara yang sedang berkembang terdapat siklus keadaan yang merupakan suatu lingkaran tak berujung yang menghambat perkembangan komunitas secara keseluruhan. Sebagai contoh, keadaan sosial ekonomi rendah yang mengakibatkan ketidakmampuan dan ketidaktahuan. Hal tersebut selanjutnya mengakibatkan penurunan produktivitas, produktivitas yang rendah selanjutnya mengakibatkan keadaan sosial ekonomi semakin rendah dan seterusnya. Langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam mengembangkan dan meningkatkan dinamika komunitas adalah (1):

- 1. Ciptakan kondisi agar kompetensi setempat dapat dikembangkan dan di manfaatkan
- 2. Pertinggi mutu potensi yang ada
- 3. Pertahankan kontuinitas program di masyarakat
- 4. Tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

A. Unsur-Unsur Program Pengembangan Masyarakat

- 1. Program terencana yang berfokus pada kebutuhan-kebutuhan menyeluruh (*total needs*) dari masyarakat yang bersangkutan.
- 2. Mendorong kemandirian atau swadaya masyarakat.
- 3. Adanya bantuan teknis dari pemerintah, badan-badan swasta, atau organisai-organisai sukarela, yang meliputi tenaga, peralatan, bahan, ataupun dana.
- 4. Mempersatukan berbagai disiplin ilmu seperti pertanian, peternakan, kesehatan masyarakat, pendidikan kesejahteraan keluarga, kewanitaan, kepemudaan, dan lainnya untuk membantu msayarakat (2).

B. Unsur Pemberdayaan Masyarakat

1. Inklusi dan Partisipasi

Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah

mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam pembangunan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan mengenai sumbersumber pembangunan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana, tenaga ahli, dll) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin tersebut.

Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang partisipatif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang harus dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidak-sepakatan (2).

Ada berbagai bentuk partisipasi, yaitu:

- a. Secara langsung,
- b. Dengan perwakilan (yaitu memilih wakil dari kelompokkelompok masyarakat),
- c. Secara politis (yaitu melalui pemilihan terhadap mereka yang mencalonkan diri untuk mewakili mereka),
- d. Berbasis informasi (yaitu dengan data yang diolah dan dilaporkan kepada pengambil keputusan),
- e. Berbasis mekanisme pasar yang kompetitif (misalnya dengan pembayaran terhadap jasa yang diterima) (3).

Partisipasi secara langsung oleh masing-masing anggota masyarakat adalah tidak realistik, kecuali pada masyarakat yang jumlah penduduknya sedikit, atau untuk mengambil keputusan-keputusan kenegaraan yang mendasar melalui referendum. Yang umum dilakukan adalah partisipasi secara tidak langsung, oleh wakil-wakil masyarakat atau berdasarkan informasi dan mekanisme pasar. Organisasi berbasis masyarakat seperti lembaga riset, LSM, organisasi keagamaan, dan lain-lain. mempunyai peran yang penting dalam membawa suara masyarakat miskin untuk

didengar oleh pengambil keputusan tingkat nasional dan daerah (2).

Walaupun keterwakilan sudah dilakukan dengan benar, proses partisipasi masih belum benar jika penyelenggaraannya dilakukan secara tidak sungguh-sungguh. Upaya yang dilandasi niat jujur untuk menampung pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang menyangkut ruang hidup mereka dapat menjadi tidak berhasil, jika pendapat wakil-wakil masyarakat yang diharapkan mewakili kepentingan semua unsur masyarakat itu kemudian hanya diproses sekedarnya saja, tanpa upaya memahami pertimbangan apa dibalik pendapat yang diutarakan wakil-wakil tersebut.

Partisipasi semu seperti itu menambah ongkos pembangunan, tanpa ada manfaat yang jelas bagi peserta yang diajak berpartisipasi. Upaya melibatkan masyarakat dalam pengertian yang benar adalah memberi masyarakat kewenangan untuk memutuskan sendiri apa-apa yang menurut mereka penting dalam kehidupan mereka (4).

2. Akses pada informasi,

Adalah aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Informasi meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelavanan perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dan sebagainya (1). Masyarakat pedesaan terpencil tidak mempunyai akses terhadap semua informasi tersebut, karena hambatan bahasa, budaya dan jarak fisik. Masyarakat yang informed, mempunyai posisi yang baik untuk memperoleh manfaat dari peluang yang memanfaatkan akses terhadap pelayanan menggunakan hak-haknya, dan membuat pemerintah dan pihakpihak lain yang terlibat bersikap akuntabel atas kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (4).

3. Kapasitas organisasi lokal

Adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada

untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang *organized*, lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi.

4. Profesionalitas pelaku pemberdaya

Adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggung jawabkan kebijakan dan tindakannya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (3).

Referensi

- 1. Ferry Efendy dan Makhfudli. 2009. *Keperawatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- 2. Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Bappenas, Kebijakan Strategis Pemberdayaan Masyarakat, 2003.
- 3. Anderson, Elizabeth T dan Judith McFarlance. 2007. *Buku Ajar Keperawatan Komunitas: Teori dan Praktik. Ed. 3.* Jakarta: EGC
- 4. Narayan, Deepa, Empowerment and Poverty Reduction, World Bank, 2002

BAB III PENDEKATAN DALAM PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

Tiga aspek yang ada dalam pengorganisasian masyarakat adalah sebagai berikut (1):

1. Proses

Pengorganisasian masyarakat merupakan proses yang terjadi secara sadar tetapi mungkin pula merupakan proses yang tidak disadari oleh masyarakat.

2. Masyarakat

Bisa diartikan sebagai suatu kelompok besar yang mempunyai batas-batas geografis, bisa pula diartikan sebagai suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dan berada dalam kelompok yang besar tadi.

- 3. Berfungsinya masyarakat (functional community)
- a. Menarik orang-orang yang inisiatif dan dapat bekerja.
- b. Membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.
- c. Melakukan usaha-usaha atau kampanye untuk mencapai rencana tersebut.

Dalam suatu masyarakat, bagaimanapun sederhananya, selalu ada suatu mekanisme untuk bereaksi terhadap stimulus. Mekanisme ini disebut mekanisme pemecahan masalah atau proses pemecahan masalah. Mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat bukanlah hal pekerjaan mudah serta memerlukan strategi pendekatan tertentu. Kenyataan dimasyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat trejadi karena alasan diantaranya sebagai berikut (2):

- 1. Tingkat partisipasi masyarakat karena paksaan.
- 2. Tingkat partisipasi masyarakat karena imbalan.
- 3. Tingkat partisipasi masyarakat karena identifkasi atau ingin meniru.
- 4. Tingkat partisipasi masyarakat karena kesdaran.
- 5. Tingkat partisipasi masyarakat karena tuntutan akan hak asasi dan tanggung jawab.

A. Pendekatan Dalam Pengorganisasian Masyarakat

1. Spesific content objective approach

Seseorang atau badan/lembaga yang telah merasakan adanya kepentingan bagi masyarakat dapat mengajukan suatu program untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Hal ini bisa dilakukan oleh yayasan, lembaga swadaya masyarakat, atau atas nama perorangan.

2. General content objective approach

Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengoordinasi berbagai usaha dalam wadah tertentu. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah (non goverment organization).

3. Process organization approach

Penggunaannya berasal dari prakarsa masyarakat, timbul kerjasama dari anggota masyarakat untuk akhirnya masyarakat sendiri mengembangkan kemampuannnya sesuai dengan kapasitas mereka dalam melakukan usaha mengatasi masalah. Salah satu contohnya adalah kelompok kerja kesehatan (pokjakes) yang dibentuk dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat (1).

B. Pendekatan Pengembangan Masyarakat

Sebagai upaya dalam melakukan suatu intervensi masyarakat melalui pengembangan masyarakat, maka dibutuhkan suatu pendekatan yang dilakukan oleh community worker dalam implementasi dilapangan. Batten (1967) mengatakan terdapat dua pendekatan dalam pengembangan masyarakat (3);

1. Pendekatan Direktif (Instruktif)

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa community worker tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini peranan community worker bersifat lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari community worker. Community worker-lah yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya dan menyediakan

sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. Dengan pendekatan ini, prakarsa dan pengambilan keputusan berada ditangan *community worker*.

2. Pendekatan Non direktif (Partisipatif)

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Pada pendekatan ini, community worker tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan apa yang baik dan buruk bagi suatu masyarakat. Pemeran utama perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, community worker lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan yang berguna bagi mereka sendiri, serta mereka diberi kesempatan penuh dalam penentuan cara-cara untuk mecapai tujuan yang mereka dari pendekatan inginkan. Tujuan ini agar masvarakat pengalaman belajar untuk mengembangkan memperoleh dirinya melalui pemikiran dan tindakan yang dirumuskan oleh mereka.

C. Langkah -Langkah Umum Pengorganisasian

- 1. Integrasi
 - Langkah paling pertama dan utama dari proses pengorganisasian masyarakat adalah menyatunya sang organizer dengan rakyat yang hendak diorgtanisasikan.
- 2. Penyidikan social
 Suatu proses yang sistematis mencari tahu tentang masalah –
 masalah yang mengitari masalah yang dimaksud
- 3. Program percobaan Seorang "organizer" memilih suatu bentuk kegiatan yang merupakan kesepakatan kelompok yang jika dilakukan berdampak positif bagi banyak orang
- 4. Landasan kerja Dimaksudkan sebagai bagian awal dari pergerakan masyarakat berdasarkan hubungan orang perorang dalam kelompok dimulai kebersamaan menyuarakan kepentingan

- 5. Pertemuan teratur
 - Pertemuan atau rapat dimaksudkan untuk mempertemukan kepentingan pribadi pribadi sampai menjadi pengesahan umum. Meminimalisasi puncak puncak perbedaan.
- 6. Permainan peran Merupakan proses pelatihan setiap orang (semua) dalam kelompok berhadapan dengan pihak luar masyarakat
- 7. Mobilisasi atau aksi Kegiatan mengungkapkan perasaan dan kebutuhan masyarakat secara terprogram
- 8. Evaluasi Merupakan proses peninjauan ulang apakah langkahlangkah yang sudah ditempuh sebelumnya sudah tepat atau tidak
- 9. Refleksi Proses perenungan ulang secara keseluruhan usaha pembentukan organisasi rakyat yang tangguh dengan melibatkan sebanyak mungkin orang
- 10. Terbentuknya organisasi rakyat (formal/informal)
 Proses berlangsungnya gagasan diantara anggota bukan lagi
 oleh orang perorang, melainkan sudah kolektif menghadapi
 dan menyelesaikan persoalan bersama (4).

Referensi

- 1. Anderson, Elizabeth T dan Judith McFarlance. 2007. *Buku Ajar Keperawatan Komunitas: Teori dan Praktik. Ed. 3.* Jakarta: EGC
- 2. Agbayani, RF and Siar SV. 1994. Problem encountered in the Implementation of Acimmunity Based Fishery Resource Management Project. p.149-160.
- 3. Pimbert, M. P and J. N. Pretty. 1995. Parks, people and professionals. UNRISD, Geneva.
- 4. Wicaksono, Ahc. Wazir, Darusman, Taryono. 2001. Catatan Pertama Pengalaman Belajar: Praktek Pengorganisasian Masyarakat di Simpul Belajar. Puter

BAB IV

PERAN FASILITATOR BESERTA FUNGSINYA DALAM MENJALANKAN KERJASAMA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Peranan

Paul B. Horton dan Chester I. Huant dalam Miranti (2013) mengartikan peranan sebagai perilaku yang diharapkan dari seorang yang mempunyai suatu status. Mempelajari peranan sekurang-kurangnya melibatkan 2 aspek yaitu : pertama, kita harus belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hakhak suatu peranan; kedua, memiliki sikap, perasaan dan harapanharapan yang sesuai dengan peran tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapainya seseorang akan mengadakan interaksi dengan orang lain (baik dengan individu maupun dengan kelompok) yang dalam interaksi ini akan terjadi adanya tindakan sebagai suatu rangsangan dan tanggapan sebagai suatu respon (1).

Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang mempunyai status. Sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Artinya status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah penerapan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut (2).

Menurut kamus sosiologi definisi peranan sebagai berikut (3):

- 1. Aspek dinamis dari kedudukan.
- 2. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
- 3. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan.
- 4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang

Secara konseptual status dan peran ini mempunyai arti penting dalam sistem sosial masyarakat. Wujud dari status dan peranan itu adalah adanya tugas-tugas yang dijalankan oleh seseorang berkenaan dengan posisi dan fungsinya dalam

masyarakat. Peranan yang melekat dalam diri seseorang harus dibedakan dengan status seseorang dalam masyarakat yang merupakan unsur status yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Didalam peranan tersebut terdapat dua macam harapan, adapun harapan tersebut adalah:

- 1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran.
- 2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannnya dalam menjalankan perannnya atau kewajiban-kewajibannnya

Peranan menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya seseorang atau kelompok menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan tersebut mencakup tiga hal, yaitu (4):

- 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini, meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- Peranan adalah suatu kosep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Hendropuspito (1989) dalam Kemenkes RI (2012), peranan adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tugas) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan seseorang. Peranan sebagai konsep yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Wujud dari status dan peran itu adalah adanya tugas-tugas yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok berkaitan dengan posisi atau fungsinya dalam masyarakat (5).

B. Fasilitator

Fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran suatu kelompok dalam memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju.

Filosofi dari fasilitator adalah adanya suatu kelompok yang memilki tujuan, rencana, gagasan, program, sarana dalam melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Akibatnya fasilitator harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berani, disiplin, bersedia membantu, tanggungjawab, sabar (telaten), komunikatif (menyengkan), mencarikan suasana, mau mendengarkan orang lain, empati (bisa merasakan) dan tanggap situasi (peka), ini karena tugas yang diemban fasilitator sangat berat dan butuh pengorbanan. Adapun tugas fasilitator dalam pendampingan kelompok adalah (6):

- 1. Menyampaikan informasi
- 2. Menjadi juru bicara/pemimpin
- 2. Narasumber (membawa info dari luar)
- 3. Membantu memecahkan masalah

Fasilitator adalah orang yang membuat kerja kelompok menjadi lebih mudah karena kemampuannya dalam menstrukturkan dan memandu partisipasi anggota-anggota kelompok. Pada umumnya fasilitator bekerja dalam sebuah pertemuan atau diskusi. Akan tetapi seorang fasilitator juga dapat bekerja diluar pertemuan. Tetapi pada prinsipnya seorang fasilitator harus mengambil peran netral (dengan banyak bertanya dan banyak mendengarkan) ketika membantu sebuah kelompok atau pertemuan (7).

Fasilitasi adalah pertemuan sekelompok orang yang menghadirkan fasilitator sebagai perancang dan pengelola proses kelompok agar kelompok dapat mencapai tujuannya. Sebuah fasilitasi juga bisa berarti sebuah pertemuan antara dua orang fasilitator dan satu orang lain yang menerima bantuan dan panduan dalam prosesnya (8).

Kelompok adalah kumpulan individu-individu yang karena alasan-alasan tertentu memutusakan untuk bersama. Waktu hidup kelompok ada yang pendek ada pula yang panjang dan bentuknya ada yang sesuai dengan rencana awal tapi ada juga yang terbentuk dalam perjalanan proses.

Tim (*team*) adalah sejenis kelompok yang anggota dan pimpinannya sangat dekat dalam bekerja sama mencapai hasil

kesepakatan yang menguntungkan. Kata 'tim' berimplikasi pada kemandirian dan sinergi; tim juga bias dibayangkan seperti kelompok yang berfungsi dengan sangat baik. Dalam situasi pencapaian tujuan dan tugas sebagai sebuah kelompok, sebuah tim dapat berubah menjadi satu unit kohesif dan mampu memperbaiki keahlian anggota timnya. Keahlian fasilitasi dewasa ini telah menjadi alat komunikasi yang sangat penting, terutama bagi kelompok-kelompok atau tim yang memerlukan untuk membuat sebuah keputusan atau kesepakatan bersama serta memerlukan setiap masukan, dukungan, kreatifitas dan kolaborasi (9).

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka, membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Beberapa fasilitator akan mencoba membantu kelompok dalam mencapai consensus pada setiap perselisihan yang sudah ada sebelumnya atau muncul dalam rapat sehingga memiliki dasar yang kuat untuk tindakan di masa depan (10).

Fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat (FM) merupakan tenaga fasilitator yang bertugas untuk melakukan proses pemberdayaan masyarakat di desa sasaran baru dalam hal sosialisasi program, perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan secara aktif (11).

Dari beberapa pengertian diatas menunjukkan bahwa, seorang fasilitator dituntut untuk dapat menjadi narasumber yang baik ketika ada permasalahan dimasyarakat, ia dapat memfasilitasi agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Kemampuan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan yang timbul tersebut merupakan fungsi plus bagi seorang fasilitator disamping tugasnya sebagai seseorang yangdapat memberikan pelatihan, bimbingan, nasihat, maupun pendapat.

C. Fasilitasi Adalah Ilmu Sekaligus Seni

Seorang fasilitator bekerja dengan mengaplikasikan satu set keahlian spesifik dan metode, teknologi kelompok, digabung dengan perhatian cermat dan sensitifitas pada orang lain. Dengan

cara itu, maka seorang fasilitator akan membawa kelompok pada penampilan terbaiknya.

Keahlian fasilitator meramu teknologi kelompok dengan gaya pribadinya, diselingi dengan kreatifitas dan energi, maka akan menciptakan sebuah seni fasilitasi. Dengan semacam ini, maka kelompok yang difasilitasi akan dapatberoperasi dengan fleksibilitas dan kreatifitas maksimum dalam batasan yang realistic (3).

D. Tingkatan Fasilitasi

Ada tiga tahapan perkembangan fasilitator secara umum. Dan semakin tinggi tingkatannya, akan semakin rumit tugas yang diembannya. Biasanya dipisahkan dengan 1) Fasilitator Pertemuan, 2) Fasilitator Kelompok/Tim, dan 3)Fasilitator Organisasi.

Pada tingkatan dasar, atau fasilitator pertemuan, peran fasilitator lebih banyak berguna untuk mengarahkan sebuah diskusi atau pertemuan. Pada tahapan selanjutnya, fasilitator pada tingkat kelompok/tim diperlukan untuk bekerja dengan tim yang sudah berjalan, tim-tim mandiri, dan tim proyek lintas fungsi. Sedangkan pada tingkatan berikutnya, yaitu fasilitator organisasi, memiliki keahlian yang tinggi, berpengalaman dalam memfasilitasi berbagai pertemuan, mengerti secara benar topiktopik yang menjadi bahasan dan kultur yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Fasilitator pada tingkatan ini seringkali menghasilkan gagasan-gagasan besar perubahan kelompok (12).

4	
Lantal 3	Ketrampilan merancang proses: - Merancang struktur dan alur pertemuan
Lantal 2	Ketrampilan mengelola dinamika kelompok: - Mendorong dialog multi arah
Lantal 1	Ketrampilan komunikasi interpersonal: - Menyimak, bertanya, menggali, merangkum
Lantal Dasar	Sikap dasar fasilifator: - Mengolah kecerdasan emosional - Minat, empati, percaya pada kelompok, positif

E. Peran dan Tugas Fasilitator

Para pelaksana program (pendamping, supervisor dan koordinator program) adalah ujung tombak lembaga yang sebagai pelaku pengembangan partisipasi bertugas pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, adopsi PRA ke dalam pengembangan program berarti juga harus dibarengi dengan pengembangan staf program agar memiliki kemampuankemampuan dibutuhkan sebagai vang fasilitator pengorganisir. Mereka tidak akan dapat melakukan tugas ini apabila lembaga memperlakukannya sebagai penyuluh atau operator teknis, atau pelaksana kegiatan/program Pengembangan staf merupakan agenda yang perlu dirancang dalam jangka panjang, baik melalui program belajar dan latihan yang terencana (formal) maupun melalui pengembangan tradisi/kultur pembelajaran dalam proses kerja sehari-hari. Lembaga yang memiliki kultur belajar, akan terbiasa dengan diskusi dan refleksi dalam setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, hubungan informal antara setiap jajaran staf akan setara dan terasa akrab (13).

Berikut ini adalah 4 golongan dan 22 jenis tugas (dan kemampuan yang harus dimiliki) seorang pengembang masyarakat yang dirumuskan oleh Jim Ife1. Dalam rumusan ini, tugas pendamping masyarakat lebih utama sebagai fasilitator, pengorganisir, dan pengembang proses pembelajaran masyarakat (14).

Tugas fasilitasi: membangun proses kegiatan masyarakat

- 1. Pengembangan sosial yaitu kemampuan untuk mendorong orang lain bekerja sama dalam proses pengembangan masyarakat.
- 2. Menengahi (mediasi) dan berunding (negosiasi) yaitu kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat.
- 3. Memberi dukungan yaitu menyediakan dukungan yang diperlukan agar masyarakat bisa melakukan kegiatan pengembangan masyarakat.
- 4. Membangun konsensus yaitu menghadapi perbedaan nilai, kepentingan, dan adanya kompetisi tidak dengan pendekatan konflik.
- 5. Memfasilitasi kelompok yaitu mengelola berbagai tindakan dan kegiatan kelompok karena biasanya kerja pendampingan lebih banyak bersama kelompok.
- 6. Memanfaatkan sumberdaya dan keterampilan lokal yaitu membantu masyarakat mengenali & meman-faatkan potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 7. Pengorganisasian yaitu mendorong terselenggaranya kegiatan-kegiatan bersama masyarakat.

Tugas pembelajaran: memberi masukan berupa nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman kepada masyarakat

- 1. Penyadaran kritis yaitu membangun kesadaran masyarakat bahwa setiap individu berkaitan atau dipengaruhi oleh struktur dan sistem yang bekerja mengatur.
- 2. Memberi informasi yaitu menyediakan informasi yang relevan pada masyarakat untuk penjajakan kebutuhan, perencanaan, kegiatan pembelajaran, dan sebagainya.
- 3. Berhadapan (konfrontasi) dengan pelanggaran prinsipiil yaitu kemampuan untuk bertindak tegas apabila diperlukan

terhadap individu atau kelompok masyarakat yang melanggar suatu prinsip kerjasama (misalnya: bersifat rasis, melakukan tindakan merusak lingkungan, penyalahgunaan keuangan program, dsb).

4. Menyelenggarakan pelatihan yaitu melakukan atau menghubungkan dengan pelatih lain untuk kegiatan transfer pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat.

Tugas penghubung: membangun relasi dengan berbagai sumber, pihak danlembaga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dampingannya

- 1. Menghubungkan dengan sumberdaya yaitu memfasilitasi kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar komunitas yang memiliki sumberdaya tertentu.
- 2. Advokasi yaitu menghubungkan berbagai kepentingan masyarakat (antar individu, antar kelompok, antar lembaga dsb.).
- 3. Menggunakan media yaitu mempublikasikan kegiatan, proses, dan capaian, agar menjadi agenda komunitas.
- 4. Menjadi Humas yaitu memberikan informasi mengenai kegiatan, proses dan capaian untuk memperoleh dukungan berbagai pihak.
- 5. Mengembangkan jaringan yaitu mengembangkan hubungan dengan berbagai pihak (perorangan, lembaga) untuk mendukung program.
- 6. Mengembangkan proses pertukaran pengetahuan dan pengalaman yaitu sebagai fasilitator proses pembelajaran antar pihak baik secaraformal maupun informal.

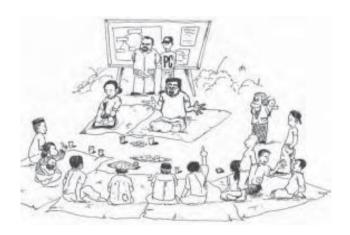
Tugas teknis: mengelola langkah-langkah atau tahap-tahap program mulaidari penjajakan kebutuhan sampai ke monitoring-evaluasi

- 1. Mengumpulkan dan menganalisa data yaitu menggunakan metodologi pengkajian untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi bersama masyarakat.
- 2. Menggunakan komputer yaitu menggunakan dan mengalihkan kemampuan penguasaan teknologi komputer kepada masyarakat.

- 3. Melakukan presentasi (tertulis atau lisan) yaitu menyampaikan gagasan kepada masyarakat dampingan dan pihak-pihak lain.
- 4. Pengelolaan program yaitu membangun struktur, nilai, prosedur dan mekanisme program yang sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat.
- 5. Pengelolaan keuangan yaitu pengelolaan (manajemen) keuangan yang sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat.

F. Dasar-Dasar Teknik Fasilitasi

Dunia fasilitasi menjadi kian mengemuka belakangan ini seiring dengan berkembangnya era otonomi daerah. Proses pembangunan dengan semangat partisipasi melatar belakangi semakin berkembangnya proses-proses yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Dalam kerangka tersebut peran fasilitator menjadi salah satu hal yang cukup mengemuka. Dan karenanya fasilitator kemudian menjadi sebuah profesi pilihan yang cukup menjanjikan masa depan bagi sebagian orang (15).



G. Peran Fasilitator

Fasilitasi berasal dari kata "facile" yang berarti "mudah" yang artinya "membuat sesuatu menjadi lebih mudah". Peran fasilitator membuat kelompok menjadi sukses dan mudah dengan menggunakan proses kelompok yang efektif. Fasilitator akan menganjurkan anggota kelompok menggunakan metode yang paling efektif untuk menyelesaikan tugas secara efisien dan bermanfaat, dengan tetap memberi waktu kepada ide-ide atau alternatif lain. Fasilitator menempatkan dirinya sebagai seorang pemandu, pembantu dan katalisator untuk membantu kelompok menyelesaikan pekerjaannya (3).



Fasilitator adalah manajer proses kelompok. Fasilitator berperan dalam mengelola proses dan bersikap netral terhadap isi diskusi. Proses bagaimana anggota kelompok bekerja bersama, bagaimana anggota berinteraksi satu sama lain, bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana seluruh anggota hadir. Perlu dicatat bahwa proses dan isi selalu hadir setiap waktu dalam kerja-kerja kelompok, dan fasilitator harus memandu dan mengelola proses supaya kelompok dapat memfokuskan energy dan kreatifitas mereka pada isi atau materi pembicaraan. Untuk memandu proses, fasilitator akan menggunakan berbagai metode untuk memperjelas dan mempermudah kelompok mencapai hasil yang diharapkan (16).

H. Tanggung Jawab Fasilitator

Fasilitator yang efektif memiliki tanggungjawab (17):

- 1. Selalu netral atas isi atau materi pertemuan;
- 2. Merancang partisipasi;
- 3. Memastikan keseimbangan partisipasi;
- 4. Mendorong dialog diantara peserta;
- 5. Menyediakan struktur dan proses untuk kerja kelompk;
- 6. Mendorong perbedaan pandangan ke arah yang positif;
- 7. Mendengarkan secara aktif dan mendorong peserta yang lain untuk melakukan hal yang sama;
- 8. Mencatat, mengorganisir, dan meringkas masukan dari anggota;
- 9. Mendorong kelompok untuk mengevaluasi sendiri perkembangan dan kemajuan kerja;
- 10. Melindungi anggota kelompok dan idenya dari serangan atau pengabaian perhatian;
- 11. Meyakinkan bahwa kelompok itu kumpulan pengetahuan, pengalaman dan kreatifitas.
- 12. Gunakan metode dan teknik fasilitasi untuk menggali sumberdaya ini.

I. Menciptakan Perubahan Dimana Saja

Fasilitator dan pemimpin dituntut untuk memiliki cita rasa kemanusiaan dan spirit dalam organisasi. Dengan proses partisipatif yang dirancangnya, seorang fasilitator mampu mendorong kelompok untuk aktif berkreasi dan berinovasi. Peran ini tidak hanya terbatas pada ruangan pelatihan saja. Melainkan juga dapat dimainkan dalam kehidupan sehari-hari (18).

Jika dengan kreatifitas dan inovasi kelompok dapat dibangun oleh fasilitasi, maka dengan sendirinya fasilitator mampu menciptakan berbagai perubahan dengan menggunakan alat, metode, teknik dan keterampilan yang dikuasainya. Kemampuan ini sangat penting dan bermanfaat ketika fasilitator berada dalam situasi seperti di Indonesia sekarang ini.

Fasilitasi dapat membantu perorangan atau kelompok untuk merencanakan sesuatu dan memecahkan masalah. Maka, dapat dibayangkan seandainya, kemampuan fasilitasi akan semakin

banyak tersebar, maka anda akan dapat bayangkan betapa banyak ide dan inovasi baru yang akan keluar pada berbagai pertemuan. Akan semakin banyak terobosan terhadap berbagai macam kebuntuan ide. Hal ini tentu saja akan mendorong terjadinya berbagai perubahan sosial, karena sesungguhnya, fasilitator juga adalah 'agen perubahan' (14).

J. Sikap Dasar Fasilitator

Sikap seseorang adalah merupakan kombinasi dari nilai yang dianut, keyakinan, opini, pendidikan dan pengalaman masa lalu yang membentuknya. Sikap ditunjukkan dengan beragam cara, antara lain lewat pendapat, kata-kata, nada suara, bahasa tubuh, raut muka danperilaku dalam kelompok. Ada beberapa sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Mengapa sikap dasar ini penting? Karena, setiap fasilitator pastilah menghadapi berbagai kelompok dengan latar belakang yang beragam. Karenanya, setiap fasilitator haruslah memiliki beberapa sikap dasar berikut (19):

1. Minat

Cobalah anda merenung sejenak, bagaimana bila anda dengan sangat antusias bercerita kepada orang lain, sedangkan ternyata orang tersebut tidak terlalu memperdulikan anda? Kecil sekali kemungkinannya anda ingin untuk bertemu dengan dia lagi. Orang lain akan lebih merasa nyaman dan percaya diri bercerita dan berpendapat, bila anda juga memberikan perhatian yang sesuai. Mereka akan merasa diperhatikan bila anda juga memberikan kepedulian yang sesuai, seperti misalnya kehidupan mereka, jadi janganlah hanya memberikan perhatian terbatas kepada aspek-aspek yang hanya berkaitan dengan anda.

2. Empati

Sebagai fasilitator anda haruslah mampu menempatkan diri dalam situasi yang dihadapi orang lain guna memahami perspektif yang mereka miliki terhadap isu-isu tertentu. Empati menjadi sangat penting ketika kita bekerja dengan komunitas untuk bisa mengerti keragaman kondisi, situasi dan kepentingan mereka. Hal ini terkadang sulit untuk dilakukan, karena kita harus bebas dari persepsi orang lain dan harus bekerja keras

untuk menempatkan diri kita dalam posisi tertentu. Tantangan terbesar dalam hal ini, bila anda memfasilitasi sebuah kelompok, maka anda harus bisa berempati kepada banyak orang secara bersama-sama. Tetapi bila anda bias mengembangkan sikap ini, maka ganjarannya adalah orang akan lebih percaya kepada anda dan karenanya mereka juga akan responsif. Yang sulit adalah bersikap empati dengan menjaga kenetralan.

3. Berpikir Positif

Hal ini berarti bahwa apapun pendapat,pandangan, perilaku, jender ataupun latar belakang seseorang, anda harus selalu menghormati keunikan setiap individu dan menghargai potensi yang dimilikinya. Anda harus menerima orang lain apa adanya ketika anda bekerja sebagai seorang fasilitator. Bila anda dapat menghargai perbedaan-perbedaan ini, maka anda akan mampu untuk memfasilitasi mereka.

4. Percaya

Hal ini berarti sebagai fasilitator Anda harus mempercayai potensi kelompok yang Anda fasilitasi untuk mempunyai kemampuan dalam menemukan jalan atau solusi atas permasalahannya sendiri. Hal ini berarti bahwa, apapun komposisi kelompok itu, Anda selalu percaya bahwa jawaban atas permasalahan adalah ada pada kelompok itu sendiri. Sebagai fasilitator anda tinggal mendorong proses bagi kelompok tersebut untuk menemukan permasalahannya sendiri. Tentu keempat sikap tersebut hanyalah sebagian dari berbagai sikap yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Tetap, bila anda bias menguasai keempat sikap dasar yang esensial tersebut, anda sudah memiliki sikap dasar untuk memfasilitasi sebuah kelompok. Jika sikap anda tidak mendukung, maka anda sendiri pasti juga akan menghadapi kesulitan.

K. Keterampilan Dasar Fasilitator

Dalam banyak hal seringkali seorang fasilitator masih memaksakan pandangannya terhadap kelompok yang difasilitasinya. Hal ini seringkali terjadi karena fasilitator merasa lebih banyak memiliki pengalaman daripada kelompok yang

difasilitasinya dikarenakan pengalaman memfasilitasinya di masa lampau dengan berbagai permasalahan serupa.

Fasilitator hendaknya menyadari bahwa seringkali kelompok terdiri dari orang-orang difasilitasi berpengalaman. Pada saat seperti ini cara pandang kita sebaiknya dikesampingkan. Lebih penting bagi fasilitator mengeksplorasi ide-ide mereka dan tetap netral dalam memandu proses kelompok untuk menemukan solusi bersama. Sebagai fasilitator hendaknya kita menyadari bahwa tugas yang kita emban lebih banyak mengekplorasi dengan melontarkan berbagai pertanyaan-pertanyaan menganalisis untuk menemu kenali kelompok sebenarnya, permasalahan yang banyak pandangan-pandangan pribadi memberikan dimiliki

1. Seni Bertanya: ORIK

Fasilitator tidak boleh memberikan jawaban kita sendiri terhadap masalah sebuah kelompok. Lalu bagaimana kita bisa membantu mereka? Sebagai titik awal kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan untuk merinci lebih jauh masalah yang sedang dibahas dan secara perlahan mendorong kelompok untuk masalah tersebut. Kombinasi menganalisis pertanyaanpertanyaan secara sekuensi seperti yang digambarkan dalam metode ORIK (Objektif, Reflektif, Interaktif, Keputusan) bisa membantu kita. Paling penting, pastikan ketika kita bertanya tidak memasukkan gagasan-gagasan kita sendiri "Menurut saya, menggunakan X adalah cara terbaik, bagaimana menurut Anda?".

2. Seni Menggali Lebih Dalam (Probing)

Teknik adalah salah satu keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang fasilitator. Teknik ini digunakan untuk menggali lebih dalam lagi dan menjaga agar orang-orang yang berdiskusi untuk tetap berbicara. Di samping itu, teknik probing ini sangat diperlukan untuk menghindarkan diskusi dari kemacetan.

Teknik ini akan menunjukkan perbedaan positif diantara kegiatan fasilitasi pada tingkat kualitas dan kedalaman. Seperti misalnya pada saat kelompok terjebak pada kemacetan atau diskusi yang semakin melebar maka teknik *probing* ini dapat

digunakan untuk memindahkan diskusi kepada hal-hal yang lebih detil dan spesifik. Beberapa cara *probing* untuk membantu kelompok antara lain (20):

- a. Mencari akar masalah;
- b. Mencerahkan anggota kelompok yang lain;
- c. Mengeksplorasi perhatian atau gagasan;
- d. Mendorong anggota kelompok untuk mengekplorasi gagasan secara lebih mendalam dan untuk menolong proses berpikir mereka sendiri;
- e. Membuka kelompok agar lebih jujur membagi informasi dan perhatian;
- f. Menaikkan tingkat kepercayaan dalam kelompok;
- g. Membongkar fakta-fakta kunci yang belum keluar;
- h. Meningkatkan kreatifitas dan berpikir positif.

Komunikasi non verbal juga dapat dilakukan untuk melakukan probing, yaitu antara lain dengan menganggukkan kepala, menjaga kontak mata langsung, dan tetap berdiam diri untuk beberapa saat. Cara-cara ini digunakan untuk menggali lebih dalam lagi pendapat peserta. Teknik verbal juga dilakukan untuk hal yang sama, misalnya dapat menggunakan kalimat sederhana, "O ya?" atau "Hmm...", tetapi juga bisa saja pertanyaan atau permintaan langsung, seperti "Kenapa begitu?", "Bisa diberikan contoh?". Namun Anda harus menggunakan probing ini secara selektif sebagai pembuka jalan saja. Karena bila terlalu banyak melakukan probing yang tidak tepat justru akan menimbulkan beberapa hal yang seharusnya dihindari. Antara lain adalah anggota kelompok merasa diinterograsi, anggota kelompok lain merasa menjadi kurang terperhatikan karena terlalu banyak probing pada salah satu orang, kehilangan netralitas (terutama bila memiliki agenda tersembunyi), dan probing dapat membuat berputar-putar pada satu tempat saja.

3. Seni Membuat Ikhtisar (Parafrase)

Teknik ini adalah teknik mengulang pendapat dengan menggunakan bahasa anda sendiri. Parafrase sangat berguna untuk memeriksa pemahaman dengan orang yang berpendapat. Ketika fasilitator mengulang kalimat-kalimat si pembicara, peserta yang lain juga akan saling memeriksa pemahaman mereka atas

pendapat peserta yang mengajukan pendapat. Jika anda salah menangkap pesan yang dimaksud, maka anda dapat langsung melakukan perbaikan terhadap kesalah pahaman tersebut. Contoh kalimat parafrase tersebut adalah, "Baik, Supri. Kalau tidak salah, anda tadi mengatakan...". Anda dapat menggunakan teknik ini untuk menaikkan kesepahaman dalam kelompok, tetapi jangan sampai menggunakan teknik ini untuk memasukkan opini anda sendiri. Juga, hindari kesan bahwa anda berusaha untuk memperbaiki atau menambahkan apa yang telah dikatakan oleh peserta diskusi.

Dalam bahasa yang sederhana, paraphrase digunakan sebagai penghormatan terhadap orang yang berpendapat, dan sebagai fasilitator anda mendengar langsung dan menghargai apa yang diungkapkan peserta tersebut. Parafrase paling tepat digunakan untuk membantu kalimat-kalimat peserta yang tidak jelas, terlalu abstrak, konsep tidak terang, atau mempunyai terlalu banyak ide. Dalam beberapa kasus, seni membuat ikhstisar ini tidak perlu dilakukan terutama jika anda sudah mencatat input anggota di flip chart atau white board. Hindari memparafrase setiap input orang. Teknik terbaik yang bisa dilakukan adalah mendengar secara aktif dan merekam kata-kata kunci dari Beberapa hal yang perlu dipegang sebagai dasar melakukan parafrase antara lain adalah: parafrase hanya untuk memeriksa pamahaman; menggunakan parafrase untuk memperbaiki kalimat-kalimat pembicara; hindari menambah atau mengubah apa yang dikatakan pembicara; jika mungkin gunakan kata-kata si pembicara setepat mungkin; dan paraphrase digunakan ketika anda pikir ada anggota kelompok yang tidak mendengar apa yang dikatakan si pembicara (21).

4. Seni Mengaitkan Pernyataan dan Komentar

Teknik ini seringkali disebut dengan teknik *referencing back*, yaitu teknik untuk mengkaitkaitkan pernyataan peserta dengan pernyataan peserta yang lain sebelum-sebelumnya. Ketika peserta pertemuan mengemukakan sebuah pendapat yang mirip dengan komentar yang telah dikatakan sebelum-sebelumnya, anda bias mengatakan, "Ini mungkin masih berkaitan dengan pernyataan yang dikatakan Andri tadi. Andri bagaimana pendapat anda?".

Referencing back mendorong anggota untuk mengetahui dan membangun di atas salah satu ide yang lain. Teknik ini juga mendorong partisipan untuk mendengarkan satu sama lain. Di samping itu, teknik ini dapat digunakan untuk tidak setuju dan menunjuk perbedaan yang ada diantara pendapat-pendapat peserta. Teknik ini juga mendorong peserta untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain. Karena kadangkala peserta mengulang pembicaraan yang telah ada karena mereka tidak mendengar pendapat yang telah muncul sebelumnya atau ingin mengungkapkan ide tersebut dengan cara yang lain.

Dengan mengungkapkan apa yang telah diungkapkan peserta sebelumnya, maka sebenarnya forum pertemuan telah didorong untuk lebih teliti dan menyimak apa-apa pendapat yang telah muncul sebelumnya. Para peserta didorong untuk mendengar lebih teliti dan mengkait-kaitkan komentar-komentar mereka dengan peserta yang lain. Keuntungan lain yang dapat anda peroleh dari menerapkan *referencing back* adalah dapat dikatakan bahwa ini menunjukkan perhatian anda kepada setiap komentar yang muncul dari peserta. Disamping itu tentu saja hal ini membuktikan bahwa anda mendengarkan dan menyimak secara aktif setiap pendapat yang muncul. Karena kadangkala, banyak fasilitator atau peserta yang mengabaikan komentar orang lain dan menganggapnya sebagai sebuah

komentar yang tidak pernah diungkapkan.

Teknik referencing back adalah juga teknik yang bagus untuk menyeimbangkan partisipasi,karena sebagai fasilitator anda dapat memilih pendapat dari peserta yang sangat pendiam atau seseorang yang berada dalam posisi yang tidak berkuasa dalam organisasi. Hal ini adalah sebagai cara anda untuk memberi respek dan penghargaan karena telah membagi gagasan (2).

5. Seni Mengamati (Observing)

Teknik observasi atau pengamatan adalah kemampuan untuk mengamati apa yang sedang terjadi tanpa menghakimi tandatanda non verbal seseorang dan kelompok secara obyektif. Hal ini terjadi karena seringkali orang lebih mudah mengembalikan katakata dibandingkan dengan perilaku kita. Sebagai fasilitator, pengamatan memberikan peluang bagi anda untuk mengetahui

apa yang dipikirkan orang lain tidak hanya dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari perilakunya. Karena sebenarnya perilaku non verbal dapat mengungkapkan sesuatu pesan secara cukup kuat.

Anda bisa mengecek berbagai pendapat bukan hanya pada apa yang dikatakan melainkan juga pada bahasa non verbalnya karena seringkali pendapat juga dipengaruhi oleh bagaimana cara pendapat tersebut diungkapkan. Misalnya untuk tataran individu, anda dapat mengecek pada intonasi suara, gaya komunikasi, ekspresi muka, kontak mata, gerakan tubuh, dan postur tubuh.

Sedangkan pada tingkatan kelompok anda dapat mengecek beberapa hal berikut: siapa mengatakan apa? Siapa melakukan apa? Siapa melihat siapa ketika mengatakan sesuatu? Siapa menghindari terjadinya kontak mata? Siapa duduk di dekat siapa? Bagaimana tingkat energi kelompok? Bagaimana tingkat minat kelompok? Pengamatan yang baik akan membantu anda untuk mendapatkan gambaran tentang perasaan dan sikap para peserta serta memantau dinamika, proses-proses dan partisipasi kelompok. Karena itu sangat penting bagi seorang fasilitator untuk mengembangkan keterampilan mengamati jenis-jenis komunikasi non-verbal. Sebaiknya Anda melakukannya dalam waktu yang singkat tanpa diketahui oleh peserta-peserta yang lain.

6. Seni Menyimak

Banyak fasilitator melewatkan substansi komunikasi "dua arah", yang sejatinya sangat penting dalam meningkatkan kesepahaman antara berbagai pihak. Keterampilan menyimak adalah keterampilan kunci seorang fasilitator. Hal ini sangat penting bagi seorang fasilitator karena cara Anda menyimak akan mempunyai arti yang sangat paenting bagi orang yang berbicara dan membantu meningkatkan kualitas komunikasi antara Anda dan orang itu.

Disamping itu, fasilitator juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas komunikasi dalam kelompok dan membantu anggota kelompok untuk saling menyimak dengan lebih baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak antara lain adalah (14):

a. Tunjukkan empati dan minat.

Artinya Anda sedang menyimak. Gunakan bahasa tubuh anda sebagai pesan bahwa Anda sedang memperhatikan dan mencoba memahami apa yang mereka pikirkan. Perhatikan kata-katanya yang utama, jangan banyak bicara untuk menjelaskan opini anda sendiri, biarkan mereka bebas menyampaikan gagasan yang ada dipikiran. Berikan dukungan secara penuh dengan memberikan fokus perhatian kepada orang tersebut dengan cara menganggukkan kepala ataupun dengan kata-kata dukungan. Jangan menyela!

b. Menyimaklah dengan aktif.

Menyimak bukan berarti anda harus pasif, melainkan anda harus aktif untuk menangkap seluruh pesan yang ingin disampaikan oleh peserta yang berpendapat. Misalnya dengan memperhatikan bentuk tubuh, raut muka dan pilihan bahasa yang digunakan. Gunakan teknik parafrase untuk memastikan bahwa anda paham.

c. Menyimak dengan baik lebih sulit dari dugaan kita.

Hal ini terjadi karena banyak hal yang ternyata menyebabkan kita menjadi sulit untuk menyimak. Misalnya, karena proses kita berpikir lebih cepat daripada orang berbicara, maka kadang-kadang pada saat seseorang belum selesai berbicara mereka telah menggunakan kemampuannya untuk berpikir hal yang lain. Atau misalnya, mendadak emosi dan terbakar amarahnya saat mendengar orang lain berpendapat, mendengar dengan melamun, menyimak dengan telinga terbuka tetapi pikiran tertutup, menganggap isu-isu yang diungkapkan terlalu berat sehingga bisa dan menyimak dengan serta merta menggoyang keyakinan orang lain.

Berikut ini adalah pembahasan mengenai peran yang dijalankan baik oleh fasilitator maupun *co-fasilitator* dalam pelaksanaan program STBM yang akan diklasifikasikan berdasarkan peran *community worker* pada teori Jim Ife.

L. Peran Fasilitator Program STBM

1. Peran Fasilitator dan *Co-fasilitator* Pada Pelaksanaan Program STBM

Keberhasilan program STBM di desa Ligarmukti tidak terlepas dari adanya peran yang dijalankan oleh fasilitator maupun co-fasilitator yang berjuang dan melakukan tugas mengubah perilaku kesehatan untuk masvarakat selama kurang lebih satu tahun pelaksanaan STBM di desa tersebut. Baik fasilitator maupun co-fasilitator pada pelaksanaan program STBM menjalankan peran yang berbeda satu dengan lainnya dengan tujuan untuk saling mendukung dan saling melengkapi kekurangan yang ada. Sebagai fasilitator yang bukan berasal dari masyarakat desa Ligarmukti, banyak berperan dalam pertemuan dan pemicuan yang dilakukan seminggu sekali, sedangkan co-fasilitator yang merupakan bagian dari warga Ligarmukti lebih berperan dalam hal monitoring dan mendorong warga untuk berubah secara intensif melalui kunjungan (3).

Langkah awal yang dilakukan oleh fasilitator dalam rangkaian pelaksanaan program STBM dilapangan yaitu dengan melakukan koordinasi kepada *stakeholder*. Pada saat melakuka koordinasi, fasilitator didampingi oleh pihak kecamatan, kabupaten serta konsultan. Fasilitator menjelaskan mengenai ODF itu sendiri dihadapan pihak kelurahan. "....berkoordinasi dengan pihak desa yaitu pak lurah desa. Kita jelaskan bahwa kita akan mengadakan sosialisasi tentang ODF itu...kita juga jelaskan program kita ke pihak kelurahan dan mereka setuju dengan program ini diaplikasikan di desa".

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari pihak desa yang mengatakan bahwa fasilitator bersama-sama dari pihak dinas melakukan koordinasi ke desa untuk memperkenalkan STBM. "yang pertama datang itu pak BD dari dinas kesehatan melakukan pertemuan disini, didesa mengenai program STBM, yang datang juga ada yang dari dinas kesehatan kabupaten dan puskesmas" (22).

Pihak Lembaga Bina Swadaya juga memberikan pernyataan seputar koordinasi yang dilakukan fasilitator dengan

pihak desa sangat perlu dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan di desa yang bersangkutan demi kelancaran pelaksanaan program tersebut.

2. Peran Fasilitator dan *Co-fasilitator* dalam Pelaksanaan Program STBM

Dalam menjalankan suatu pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Hodge bahwa pengembangan dirancang untuk peningkatan taraf masyarakat melalui partisipatif aktif dan hidup memungkinkan berdasarkan inisiatif masvarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat, dibutuhkan suatu peranan dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam program yang meningkatkan dirancang dan dibuat untuk masyarakat.

Dalam program STBM ini pemerintah melakukan inisiatif program pemberdayaan namun dengan berlandaskan pertisipasi masyarakat. Berdasarkan SOP yang sudah dibuat dalam proses pelaksanaan STBM, maka dibutuhkanlah suatu tim pelaksana yaitu tim pemicu masyarakat yang bekerja langsung sebagai fasilitator dan menjalankan program STBM tersebut. Fasilitator dalam praktek langsung mencari Saniasi leader yaitu cofasilitator yang nantinya bersama dengan fasilitator membantu dalam perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat (8).

M. Peran Fasilitator (Pengelola PTM Puskesmas) dalam Posbindu

1. Persiapan

Kabupaten/Kota berperan untuk melakukan inisiasi dengan berbagai rangkaian kegiatan. Langkah persiapan diawali dengan pengumpulan data dan informasi besaran masalah PTM, sarana prasarana, pendukung dan sumber daya manusia. Hal ini dapat diambil dari data RS Kabupaten/Kota, Puskesmas, Profil Kesehatan Daerah atau hasil survey lainnya. Informasi tersebut dipergunakan oleh fasilitator sebagai bahan advokasi untuk

mendaatkan dukungan kebijakan maupun dukungan pendanaan sebagai dasar perencanaan kegiatan posbindu PTM.

Selanjutnya dilakukan identifikasi kelompok potensial baik maupun dilingkup Puskesmas. Kabupaten/Kota potensial kelompok/organisasi Kelompok antara lain masyarakat, tempat kerja, sekolah, koperasi, klub olahraga, karang taruna dan kelompok lainnya. Kepada kelompok masyarakat potensial terpilih dilakukan sosialisasi tentang besarnya masalah PTM, dampaknya bagi masyarakat dan dunia usaha, strategi pengendalian serta tujuan dan manfaat posbindu PTM. Hal ini dilakukan sebagai advokasi agar diperoleh dukungan dan komitmen dalam menyelenggarakan posbindu PTM. Apabila jumlah kelompok potensial terlalu besar pertemuan sosialisasi dan advokasi dapat dilakukan beberapa kali. Dari pertemuan sosialisasi tersebut diharapkan telah teridentifikasi kelompok/lembaga/organisasi yang bersedia menyelenggarakan Posbindu PTM (23).

2. Pelaksanaan

Tindak lanjut yang dilakukan oleh fasilitator di Kabupaten/Kota adalah melakukan pertemuan koordinasi dengan kelompok potensial yang bersedia menyelenggarakan Posbindu PTM. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama berupa kegiatan penyelenggaraan Posbindu PTM, yaitu :

- a. Kesepakatan menyelenggarakan Posbindu PTM. Menetapkan kader dan pembagian peran, fungsinya sebagai tenaga pelaksana Posbindu PTM.
- b. Menetapkan jadwal pelaksanaan Posbindu PTM.
- c. Merencanakan besaran dan sumber pembiayaan.
- d. Melengkapi sarana dan prasarana.
- e. Menetapkan tipe Posbindu PTM sesuai kesepakatan dan kebutuhan.
- f. Menetapkan mekanisme kerja antara kelompok potensial dengan petugas kesehatan pembinanya.
- 3. Pelatihan

Fasilitator melakukan pelatihan PTM tenaga pelaksana/Kader Posbindu PTM dengan tujuan :

- a. Memberikan pengetahuan tentang PTM, faktor risiko, dampak, dan pengendalian PTM
- b. Memberikan pengetahuan tentang Posbindu PTM.
- c. Memberikan kemampuan dan ketrampilan dalam memantau faktor risiko PTM.
- d. Memberikan ketrampilan dalam melakukan konseling serta tindak lanjut lainnya.

Materi Pelatihan Kader/Pelaksana Posbindu PTM sesuai modul dari kementian kesehatan program PTM. Posbindu berjalan dengan baik bila mendapat dukungan dari kader, kader diharapkan bisa memberikan dukungan berupa berbagai pelayanan yang meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, darah, pengisian lembar KMS, pengukuran tekanan memberikan penyuluhan atau penyebarluasan kesehatan, menggerakkan serta mengajak masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan Posbindu karena itulah kader harus dibina dituntun serta didukung oleh fasilitator yang terampil dan berpengalaman (24).

N. Fungsi dan Kemampuan Fasilitator

Secara umum pelaku proses fasilitasi sering disebut fasilitator. Dalam contoh beberapa kasus Program Pengembangan Sanitasi; beberapa lembaga sebagai fasilitator dari luar masyarakat, sehingga dalam pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai pendamping luar. Sedangkan Pendamping Lokal yang berasal dari masyarakat setempat juga berperan sebagai fasilitator yang dipahami sebagai Kader Pemberdayaan. Sebagai pendamping masyarakat, pada waktu tertentu harus siap mundur dari perannya dan memandirikan para Kader Pemberdayaan (17).

1. Fungsi Fasilitator

Agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik maka seorang fasilitator perlu menyadari dan memahami empat fungsi fasilitator dimasyarakat yaitu:

a. Sebagai Narasumber

Artinya seorang fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan informasi-informasi termasuk pendukungnya yang berkaitan dengan program. Seorang fasilitator harus

mampu menjawab pertanyaan, memberikan ulasan, gambaran analisis maupun memberikan saran atau nasehat yang konkrit dan realistis agar mudah diterapkan.

b. Sebagai Guru

Fungsi sebagai guru seringkali dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterampilan atau pengetahuan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program. Sebagai fasilitator harus mampu menyampaikan materi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat serta mudah diterapkan tahap demi tahap.

c. Sebagai Mediator

- 1) Mediasi potensi
 - Seorang fasilitator diharapkan dapat membantu masyarakat memediasi/mengakses potensi-potensi yang dapat mendukung pengembangan dirinya misalnya: sector swasta, perguruan tinggi, LSM, peluang pasar, dan sebagainya.
- 2) Mediasi berbagai kepentingan
 - Seorang fasilitator diharapkan juga dapat berperan sebagai orang yang dapat menengahi apabila diantara masyarakat individu kelompok atau di perbedaaan kepentingan. Perlu diingat fungsi ini bukan berarti fasilitator perlu memutuskan tetapi hanya perlu mengingatkan masyarakat tentang konsistensi terhadap berbagai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Arti lain adalah menyesuaikan berbagai kepentingan untuk tujuan bersama. Jika diperlukan mencapai seorang masyarakat fasilitator bisa membantu dengan alternatif kesepakatan memberikan berbagai menyesuaikan berbagai kepentingan demi tercapainya tujuan bersama. Untuk itu seorang fasilitator harus netral dan tidak memihak kepada salah satu kelompok saja.
- 3) Sebagai Perangsang atau Penantang (*Chalenger*) Sering ditemui bahwa masyarakat jarang mengetahui dan mengenal potensi dan kapasitasnya sendiri. Untuk itu seorang fasilitator harus mampu merangsang dan

mendorong masyarakat untuk menemukan dan mengenali potensi dan kapasitasnya sendiri. Sehingga masyarakat dapat melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan secara mandiri. Sehingga pada saat tertentu seorang fasilitator harus tahu kapan dirinya berfungsi sebagai animator artinya masyarakat dapat berfungsi penuh/mandiri dalam memutuskan segala sesuatu tanpa bayang-bayang intervensi fasilitatornya.

2. Kemampuan Fasilitator

Agar dapat menjalankan fungsi-fungsi di atas maka seorang fasilitator perlu dibekali dan memiliki beberapa kemampuan antara lain (12):

a. Kepemimpinan

Seorang fasilitator juga akan menjalankan kepemimpinan di masyarakat sehingga seharusnya memiliki membimbing, kapasitas untuk memberi motivasi. menggerakkan sekaligus berperan sebagai mediator antar warga masyarakat dan pihak lain yang diperlukan. Beberapa yang dapat dilakukan meningkatkan untuk kepemimpinan antara lain:

- 1) Dengan menambah pengetahuan melalui pelatihanpelatihan.
- 2) Belajar sendiri dengan banyak membaca buku.
- 3) Banyak menimba atau mempelajari pengalaman dari luar (studi banding, seminar)
- 4) Harus tanggap, dapat menjabarkan ide-ide, konsep dan kebijakan.
- 5) Melatih diri dengan berpikir kreatif, berpikir orisinil dan selalu berwawasan masa depan (*visionerk*).
- 6) Tahan dan berjiwa besar menerima kritikan dari luar.

b. Kemampuan Komunikasi

Termasuk dalam kemampuan komunikasi yang dibutuhkan adalah:

1) Kemampuan menyampaikan pesan atau informasi

Fasih dan jelas dalam menyampaikan pesan, informasi, ide atau gagasan (intevensi informasi) kepada masyarakat merupakan syarat mutlak seorang fasilitator dalam menjalankan proses fasilitasi. Dengan kemampuan itulah

fasilitator akan dapat menjelaskan dan memberikan kontribusi kepada anggota dan kelompok masyarakat.

2) Menjadi pendengar yang aktif

Jika seorang fasilitator mampu menjadi pendengar yang aktif maka sangat memungkinkan akan tahu apa yang terjadi dan peka terhadap perasaan dan emosi dibalik ungkapan kata yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan mengetahui apa yang terjadi dan peka terhadap perasaan dan emosi dibalik ungkapan kata yang disampaikan oleh masyarakat menjadi dasar untuk mengambil sikap dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Untuk menjadi pendengar yang baik dan aktif diperlukan suatu pengendalian terhadap emosi atau perasaan diri serta bias menghargai setiap pendapat dan gagasan yang disampaikan masyarakat.

3) Bertanya efektif dan terarah

Dengan bertanya secara efektif akan memudahkan seorang fasilitator untuk belajar dan mengerti apa yang terjadi serta sekaligus dapat memberi pemahaman untuk dapat memilih dan menemukan alternatif tindakan. Bertanya efektif dan terarah dapat dilakukan jika fasilitator telah menguasai dan memahami program yang disampaikan.

- 4) Kemampuan dalam pengembangan masyarakat Beberapa kemampuan yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
- a) Mengenal isu-isu lokal

Seorang fasilitator perlu memahami benar serta menghayati isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan sehingga mengenal apa yang harus dan bisa dilakukan oleh masyarakat.

b) Kemampuan identifikasi

Kemampuan mengidentifikasi potensi, masalah, hambatan dan fenomena yang terjadi merupakan awal dan bekal seorang fasilitator dalam melakukan pemberdayaan dan fasilitasi di masyarakat. Kemampuan ini diperlukan untuk pendekatan kepada masyarakat agar program berjalan optimal.

c) Kemampuan analitis

Melalui proses analitis maka seorang fasilitator akan dapat mengantisipasi masalah, menemukan berbagai alternatif penyelesaian serta mampu menjadi prakarsa dalam upaya pemberdayaan.

d) Adaptasi partisipatif

Menyesuaikan diri dengan kondisi, harapan dan karakteristik masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan bekal yang sangat positif dalam fasilitasi. Hal tersebut diharapkan dapat memberi manfaat berupa keterlibatan dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap program serta dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan program.

Disisi lain keberadaan masyarakat sebagai orang dewasa menuntut fasilitator untuk dapat melibatkan pemikiran dan aksi mereka agar dapat memberi kontribusi terhadap pelaksanaan program.

e) Berpandangan positif ke depan

Selalu berpandangan secara positif dalam banyak hal sehingga tidak mudah terjebak pada pengambilan posisi pada setiap masalah secara sebagian – sebagian dan hanya didasarkan pada kepentingan sesaat/jangka pendek saja, tetapi segala sesuatu dipandang secara utuh didasarkan pada tujuan yang jauh ke depan.

f) Kemampuan melakukan aksi sebagai akumulasi kemampuan teknis

Seringkali "dengan kata" saja dirasa tidak cukup karena dibeberapa hal menuntut bukti. Begitupun dengan masyarakat, seorang fasilitator perlu sesekali melakukan sesuatu sebagai wujud sebuah pernyataan untuk bukti keberadaan dan kepedulian terhadap masyarakat.

g) Kemampuan hubungan antar manusia (Human relationship)

Seorang fasilitator harus memiliki kapasitas untuk membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Berkaitan dengan bagaimana memperlakukan dan berinteraksi dengan mereka serta menempatkan mereka dengan prinsip kesetaraan.

O. Proses Fasilitasi Dimasyarakat Oleh Fasilitator

Terdapat beberapa langkah atau tahapan dalam memfasilitasi masyarakat melakukan suatuprogram, yaitu (25):

1. Tahap Identifikasi

Merupakan proses awal dari fasilitasi yaitu mencoba menemu kenali masyarakat termasuk kondisi dan potensi serta lingkungannya. Bagi Fasilitator yang biasanya berasal dari luar lokasi penerima program, tahap ini sangat penting dan membantu dalam kelancaran menjalankan tugas-tugasnya. Identifikasi wilayah dapat dilakukan melalui kunjungan ke desadesa untuk mengamati (observasi) dan wawancara dengan masyarakat guna mengetahui kondisi, potensi serta kebiasaan yang berkembang dimasyarakat tersebut. Dalam tahapan ini sekaligus untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat mengenai keberadaan seorang fasilitator.

2. Penyebarluasan dan Pendampingan

Setelah melakukan tahap identifikasi dan keberadaan fasilitator diterima oleh masyarakat, maka langkah berikutnya adalah melakukan penyebarluasan dan pendampingan terhadap tahapan pelaksanaan program yang dibawa, yaitu membantu masyarakat untuk:

a. Menyadari keberadaan diri mereka sendiri

Untuk mengajak masyarakat melaksanakan suatu kegiatan yang dapat menunjang kualitas hidupnya, perlu adanya penyadaran kepada masyarakat mengenai keberadaan diri mereka sendiri. Seringkali masyarakat hanya dapat merasakan tetapi tidak dapat mengungkapkan keberadaan mereka sendiri. Dalam masyarakat, disamping permasalahan-permasalahan yang sering dirasakan sebenarnya ada juga daya dan potensi yang dimiliki untuk mengatasinya. Seorang fasilitator harus bisa memandu masyarakat untuk menemukan keberadaan mereka sendiri. Langkah-langkah yang diperlukan sebagai berikut:

1) Ajaklah masyarakat untuk mengungkapkan dan menyata kan kembali apa yang telah dialaminya,

- 2) Mintalah kepada mereka untuk memberikan tanggapan dan kesan terhadap pengalaman yang telah diungkapkan tersebut,
- 3) Ajak masyarakat untuk mengkaji atau mengolah semua pengalaman yang diungkapkan tersebut, kemudian menghubungkannya dengan pengalaman lain yang mungkin bisa mengandung atau memiliki kondisi serupa,
- 4) Pandu masyarakat untuk menemukan pada dirinya ada daya dan potensi yang bisa dikembangkan,
- 5) Bantu masyarakat untuk merumuskan, merinci serta memperjelas kondisi dan potensi, sesuai pengalaman yang ada. Selanjutnya ajak masyarakat untuk mengembangkan atau merumuskan hal-hal yang dapat memberi manfaat dimasa datang.

Dalam Penyelenggaraan program berbasis masyarakat, proses ini dapat dilakukan melalui pertemuan formal maupun informal yang ada dimasyarakat. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut sampaikan pula apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat untuk mengikuti PPK.

b. Mendapatkan pembelajaran melalui pelatihan atau pendampingan

Dengan mengetahui daya, potensi dan kemampuan serta dirinya, menjadi akan lebih mudah bagi masyarakat untuk mengikuti dan melaksanakan program yang dibawa oleh Fasilitator. Tahapan selanjutnya, ajak masyarakat untuk mengalami/terlibat langsung dalam mewujudkan kesimpulan yang telah dirumuskan bersama melalui kegiatankegiatan yang ada dalam program. Keikutsertaan langsung masyarakat dalam setiap kegiatan merupakan sekaligus pemberdayaan, pembelajaran sehingga sangat diperlukan adanya pendampingan dan pelatihan yang harus diberikan oleh Fasilitator. Pendampingan kepada masyarakat mengukur keberhasilannya dalam padatujuan, parameter dan indikator yang telah dibuat oleh masyarakat sendiri.

c. Mengorganisir diri

Keikutsertaan pada setiap kegiatan dalam program merupakan pengalaman baru bagi masyarakat. Jika hal ini dilakukan secara berulang-ulang pada akhirnya akan melembaga berkembang dimasyarakat. sistem yang menjadi suatu Masyarakat mengorganisir diri mereka akan berdasarkan pengalaman barunya.

d. Menjadi dinamis untuk mewujud nyatakan tujuan yang akan dicapai

Sistem baru yang berkembang dimasyarakat, pada akhirnya akan menjadi dinamika tersendiri bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan mewujudkan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Jika hal ini terjadi maka keberlanjutan program akan dilanjutkan sendiri oleh masyarakat.

3. Refleksi hasil

Setelah melalui berbagai tahapan di atas, ajaklah masyarakat untuk mengukur, mengevaluasi dan menganalisis langkahlangkah yang telah dilakukan sebelumnya untuk menemukan langkah-langkah strategis selanjutnya.

P. Fasilitasi Dalam Pertemuan Masyarakat Oleh Fasilitator

Salah satu bentuk aktifitas masyarakat dalam mengikuti PPK adalah menyelanggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah di tingkat kelompok, dusun, desa dan antar desa ataukecamatan. Pertemuan-pertemuan masyarakat ini akan difasilitasi oleh fasilitator desa dan/atau fasilitator kecamatan serta Pendamping Lokal. Fungsi dan peran seorang fasilitator dalam suatu pertemuan masyarakat adalah (17):

- 1. Menyampaikan tujuan dan memandu jalannya pertemuan.
- 2. Memotivasi peserta untuk mengemukakan pendapat.
- 3. Memandu peserta dalam mengambil suatu keputusan. Faktor-faktor fasilitasi yang perlu diperhatikan dalam suatu pertemuan:
- 1. Penguasaan materi yang akan disampaikan
- 2. Penguasaan terhadap kareteristik dan tipe peserta yang hadir.
- 3. Teknik Penanganan Konflik

4. Teknik komunikasi:

- a. Penampilan; pakaian tidak mencolok, rapi dan disesuaikan dengan peserta yang hadir.
- b. Gunakan bahasa yang sederhana (kalau bisa bahasa setempat) sehingga mudah dimengerti.
- c. Jangan terlalu cepat ketika berbicara.
- d. Perlu pengaturan suara, sesuaikan dengan kondisi tempat atau ruangan yang penting bisa didengarkan semua peserta.
- e. Gunakan contoh-contoh yang sering terjadi keseharian sebagai analogi menjelaskan suatu konsep.
- f. Beri kesempatan peserta untuk bertanya.
- g. Bersikap netral tidak boleh hanya memihak satu orang atau kelompok tertentu saja.
- h. Jangan memaksakan ide atau gagasannya sendiri atau mempengaruhi peserta untuk mengikuti ide-idenya.
- i. Tidak diperkenankan membuat keputusan sendiri.

Referensi

- 1. Miranti, Arianti L:estari Fajrin. 2013. Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Ibu Mengenai Program STBM Terhadap Kejadian Diare Pada Balita Di Kelurahan Siantan Tengah. Universitas Tanjung Pura.
- Poerwandari, E. K. (2009). Penelitian kualitatif untuk penelitian perilaku manusia. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) fakultas Psikologi UI. Kampus Baru UI-Depok
- 3. Departemen Kesehatan RI, Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Depkes RI, jakarta 2008
- 4. Rogers, E. M., & Shomaker, F. F. (1983). Diffusion of innovations. 3rd edition. New York: Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc
- 5. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2012. Tentang Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Jakarta. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2013.

- 6. LGSAP,Bahan pelatihan Fasilitator USAID,Jakarta 2007
- 7. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 2011. Pelaksanaan Program PAMSIMAS Komponen B Tahun 2010-2011. Kabupaten OI, Indralaya
- 8. Evaluasi Pencapaian Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama di Wilayah Kerja Puskesmas Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2008-2010. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Airlangga. Surabaya
- 9. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 2013. Penetapan Kinerja Tahun 2013. Kabupaten OI, Indralaya
- 10. Braakman, Lydia, dkk. 2008. Seni Membangun Kemampuan Fasilitasi. Buku Panduan Pelatihan : *RECOFTC* Indonesia *Office*
- 11. Tim Pamsimas II. 2013. "Kerangka Acuan Fasilitator Masyarakat Program Pamsimas". Artikel POKJA AMPL
- 12. Tim Koordinasi Pengembangan Kecamatan. 2005. "Fasilitasi dan Pelatihan UntukFasilitator". Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 13. Modul Pelatihan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS), Depkes RI, Ditjen PP-PL bekerjasama dengan Pokja AMPL Pusat, jakarta 2008
- 14. Notoatmodjo, S. (2005). Promosi kesehatan, Teori dan aplikasi. Jakarta: PT Rineka Cipta
- 15. Notoatmodjo, S. (2003). Pendidikan dan perilaku kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta
- 16. Dit. PL, Ditjen PP PL, Departemen Kesehatan RI, Pedoman Umum Pengelolaan Kegiatan Peningkatan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Jakarta, 2008
- 17. Jhohani, Rianingsih. 2007. "Tugas-tugas Fasilitator Masyarakat (Pendamping Masyarakat)". Diakses melalui www.academia.edu
- 18. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 2013. Indikator Kinerja Utama Tahun 2013. Kabupaten OI, Indralaya
- 19. Kurikulum Dan Modul Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Jurusan Kesehatan Lingkungan Politehnik Kesehatan. Jakarta
- 20. Kresno, S., Hadi, E. N., Wuryaningsih, C.E. 2000. Aplikasi Metode Kualitatif dalam Penelitian Kesehatan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

- 21. Moleong, L. J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
- 22. Direktorat Penyehatan Lingkungan. 2013. Road Map Percepatam Program STBM 2013- 2015.
- 23. Direktorat Jenderal P2PL. Kementrian Kesehatan RI Jesika, Melpa Sitanggang. 2013. Analisis Determinan Pemanfaatan Jamban Pasca Pemicuan CLTS di Desa Belanti Kecamatan Tanjung Raja Tahun 2013. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sriwijaya Jayanti, Auliya. 2012.
- 24. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. 2013. Profil Kesehatan Tahun 2013. Kabupaten OI, Indralaya
- 25. Yulianti, Yoni. 2012. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Universitas Andalas: Padang
- 26. Azwar, Azrul. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan. Tangerang: Binarupa Aksara.

BAB V MEDIA PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pengertian

Media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa atau dicium, untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan informasi (1). Biasanya alat peraga digunakan secara kombinasi, misalnya menggunakan papan tulis dengan photo dan sebagainya. Tetapi dalama menggunakan alat peraga, baik secara kombinasi maupun tunggal, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1. Alat peraga harus mudah dimengerti oleh masyarakat sasaran.
- 2. Ide atau gagasan yang terkandung di dalamnya harus dapat diterima oleh sasaran.

Alat peraga yang digunakan secara baik memberikan keuntungan yaitu:

- 1. Dapat menghindari salah pengertian/pemahaman atau salah tafsir
- 2. Dapat memperjelas apa yang diterangkan dan dapat lebih mudah ditangkap
- 3. Apa yang diterangkan akan lebih lama diingat, terutama halhal yang mengesankan
- 4. Dapat menarik serta memusatkan perhatian
- 5. Dapat member dorongan yang kuat untuk melakukan yang dianjurkan

Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik itu melalui media cetak, elektronik (TV, radio, komputer, dan lain-lain) dan media luar ruang, sehingga sasaran dapat meningkat pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya kearah positif terhadap kesehatannya.

Adapun tujuan media promosi kesehatan diantaranya:

1. Media dapat mempermudah penyampaian informasi.

- 2. Media dapat menghindari kesalahan persepsi.
- 3. Dapat memperjelas informasi
- 4. Media dapat mempermudah pengertian.
- 5. Mengurangi komunikasi yang verbalistik
- 6. Dapat menampilkan obyek yang tidak bisa ditangkap dengan mata.
- 7. Memperlancar komunikasi (2).

B. Jenis Media Promosi Kesehatan

- 1. Berdasarkan bentuk umum penggunaan
 - a. Bahan bacaan: Modul, buku rujukan/bacaan, folder, leaflet, majalah, buletin, dan sebagainya.
 - b. Bahan peragaan: Poster tunggal, poster seri, plipchart, tranparan, slide, film, dan seterusnya.
- 2. Berdasarkan cara produksinya, media promosi kesehatan dikelompokkan menjadi:
 - a. Media cetak, yaitu suatu media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media cetak pada umumnya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna. Fungsi utama media cetak ini adalah memberi informasi dan menghibur. Adapun macam-macamnya adalah poster, leaflet, brosur, majalah, surat kabar, lembar balik, stiker, dan pamflet.
 - 1) Kelebihan media cetak diantaranya:
 - a) Tahan lama.
 - b) Mencakup banyak orang.
 - c) Biaya tidak tinggi.
 - d) Tidak perlu listrik.
 - e) Dapat dibawa ke mana-mana.
 - f) Dapat mengungkit rasa keindahan.
 - g) Meningkatkan gairah belajar.
 - 2) Kelemahan media cetak yaitu:
 - a) Media ini tidak dapat menstimulir efek suara dan efek gerak
 - b) Mudah terlipat
- b. Media elektronika yaitu suatu media bergerak dan dinamis, dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan pesannya

melalui alat bantu elektronika. Adapun macam-macam media tersebut adalah TV, radio, film, video film, cassete, CD, VCD.

- 1) Kelebihan media elektronika diantaranya:
 - a) Sudah dikenal masyarakat.
 - b) Mengikutsertakan semua panca indra.
 - c) Lebih mudah dipahami.
 - d) Lebih menarik karena ada suara dan gambar bergerak
 - e) Bertatap muka.
 - f) Penyajian dapat dikendalikan.
 - g) Jangkauan relatif lebih besar.
 - h) Sebagai alat diskusi dan dapat diulang-ulang
- 2) Kelemahan media elektronika diantaranya:
 - a) Biaya lebih tinggi.
 - b) Sedikit rumit.
 - c) Perlu listrik.
 - d) Perlu alat canggih untuk produksinya.
 - e) Perlu persiapan matang.
 - f) Peralatan selalu berkembang dan berubah.
 - g) Perlu keterampilan penyimpanan.
 - h) Perlu terampil dalam pengoperasian (2).
- c. Media luar ruang yaitu media yang menyampaikan pesannya di luar ruang secara umum melalui media cetak dan elektronika secara statis, misalnya: Papan reklame yaitu poster dalam ukuran besar yang dapat dilihat secara umum di perjalanan, spanduk yaitu suatu pesan dalam bentuk tulisan dan disertai gambar yang dibuat di atas secarik kain dengan ukuran tergantung kebutuhan dan dipasang di suatu tempat yang strategi agar dapat dilihat oleh semua orang, pameran, banner dan TV layar lebar
 - 1) Kelebihan media luar ruang diantaranya (3):
 - a) Sebagai informasi umum dan hiburan.
 - b) Mengikutsertakan semua panca indra.
 - c) Lebih mudah dipahami.
 - d) Lebih menarik karena ada suara dan gambar bergerak.
 - e) Bertatap muka.

- f) Penyajian dapat dikendalikan.
- g) Jangkauan relatif lebih besar.
- h) Dapat menjadi tempat bertanya lebih detail.
- i) Dapat menggunakan semua panca indra secara langsung, dan lain-lain.
- 2) Kelemahan media luar ruang diantaranya:
 - a) Biaya lebih tinggi.
 - b) Sedikit rumit.
 - c) Ada yang memerlukan listrik.
 - d) Ada yang memerlukan alat canggih untuk produknya.
 - e) Perlu persiapan matang.
 - f) Peralatan selalu berkembang dan berubah.
 - g) Perlu keterampilan penyimpanan.
 - h) Perlu keterampilan dalam pengoperasian.

C. Sasaran Alat Bantu Kesehatan

Penggunaan alat peraga didasari oleh pengetahuan tentang sasaran pendidikan yang akan dicapai oleh alat peraga tersebut. Yang perlu diketahui tentang sasaran:

- 1. Apakah individu atau kelompok
- 2. Kategori sasaran: umur, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya
- 3. Bahasa yang digunakan
- 4. Adat istiadat serta kebiasaan
- 5. Minat dan perhatian
- 6. Pengetahuan dan pengalaman mereka tentang pesan yang akan diterima/disampaikan

Tempat memasang (menggunakan) alat peraga:

- 1. Di dalam keluarga, yaitu pada saat kunjungan rumah, pada saat pertolongan persalinan/menolong orang sakit
- 2. Di masyarakat
- 3. Di instansi, yaitu puskesmas, RS, kantor, sekolah dan lain-lain (4).

D. Syarat Alat Peraga Kesehatan

Syarat yang dibutuhkan dalam pemilihan atau pembuatan alat peraga kesehatan antara lain:

- 1. Mudah dibuat dan didapat, serta digunakan
- 2. Harus menarik: dapat merangsang indera penglihatan dan pendengaran
- 3. Mencerminkan kebiasaan, kehidupan dan kepercayaan setempat
- 4. Menggunakan bahasa setempat dan mudah dimengerti oleh masyarakat
- 5. Memenuhi kebutuhan petugas kesehatan dan masyarakat
- 6. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari alat peraga (5).

E. Persiapan Pembuatan Media/Alat Bantu Promosi Kesehatan

Media yang dipilih dan digunakan agar efektif maka pembuatan media perlu direncanakan atau dipersiapkan secermat mungkin (6).

1. Tahap Persiapan

Sebelum memilih media yang dipakai, maka kita melakukan:

- a. Menelaah kelompok sasaran baik dari tingkat pendidikan, tingkat social ekonomi, budaya dan karakteristik geografis.
- b. Kaji saluran media yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan: missal televise, radio dan lain-lain.
- c. Perhatikan kegiatan penyampaian pesan melalui media sebelumnya dan dilakukan oleh siapa dan bagaimana hasilnya, sehingga media apa yang akan digunakan atau diproduksi.

2. Tahap Perencanaan

Alat peraga sebagai pengganti objek nyata memperjelas pesan yang disampaikan, sehingga sebelum memuat alat peraga perlu merencanakan dan memilih alat peraga. Hal yang perlu diperhatikan pada perencanaan adalah tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan untuk memperoleh pengetahuan atau pengertian, pendapat/konsep, mengubah sikap dan persepsi dan merubah menanamkan tingkah laku dan kebiasaan yang baru.

Tujuan penggunaan alat peraga antara lain:

- a. Sebagai alat bantu dalam latihan/pendidikan atau penataran
- b. Untuk menimbulkan perhatian terhadap masalah
- c. Untuk mengingatkan suatu pesan informasi
- d. Untuk menjelaskan fakta, prosedur atau tindakan.

Sehingga alat peraga untuk meningkatkan pengetahuan berbeda dengan alat peraga untuk meningkatkan keterampilan.

3. Tahap Pembuatan (Pre-Testing dan Revisi)

Setelah dipilih alat peraga yang akan dibuat, maka kita akan membuat alat peraga. Misalnya; pembuatan poster dengan tujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang program KB, setelah didesain dibuat lalu diuji cobakan pada kelompok dengan cirri yang sama dengan sasaran dan kepada siapa poster itu akan ditujukan.

Cara test percobaan alat peraga:

- a. Rencanakan test pendahuluan
- b. Menentukan pokok pesan yang akan disampaikan dalam media
- c. Tentukan gambar pokok/symbol yang dipakai
- d. Memperlihatkan alat peraga dengan sasaran yang tercoba Observasi:
- a. Apakah mereka mengalami kesukaran dalam memahami pesan, kata, gambar dalam media tersebut
 - 1) Menanyakan hal yang tidak dimengerti
 - 2) Mencatat komentar dari sasaran tercoba
 - 3) Melakukan perbaikan alat peraga tersebut
- b. Mendiskusikan alat peraga yang dibuat dengan orang lain (teman atau para ahli)
- 4. Tahap Pelaksanaan:

Cara menggunakan alat peraga:

- a. Tergantung jenis alat peraganya
- b. Penting alat peraga harus menarik sehingga menimbulkan minat sasaran
- c. Saat penggunaan AVA perhatikan:
 - 1) Senyum adalah lebih baik
 - 2) Tunjukkan perhatian, hal yang dibicarakan adalah penting

- 3) Pandangan mata keseluruh pendengar
- 4) Gaya bicara hendaknya bervariasi
- 5) Ikut sertakan peserta untuk memegang atau mencoba alat peraga
- 6) Bila perlu selingi dengan humor

F. Macam Alat/Media Promosi Kesehatan

Alat bantu media promosi kesehatan dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu (6):

- 1. Alat bantu lihat (visual aids)
 Berguna untuk menstimulasi indera mata (penglihatan) pada waktu terjadi proses pendidikan dilaksanakan.
- 2. Alat bantu dengar (audio aids)
 Berguna untuk menstimulasi indera pendengaran (telinga)
 pada saat proses pendidikan.
- 3. Alat bantu lihat dan dengar Merupakan gabungan kedua alat bantu di atas baik lihat maupun dengar.

Pembagian alat peraga/media promosi kesehatan

- 1. Alat peraga *complicated*Yaitu alat peraga dalam penggunaannya memerlukan listrik dan proyektor. Contoh: film, film strip dan slide
- 2. Alat peraga simple
 Contohnya leaflet, model buku bergambar, benda nyata,
 poster, spanduk, flannel graph dan boneka wayang.
- 3. Media cetak
 - a. *Booklet*, yaitu media untuk menyampaikan pesan kesehatan dalam bentuk buku (gambar/tulisan)
 - b. *Leaflet*, yaitu bentuk penyampaian informasi/pesan kesehatan melalui lembar lipat
 - c. *Flyer*, yaitu selebaran bentuk seperti leaflet, tapi tidak lipat
 - d. Flift chart (lembar balik)
 - e. Rublik/tulisan pada surat kabar
 - f. Poster, yaitu bentuk media cetak yang berisi pesan informasi kesehatan yang biasa ditempel ditembok, atau tempat umum

- g. Foto, yang membuat informasi kesehatan.
- 4. Media Elektronik
 - Contoh: televisi, radio, video, slide dan film strip
- 5. Media papan (*bill board*), yaitu media luar ruang yang dipasang sehingga dapat menyita perhatian khalayak sasaran. Sifat media ini permanen dan dapat menyentuh alam perasaan atau emosi. Karakteristiknya:
 - a. Jangkauan: kemampuan media menjangkau target audience
 - b. Frekuensi: kemampuan media untuk mengulang pesan iklan yang lama terhadap khalayak sasaran saat mulai dilupakan
 - c. Kontinuitas: kesinambungan media menyampaikan pesan iklan sesuai dengan tuntutan
 - d. Memiliki jangkauan lokal, *audience* beragam, frekuensi tinggi dan waktu baca singkat
 - e. Member peluang dan memungkinkan penggarapan grafis yang memikat
 - f. Sangat efektif dipakai sebagai reminder untuk menjaga dan memelihara image serta reputasi yang baik di mata sasaran.
- 6. Media internet, yaitu contohnya media social (facebook, Tweet, Line dan lain-lain), Web, Blog, dan lain-lain. Media yang memiliki jangkauan sangat luas (Regional-Internasional). Web Site memiliki karakteristik:
 - a. Mengandung muatan informasi yang besar, paling atraktif, menghibur dan edukatif dalam system komunikasi massa.
 - b. Dapat menerobos batasan tempat dan waktu dalam memberikan informasinya
 - c. Kaya akan tampilan grafis sehingga sangat terjangkau sebagai sarana berpromosi
 - d. Media interaktif yang dapat menggabungkan seluruh media informasi, meliputi: audio visual, animasi, image dan teks.

Himbauan dalam pesan kesehatan (7):

a. Himbauan rasional

- b. Himbauan emosional
- c. Himbauan ketakutan
- d. Himbauan ganjaran
- e. Himbauan motivasional

G. Pembuatan Film/Iklan dan Alat Bantu Promosi Kesehatan

Dalam pembuatan film ada 3 tahap, yaitu (6):

1. Pra produksi (planning, scripting)

Menentukan jenis film yang akan dibuat sesuai keperluannya.

- a. Film documenter
- b. Film docudrama (semi documenter)
- c. Film cerita pendek
- d. Film cerita panjang
- e. Profil perusahaan
- f. Iklan televise
- g. Program televise
- h. Video klip

Penulisan sebuah naskah program video dan televisi yang didasarkan pada sebuah ide biasanya mempunyai tujuan yang spesifik yaitu: member informasi (to inform), member inspirasi (to inspire), menghibur (to entertain) dan propaganda.

Skenario/naskah

Skenario adalah lakon sandiwara/film berupa adegan demi adegan yang tertulis. Di dalam skenario terdapat, yaitu ada pemeran/tokoh, ada gambaran tempat terjadinya cerita dan ada masalah yang dipecahkan/dibicarakan atau tema (5).

Langkah membuat skenario film:

a. Ide cerita

Film itu sebuah cerita bergambar dan bersuara. Karena sebuah cerita, jadi kamu harus punya cerita yang dianggap menarik untuk difilmkan. Darimana datangnya ide? Ide banyak. Ada dimana-mana. Tinggal kamu buka lebar-lebar semua indera kamu. Kamu bakal mendengar, merasa, melihat, mengecap dan mencium ide.

b. Siapkan sinopsisnya

Sekalipun film dan cerpen atau novel sama-sama sebuah cerita, tetapi ada perbedaan. Perbedaannya pada medium digunakan. Seperti disebutkan di menggunakan medium gambar dan suara. Sedangkan cerpen dan novel menggunaka teks. Sementara synopsis sendiri memiliki narti penting dalam pembuatan skenario, yaitu sebagai pijakan. Kita akan kesusahan bikin skenario bila kita tidak tahu synopsis ceritanya. Akan sama sulitnya kita akan bikin synopsis bila tidak puny aide cerita. Bila yang kamu bikin bukan film lepas (FTV/layar lebar), melainkan sinetron, maka selain menyiapkan synopsis global, kamu juga harus meviapkan synopsis per episode yang tentu saja lebih detail disbanding dengan synopsis global.

c. Bikin Logline/Premis

Logline/premis bertujuan untuk memperjelas film apa yang di buat. Logline sejenis iklan. Logline yang bagus akan menarik orang untuk menonton film yang kita buat. Agar mudah membuat logline, Richard Krevolin memberikan pola kalimat sebagai berikut: bagaimana jika...dan kemudian...

Contoh: bagaimana jika orang yang kamu siksa adalah orang yang akan menolong kamu dan kamu tidak tahu. Kalimatnya dibikin sederhana menjadi: yang kamu siksa adalah penolongmu yang tidak kamu ketahui. Lebih jelas tentang logline, bias melihat kaver-kaver film. Di sana ada kalimat-kalimat yang menarik. Itulah logline atau premis.

d. Treatment

Treatment ini pembabakan. Sebuah film umumnya tiga babak. Synopsis itu harus dipecah ke dalam tiga babak ini. Babak pertama sebagai pengenalan setting, tokoh dan awal masalahnya. Babak kedua sebagai bagian berkecamuknya masalah. Babak ketiga sebagai penyelesaiannya. Yang tiga babak ini disebut dengan struktur tiga babak (three acts structure). Ada juga yang disebut struktur sembilan babak (nine acts structure), sebagai pengembangan dari yang tiga babak. Yang Sembilan babak ini terdiri dari:

1) Babak 1: kejadian buruk menimpa orang lain

- 2) Babak 2: pengenalan tokoh utama (protagonist)
- 3) Babak 3: kejadian buruk menimpa protagonist, atau terlibat/dilibatkan kepada masalah orang lain pada babak 1
- 4) Babak 4: protagonist dan antagonis
- 5) Babak 5: protagonist berusaha keluar dari masalah
- 6) Babak 6: protagonist salah mengambil jalan
- 7) Babak 7: protagonist mendapat pertolongan
- 8) Babak 8: protagonist berusaha keluar dari masalah lagi
- 9) Babak 9: protagonist dan antagons berperang, menyelesaikan masalahnya.

e. Outline Scene/Scene Plot

Sekarang saatnya membuat outline scene/scene plot. Outline scene/scene plot adalah rencana peristiwa-peristiwa yang akan diambil (dishoot). Pembuatan outline scene/scene plot akan mempermudah pembuatan skenario. Contoh:

- 1) Lisa pamit kepada orangtuanya untuk pergi ke Jakarta
- 2) Arman, pacar Lisa, sedang menyiapkan rencana menculik Lisa
- 3) Skenario final diserahkan kepada sutradara, lalu sutradara menentukan treatment untuk masing scene, skenario dibedah, ditentukan lokasi, talent, set property, wardrobe, make up dengan memperhatikan kontinuitas cerita.
- 4) Mencari lokasi dan property, mendapatkan kepasttian waktu lokasi dan property tersebut bias dipakai.
- 5) Recruitment crew yang diperlukan untuk syuting, walau crew yang dipilih sudah berpengalaman, breakdown peralatan (listing) dan technical meeting harus tetap dilakukan hingga seluruh crew dinyatakan solid dan peralatan dinyatakan komplit
- 6) Durasi pengambilan gambar harus sudah dihitung secara matang dengan membuat antisipasi terhadap kendala yang mungkin dihadapi
- 7) Pembuatan storyboard Tahap pra produksi, tahap ini merupakan tahapan yang paling penting dalam produksi film. Dalam tahap ini,

disususn strategi untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bias terjadi pada tahap kegiatan produksi. Semuanya perlu dicatat secara akurat, agar proses pengambilan gambar dapat selesai tepat pada waktunya.

8) Biaya produksi

Membuat rancangan anggaran, mengenal dengan baik semua elemen yang terdapat dalam produksi film, melakukan riset untuk menghasilkan rancangan anggaran yang efektif serta mencari dana untuk pembuatan film.

2. Produksi (taking)

Tahap produksi adalah tahap pengambilan gambar, sebagaimana yang telah direncanakan dalam tahap pra produksi.

3. Paska produksi

Tahap paska produksi, pada tahap ini film disunting, agar gambar-gambar sesuai, tepat dengan jalan cerita dan skenario. Setelah selesai disunting lalu dikirim ke laboratorium kemudian diduplikasi.

H. Pembuatan Media Cetak

Dalam perancangan media cetak ada 6 hal yang harus diketahui, konsep dan strategi promosi dalam proses perancangan karya desain grafis/media cetak. Konsep perancangan grafis/media cetak meliputi 4W dan 2H (7):

- 1. What (positioning), apa yang ditawarkan dari pesan yang diiklankan/disampaikan, atau ingin dijual sebagai apa.
- 2. *Who* (segmen konsumen), siapa yang cocok dijadikan sasaran pasar dilihat dari segi demografi dan psikografi
- 3. *How* (kreativitas), bagaimana membujuk sasaran khalayak agar tertarik, menyukai dan loyal
- 4. *Where* (media dan kegiatan), dimana saja daerah atau pasar yang perlu digarap serta media dan kegiatan apa yang cocok untuk daerah pasar tersebut
- 5. *When* (penjadwalan), kapan kegiatan tersebut dilaksanakan dan akan memerlukan waktu berapa lama

6. *How much* (anggaran), seberapa jauh intensitas kampanye atau berapa banyak dana yang tersedia untuk membiayai periklanan/kampanye tersebut.

Tuntutan seorang perancang media cetak yang paling utama adalah memiliki kemampuan mengidentifikasi, merancang, hingga akhirnya memilih symbol atau tanda yang sesuai dengan konteksnya. Ada kemiripan antara bahasa verbal (tulisan/teks) dengan bahasa visual. Pada pesan verbal menggunakan bahasa terdapat simbol-simbol bunyi sehingga menghasilkan makna. Hal yang sama terdapat desain visual, yang disebutnya sebagai unsur-unsur desain perancangan media cetak.

- 1. Titik (point), titik adalah elemen structural terkecil dalam desain, baik yang imajiner (khayal) ataupun nyata
- 2. Garis (*line*), sebuah garis adalah unsure desain yang menghubungkan antara satu titik point dengan titik point yang lain sehingga bias berbentu gambar garis lengkung (*curve*) atau lurus (*straight*). Garis adalah unsur dasar untuk membangun bentuk atau konstruksi desain.
- 3. Bentuk (*shape*), garis-garis bila ditata sedemikian rupa akan menghasilkan sebuah bentuk, baik bentuk alamiah (gambaran tentang benda-benda) ataupun bentuk geometris seperti persegi panjang, bujur sangkar, trapezium, piramida, lingkaran, elips, segitiga dan sebagainya. Bentuk pun ada yang beraturan dan adapula yang tidak beraturan.
- 4. Warna (colour), warna merupakan unsure penting dalam objek desain. Karena dengan warna orang bias menampilkan identitas, menyampaikan pesan atau membedakan sifat dari bentuk-bentuk visual secara jelas, serta warna mempunyai efek psikologis bagi seseorang. Kemampuan warna menciptakan impresi, mampu menimbulkan efek-efek tertentu. Warna itu mempengaruhi kelakuan, memegang peranan penting dalam penilaian estetis dan turut menentukan suka tidaknya kita akan bermacam-macam benda (desain).
- 5. Ruang (*space*), ruang merupakan arak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya yang pada praktek desain dapat dijadikan unsur untuk memberi efek estetika desain.

- 6. Tekstur (*textures*), tekstur adalah tampilan permukaan (corak) dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, misalnya permukaan karpet, baju, kulit kayu dan lain sebagainya.
- 7. Ukuran (*size*), ukuran adalah unsur lain dalam desain yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Dengan menggunakan unsure ini anda dapat menciptakan kontras dan penekanan (emphasis) pada objek desain anda sehingga orang akan tahu mana yang akan dilihat atau dibaca terlebih dahulu.
- 8. Huruf/typografi (font), typografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia, untuk menciptakan kesan tertentu, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. 5 dasar jenis huruf yang harus diketahui oleh perancang media cetak, yakni:
 - a. Serif, ciri dari huruf ini adalah memiliki sirip/kaki/serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Huruf serif memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah gemulai dan feminine.
 - b. Egyptian, adalah jenis huruf yang memeiliki kaki/sirip/serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hamper sama. Kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekara dan stabil.
 - c. Sans serif, cirri dari huruf ini adalah tanpa sirip/serif, jadi huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hamper sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer dan efisien.
 - d. *Script*, hurup *script* menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkannya adalah sifat pribadi dan akrab

e. *Miscellaneous/decorative*, huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Ditambah hiasan dan ornament, atau garis-garis dekoratif. Kesan yang dimiliki aadalah dekoratif dan ornamental.

Prinsip-prinsip yang harus diketahui dan dipahami oleh perancang media cetak kesehatan adalah (8):

- a. Kesederhanaan: banyak pakar desain grafis menyarankan prinsip ini dalam pekerjaan desain. Hal ini sangat logis demi kepentingan kemudahan pembaca memahami isi pesan yang disampaikan. Dalam penggunaan huruf sebuah berita misalnya huruf judul (headline), sub judul dan tubuh berita (body text) sebaiknya jangan menggunakan jenis font yang ornamental dan rumit, seperti hurup black letter yang sulit dibaca. Desainer grafis lazim juga menyebut prinsip ini sebagai KISS (Keep It Simple Stupid). Prinsip ini bias diterapkan dengan penggunaan elemen ruang kosong (white space) dan tidak menggunakan terlalu banyak unsure-unsur aksesoris.
- b. Keseimbangan, keseimbangan adalah keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual. Prinsip keseimbangan ada dua, yaitu: keseimbangan formal (simetris) dan keseimbangan informal. Keseimbangan formal memberikan kesan sempurna, resmi, kokoh, yakin dan bergengsi.
- c. Penekanan (aksentuasi), penekanan dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca, sehingga ia mau melihat dan membaca bagian desain yang dimaksud. Kalau dalam konteks desain surat kabar ini bias dilakukan dengan memberikan kotak raster atas sebuah berita. Hal ini akan mengesankan pentingnya berita itu untuk dibaca oleh pembaca. Atau juga membesarkan ukuran huruf pada judul berita, sehingga terlihat jauh berbeda dengan berita laiinnya. Penekanan juga dilakukan melalui perulangan ukuran, serta kontras antara tekstur, nada warna, garis, ruang, bentuk atau motif.
- d. Irama (*rhytm*), irama member kesan keindahan dan gerakan. Misal melalui pengulangan yang teratur dari beberapa pola rancangan seperti: warna, bentuk, garis, nada dan variasi

- huruf. Irama dapat pula ditempuh dengan garis irama, misalnya dengan membuat anak panah yang membawa pandangan ke ujung anak panah.
- e. Kesatuan (*unity*), unsure-unsur tata letak yang terpisah satu sama lain, selain terkesan tidak menarik juga secara fungsional tidak memberikan petunjuk pesan komunikasi yang jelas. Unsure-unsur desain harus ada hubungannya satu sama lain dan dengan keseluruhan rancangan sehingga memberikan kesan menjadi kesatuan yang utuh (*unity*).

I. Pembuatan Desain Grafis

- 1. Tahapan membuat desain grafis
 - a. Pengumpulan informasi
 - b. Analisis
 - c. Menyusun tujuan
 - d. Pendekatan
 - e. Evaluasi
 - f. Penyempurnaan
 - g. Implementasi
- 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan desain
 - a. Klien: komunikator?
 - b. Audiens: komunikan?
 - c. Pesan?
 - d. Feed back: hasil yang ingin dicapai?
 - e. Reaksi: motivasi audiens?
 - f. Lingkungan audiens?
 - g. Behavioral: tujuan akhir?
- 3. Dalam penyusunan visualisasi sesuaikan dengan elemenelemen berikut:
 - а. Туре
 - b. Image
 - c. Layout
 - d. Struktur
 - e. Paper
 - f. Ukuran
 - g. Style
 - h. Finishing

- 4. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat leaflet
 - a. Tentukan kelompok sasaran yang ingin dicapai
 - b. Tuliskan apa tujuannya
 - c. Tentukan isi singkat hal-hal yang mau ditulis dalam leaflet
 - d. Kumpulkan tentang subjek yang akan disampaikan
 - e. Buat garis-garis besar cara penyajian pesan, termasuk didalamnya bagaimana bentuk tulisan gambar serta tata letaknya
 - f. Buatkan konsepnya, konsep dites terlebih dahulu pada kelompok sasaran yang hamper sama dengan kelompok sasaran
 - g. Perbaiki konsep dan buat ilustrasi yang sesuai dengan isi
- 5. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan
 - a. Dibuat dalam tata letak yang menarik, missal besarnya huruf, gambar warna yang mencolok
 - b. Dapat dibaca (eye cacher) orang yang lewat
 - c. Kata-kata tidak lebih dari 2 kata
 - d. Menggunakan kata yang provokatif, sehingga menarik perhatian
 - e. Dapat dibaca dari jarak 6 meter
 - f. Harus dapat menggugah emosi, missal dengan menggunakan factor IRI, BANGGA dan lain-lain.
 - g. Ukuran yang besar (50x70) cm, kecil (35x50) cm
 - h. Buat dalam warna yang kontras sehingga jelas terbaca. Kombinasi warna yang tidak bertabrakan adalah: biru tua-merah, hitam-kuning, merah-kuning, biru tua-biru muda
 - i. Hindarkan embel-embel yang tidak perlu
 - j. Gambar dapat sederhana
 - k. Perhatikan jarak huruf, bentuk dan ukuran
 - 1. Test/uji poster pada teman, apa poster bias mencapai maksudnya atau tidak (2).

J. Pengembangan Media Promosi Kesehatan

Media promosi kesehatan yang baik adalah media yang mampu memberikan informasi atau pesan-pesan kesehatan yang

sesuai dengan tingkat penerimaan sasaran, sehingga sasaran mau dan mampu untuk mengubah perilaku sesuai dengan pesan yang disampaikan (3).

Untuk hal itu diperlukan langkah-langkah pengembangan media promosi kesehatan yang tepat. Pengembangan media promosi kesehatan dapat dilakukan dengan pendekatan proses P. Proses P ini diperkenalkan oleh Universitas John Hopkins bersama-sama PATH (*Program for Approriate Technology in Health*) sewaktu melaksanakan proyek PCS (*Population Communication Services*). Adapun tahap-tahap Proses P dalam pengembangan media promosi kesehatan yaitu (1):

- 1. Tahap analisis masalah dan sasaran Pada tahap ini dilakukan penelaahan analisis:
- a. Masalah Kesehatan, termasuk penyebab masalahnya, sifat masalah, epidemiologi masalah termasuk masalah perilaku yang ada di masyarakat sehubungan dengan masalah kesehatan yang ditimbulkan.
- b. Kelompok sasaran, dalam hal demografi, sosial-ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat seperti umur, pendidikan, budaya dan adat-istiadat, pendapatan, serta pengembangan sikap dan perilaku yang berhubungan dengan masalah kesehatan.
- c. Kebijaksanaan-kebijaksanaan, peraturan dan program penanggulangan yang telah ada dari berbagai instansi sektoral untuk mengetahui pengalaman yang lalu, harapan di masa yang akan datang. Di sini dapat dipelajari arahanarahan dan dalam membuat suatu program kegiatan KIE, masing-masing sektor. Apakah masalah sosial, kesehatan, ekonomi, demografi atau bahkan politik. Dan melihat program serta pendukung-pendukung apa saja yang telah tersedia.
- d. Memilih institusi, organisasi atau LSM yang mampu mendukung program. Dilihat kemampuan internal dan eksternal dari organisasi tersebut.
- e. Sasaran komunikasi yang tersedia, untuk menetapkan media dan sarana yang tersedia dan yang telah dilaksanakan, yang mempengaruhi perilaku masyarakat seperti umur,

pendidikan, budaya dan adat istiadat, pendapatan serta pengembangan sikap dan perilaku yang berhubungan dengan masalah kesehatan.

2. Tahap Rancangan Pengembangan Media.

Pada tahap ini dirancang atau direncanakan berbagai strategi dan model intervensi yang menjelaskan beberapa komponen utama, yaitu:

a. Menetapkan tujuan

Tujuannya adalah suatu pernyataan tentang suatu keadaan di masa datang yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan tertentu. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan harus:

- 1) Realistis, artinya bisa dicapai bukan hanya angan-angan.
- 2) Jelas dan dapat diukur.
- 3) Apa yang akan diukur.
- 4) Siapa sasaran yang akan diukur.
- 5) Seberapa banyak perubahan yang akan diukur.
- 6) Berapa lama dan di mana pengukuran dilakukan.

Penetapan tujuan adalah sebagai dasar untuk merancang media promosi kesehatan dan dalam merancang evaluasi. Jika tujuan yang ditetapkan tidak jelas dan tidak operasional maka program menjadi tidak fokus dan tidak efektif.

b. Menetapkan segmentasi sasaran

sasaran Segmentasi adalah suatu kegiatan kelompok sasaran yang tepat dan dianggap sangat menentukan keberhasilan promosi kesehatan. Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan memberikan kepuasan pada Dapat juga masing-masing segmen. untuk menentukan ketersediaan, jumlah dan jangkauan produk. Selain itu juga dapat menghitung jenis media dan menempatkan media yang mudah diakses oleh khalayak sasaran. Sebelum media promosi kesehatan diluncurkan hendaknya perlu mengumpulkan data sasaran seperti:

- 1) Data karakteristik perilaku khalayak sasaran.
- 2) Data epidemiologi.
- 3) Data demografi.
- 4) Data geografi.
- 5) Data psikologi.

c. Mengembangkan posisioning pesan.

Posisioning adalah suatu proses atau upaya untuk menempatkan suatu produk perusahaan, individu atau apa saja dalam alam pikiran mereka yang dianggap sebagai sasaran atau konsumennya. Posisioning bukan sesuatu yang dilakukan terhadap produk tetapi sesuatu yang dilakukan terhadap otak calon konsumen atau khalayak sasaran. Hal ini bukan strategi produk tetapi strategi komunikasi. Di sini berhubungan dengan bagaimana calon konsumen menempatkan produk kesehatan di dalam otaknya.

d. Menentukan strategi posisioning.

Pada prinsipnya seseorang yang ingin melakukan kegiatan posisioning memerlukan suatu ketekunan dan kejernihan berpikir dalam memandang produk dan pasar yang tengah diusahakan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan:

- 1) Identifikasi para pesaing Tujuannya adalah melakukan identifikasi atas sejumlah pesaing yang ada di masyarakat.
- 2) Persepsi konsumen Tujuannya adalah memperoleh sejumlah atribut yang dianggap penting oleh khalayak sasaran.
- 3) Menentukan posisi pesaing Mengetahui posisi yang diduduki oleh pesaing dilihat dari berbagai sudut pandang.
- 4) Menganalisis preferensi khalayak sasaran Yaitu mengetahui posisi yang dikehendaki oleh khalayak sasaran terhadap suatu produk tertentu.
- 5) Menentukan posisi merek produk sendiri Penentuan posisi merek yang akan kita jual harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: analisis ekonomi, komitmen terhadap segmen pasar, jangan mengadakan perubahan yang penting, pertimbangkan simbol-simbol produk.
- 6) Ikuti perkembangan posisi Secara bersekala posisi produk harus ditinjau dan dinilai kembali apakah masih cocok dengan keadaan.
- e. Memilih Media Promosi Kesehatan

Pemilihan media adalah jabaran saluran yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan pada khalayak sasaran. Yang perlu diperhatikan di sini adalah:

- 1) Pemilihan media didasarkan pada selera khalayak sasaran, bukan pada selera pengelola program.
- 2) Media yang dipilih harus memberikan dampak yang luas.
- 3) Setiap media akan mempunyai peranan yang berbeda.
- 4) Penggunaan beberapa media secara serempak dan terpadu akan meningkatkan cakupan, frekuensi dan efektifitas pesan.
- 3. Tahap pengembangan pesan, uji coba dan produksi media

Pesan adalah terjemahan dari tujuan komunikasi ke dalam ungkapan atau kata yang sesuai untuk khalayak sasaran. Pesan dalam suatu media harus efektif dan kreatif, untuk itu pesan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Command Attention
 - Kembangkan suatu ide atau pesan pokok yang merefleksikan strategi desain suatu pesan. Bila terlalu banyak ide, hal tersebut akan membingungkan khayalayak sasaran dan mereka akan mudah melupakan pesan tersebut.
- b. Clarify The Massage

Pesan haruslah mudah, sederhana dan jelas. Pesan yang effektif harus memberikan informasi yang relevan dan baru bagi khalayak sasaran. Kalau pesan dalam media diremehkan oleh sasaran, secara otomatis pesan tersebut gagal.

c. Create Trust

Pesan harus dapat dipercaya, tidak bohong, dan terjangkau. Katakanlah masyarakat percaya cuci tangan pakai sabun dapat mencegah penyakit diare, dan untuk itu harus dibarengi bahwa harga sabun terjangkau dan mudah didapat di dekat tempat tinggalnya.

d. Communicate A Benefit

Hasil pesan diharapkan akan memberikan keuntungan. Khalayak sasaran termotivasi membuat jamban misalnya, karena mereka akan memperoleh keuntungan dimana anaknya tidak akan terkena penyakit diare misalnya.

e. Consistency

Pesan harus konsisten, artinya bahwa sampaikan satu pesan utama dimedia apapaun secara berulang, misal di poster, stiker, dll, tetapi maknanya akan tetap sama.

f. Cater To The Heart And Head

Pesan dalam suatu media harus bisa menyentuh akal dan rasa. Komunikasi yang effektif tidak hanya sekedar member alas an teknis semata, tetapi juga harus menyentuh nilai-nilai emosi dan membangkitkan kebutuhan nyata.

g. Call To Action

Pesan dalam suatu media harus dapat mendorong khalayak sasaran untuk bertindak sesuatu. "Ayo, buang air besar di jamban agar anak tetap sehat" adalah contoh ungkapan yang memotivasi kearah suatu tindakan (6).

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan pesan adalah:

- a. Membuat konsep pesan-pesan yang berisikan ilustrasi-ilustrasi pendahuluan, kata-kata ungkapan, tema atau slogan yang merefleksikan strategi secara keseluruhan.
- b. Prates konsep pesan pada kelompok sasaran atau wakil-wakil perorangan yang diharapkan akan menghasilkan pesan yang bermutu. Memberikan perhatian khusus untuk gambar atau ilustrasi (bentuk yang tidak tertulis) untuk menghindari salah paham.
- c. Ciptakan dan kembangkan pesan-pesan yang lengkap beserta sarana pendukungnya
- d. Prates pesan yang lengkap dan bahan-bahan untuk pemahaman keseluruhan, kemampuan mengingat, titik yang kuat dan lemah, relevansi pribadi dan hal-hal peka atau masih diperdebatkan, sebelum diproduksi.
- e. Adanya tes ulang bahan-bahan sebelum diproduksi ulang untuk meyakinkan daya muat apakah masih efisien dan effektif (3).
 - 4. Tahap Pelaksanaan dan pemantauan

Pelaksanaan adalah tahap dimana perencanaan mulai dilaksanakan. Pelaksanaan biasanya merupakan bagian yang paling membutuhkan biaya yang dimulai dari pengembangan

konsep sampai prates dan revisi. Langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan pesan dan bahan berdasarkan hasil uji coba
- b. Pesan-pesan dan bahan-bahan secara terintegrasi dan sesuai jadwal melalui media yang tepat sehingga mendapat pengaruh yang nyata.
- c. Melatih kader maupun orang yang akan menggunakan media tersebut.
- d. Sebarkan secara luas jadwal pelaksanaan dan laporan sehingga tidak ada seorangpun key person atau kelompok yang tidak mengetahuinya.

Pemantauan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penerapan program promosi kesehatan. Pemantauan dilakukan untuk mengukur kondisi saat ini dan perubahan yang terjadi pada setiap komponen program. Pada tingkat program, pemantauan mengukur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan variabel-variabel pada tingkat program yaitu (4):

a. Input promosi kesehatan

Input promosi kesehatan seperti: kategori dan jumlah tenaga kesehatan yang sudah mendapat pelatihan promosi kesehatan, jumlah media cetak dan alat bantu audio visual yang dihasilkan serta kesesuaian pendistribusian media cetak dengan rencana dan jumlah program TV, radio yang dihasilkan.

b. Output promosi kesehatan

Target sasaran yang menerima/terpapar dengan pesanpesan dan bahan-bahan promosi yang dihasilkan, misalnya persentase target sasaran yang mendengar radio tentang pemeriksaan kehamilan selama 3 bulan penyiarannya.

5. Tahap evaluasi dan rancang ulang

Evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai atau besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi menyediakan informasi bagi manager program terhadap hasil/output dan dampak kegiatan untuk membuat perubahan-perubahan yang diperlukan. Evaluasi mengukur dampak kegiatan dari segi sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dapat dilihat dari perubahan

pengetahuan, sikap, dan perilaku yang menetap dari sasaran potensial, provider, dan kelompok-kelompok berpengaruh lainnya. Langkah-langkah evaluasi yang dilakukan (8):

- a. Mengukur dan menelusuri kepedulian umum, daya ingat atau praktik perilaku dari khalayak sasaran dengan menggunakan teknik penelitian yang dapat diterima, untuk menghasilkan umpan balik yang cepat.
- b. Analisis hasil sesuai dengan tujuan spesifik
- c. Melakukan perubahan pada rancangan proyek bila diperlukan.

Ada dua pendekatan pokok dalam evaluasi program yaitu:

a. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif ini membantu pengembangan program pada saat program tersebut masih dalam tahap pengembangan, untuk dipergunakan sebagai dasar mengembangkan program. Maksud mengadakan evaluasi adalah untuk memaksimalkan kemungkinan intervensi akan berhasil.

Evaluasi formatif mencakup: penjajagan target sasaran dan penjajagan mengenai pengetahuan, keterampilan, sikap, kepercayaan dan perilaku. Sedangkan bentuk evaluasi formatif bisa bermacam-macam misalnya: analisis data epidemiologis, tinjauan kepustakaan, analisis data demografis, FGD, analisis data marketing, ujicoba konsep, pesan dan saluran komunikasi dengan konsumen.

b. Evaluasi Sumatif Evaluasi sumatif digunakan untuk menilai berjalannya suatu program promosi kesehatan.

Referensi

- 1. Anonim. Bagaimana Membuat Media Promosi Kesehatan. http://www.pamsimas.org. 2009. Diakses pada tanggal 23 Maret 2010.
- 2. Notoatmodjo, S. 2005. Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi. Rineka Cipta, Jakarta.

- 3. Departemen Kesehatan RI, 2006. Modul: Promosi Kesehatan untuk Politeknik/D3 Kesehatan. Pusat Promosi Kesehatan Depkes RI, Jakarta.
- 4. Departemen Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan, Pengembangan Media Promosi Kesehatan, Jakarta 2004
- 5. Anonim. 2009. Metode dan Media Promosi Kesehatan. http://www.pamsimas.org. Diakses pada tanggal 23 Maret 2010.
- 6. Notoatmodjo, S. 2007. Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku. Rineka Cipta, Jakarta.
- 7. Departemen Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan, Pedoman Pengelolaan Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian PHBS, Jakarta 2008
- 8. Departemen Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan, Pedoman Pengelolaan Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian PHBS, Jakarta 2008

BAB VI TEKNIK PERSIAPAN SOSIAL DAN PENDEKATAN DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN SOSIAL

Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami apa yag dinamakan dengan perubahan-perubahan. Adanya perubahan-perubahan tersebut akan dapat diketahui bila kita melakukan suatu perbandingan dengan menelaah suatu masyarakat pada masa tertentu yang kemudian dibandingkan dengan keadaan masyarakat pada masa lampau (1).

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, pada intinya merupakan suatu proses yang terjadi terus menerus, ini arinya bahwa masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan-perubahan. Tetapi perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain tidaklah sama (2).

A. Persiapan Sosial

Tujuan persiapan sosial adalah mengajak partisipasi atau peran serta masyarakat sejak awal kegiatan, selanjutnya sampai dengan perencanaan program, pelaksanaan hingga pengembangan program kesehatan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan dalam persiapan sosial ini lebih ditekankan kepada persiapan-persiapan yang harus dilakukan baik aspek teknis, administratif dan program-program kesehatan yang akan dilakukan (3).

1. Tahap Pengenalan Masyarakat

Dalam tahap awal ini kita harus datang ke tengah-tengah masyarakat dengan hati yang terbuka dan kemauan untuk mengenal masyarakat sebagaimana adanya, tanpa disertai prasangka sambil menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahap ini dapat dilakukan baik melalui Jalur Formal yaitu dengan melalui sistem pemerintahan setempat seperti Pamong Desa atau Camat, dan dapat juga dilakukan melalui Jalur Informal misalnya wawancara dengan To-Ma, seperti Guru, Pemuka Agama, tokoh Pemuda,dll.

2. Tahap Pengenalan Masalah

Dalam tahap ini dituntut suatu kemampuan untuk dapat mengenal masalah-masalah yang memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mengenal masalah kesehatan masyarakat secara menyeluruh tersebut, diperlukan interaksi dan interelasi dengan masyarakat setempat secara mendalam.

Dalam tahap ini mungkin akan banyak ditemukan masalah-masalah kesehatan masyarakat, oleh karena itu harus disusun skala prioritas penanggulangan masalah. Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk menyusun prioritas masalah adalah (4):

- a. Beratnya masalah yang perlu dipertimbangkan di dini adalah Seberapa jauh masalah tersebut menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.
- b. Mudahnya mengatasi yang diperhatikan adalah kemudahannya dalam menanggulangi masalah tersebut.
- c. Pentingnya masalah bagi masyarakat yang paling berperan di sini adalah subyektifitas masyarakat sendiri dan sangat dipengaruhi oleh kultur – budaya setempat
- d. Banyaknya masyarakat yang merasakan masalah misalnya perbaikan gizi, akan lebih mudah dilaksanakan di wilayah yang banyak balitanya.

3. Tahap Penyadaran Masyarakat

Tujuan tahap ini adalah menyadarkan masyarakat agar mereka:

- a. Menyadari masalah-masalah kesehatan yang mereka hadapi
- b. Secara sadar berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan masalah kesehatan yang dihadapi,
- c. Tahu cara memenuhi kebutuhan akan upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada.

Agar masyarakat dapat menyadari masalah dan kebutuhan mereka akan pelayanan kesehatan, diperlukan suatu mekanisme yang terencana dan terorganisasi dengan baik, untuk itu beberapa

kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka menyadarkan masyarakat adalah :

- 1. Lokakarya Mini Kesehatan,
- 2. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
- 3. Rembuk Desa (5).

B. Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh para anggota sistem sosial yang bersangkutan. Proses perubahan sosial biasa tediri dari tiga tahap (6).

- 1. Invensi, yakni proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan
- 2. Difusi, yakni proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial.
- 3. Konsekuensi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat.

Dalam menghadapi perubahan sosial budaya tentu masalah utama yang perlu diselesaikan ialah pembatasan pengertian atau definisi perubahan sosial itu sendiri. Ahli-ahli sosiologi dan antropologi telah banyak membicarakannya (7).

Tindakan sosial atau aksi sosial (social action) tidak bisa dipisahkan dari proses berpikir rasional dan tujuan yang akan dicapai oleh pelaku. Tindakan sosial dapat dipisahkan menjadi empat macam tindakan menurut motifnya: (1) tindakan untuk mencapai satu tujuan tertentu, (2) tindakan berdasar atas adanya satu nilai tertentu, (3) tindakan emosional, serta (4) tindakan yang didasarkan pada adat kebiasaan (tradisi).

Aksi sosial adalah aksi yang langsung menyangkut kepentingan sosial dan langsung datangnya dari masyarakat atau suatu organisasi, seperti aksi menuntut kenaikan upah atau gaji, menuntut perbaikan gizi dan kesehatan, dan lain-lain. Aksi sosial adalah aksi yang ringan syarat-syarat yang diperlukannya dibandingkan dengan aksi politik, maka aksi sosial lebih mudah

digerakkan daripada aksi politik. Aksi sosial sangat penting bagi permulaan dan persiapan aksi politik. Dari aksi sosial, massa/demonstran bisa dibawa dan ditingkatkan ke aksi politik. Aksi sosial adalah alat untuk mendidik dan melatih keberanian rakyat. Keberanian itu dapat digunakan untuk: mengembangkan kekuatan aksi, menguji barisan aksi, mengukur kekuatan aksi dan kekuatan lawan serta untuk meningkatkan menjadi aksi politik (2). Aksi sosial merupakan bagian dari pekerjaan sosial yang memiliki komitmen untuk menjadi agen atau sumber bagi mereka yang berjuang menghadapi beragam masalah untuk memerlukan berbagai kebutuhan hidup.

Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses. Perubahan sosial merupakan sebuah keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat. Konsep dinamika kelompok menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk memahami perubahan sosial. Perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan melemahkan resistences to change (7).

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan, yaitu: (1) *Unfreezing*, merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya, atau adanya kebutuhan untuk berubah, (2) *Changing*, merupakan langkah tindakan, baik memperkuat *driving forces* maupunmemperlemah *resistences*, dan (3) *Refreesing*, membawa kembali kelompok kepada keseimbangan yang baru (a new dynamic equilibrium). Pada dasarnya perilaku manusia lebih banyak dapat dipahami dengan melihat struktur tempat perilaku tersebut terjadi daripada melihat kepribadian individu yang melakukannya. Sifat struktural seperti sentralisasi, formalisasi dan stratifikasi jauh lebih erat hubungannya dengan perubahan dibandingkan kombinasi kepribadian tertentu di dalam organisasi (7).

Lippit (1958) mencoba mengembangkan teori yang disampaikan oleh Lewin dan menjabarkannya dalam tahap-tahap

yang harus dilalui dalam perubahan berencana. Terdapat lima tahap perubahan yang disampaikan olehnya, tiga tahap merupakan ide dasar dari Lewin. Walaupun menyampaikan lima tahapan Tahap-tahap perubahan adalah sebagai berikut: (1) tahap inisiasi keinginan untuk berubah, (2) penyusunan perubahan pola relasi yang ada, (3) melaksanakan perubahan, (4) perumusan dan stabilisasi perubahan, dan (5) pencapaian kondisi akhir yang dicita-citakan (7).

Konsep pokok yang disampaikan oleh Lippit diturunkan dari Lewin tentang perubahan sosial dalam mekanisme interaksional. Perubahan terjadi karena munculnya tekanantekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan melemahkan resistences to change. Peran agen perubahan menjadi sangat penting dalam memberikan kekuatan driving force (7).

Atkinson (1987) dan Brooten (1978) dalam Bobo (1994), menyatakan definisi perubahan merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna (3).

Etzioni (1973) mengungkapkan bahwa, perkembangan masyarakat seringkali dianalogikan seperti halnya proses evolusi. suatu proses perubahan yang berlangsung sangat lambat. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil penemuan ilmu biologi, yang memang telah berkembang dengan pesatnya. Peletak dasar pemikiran perubahan sosial sebagai suatu bentuk "evolusi" antara lain Herbert Spencer dan August Comte. Keduanya memiliki pandangan tentang perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dalam bentuk perkembangan yang linear menuju ke arah yang positif. Perubahan sosial menurut

pandangan mereka berjalan lambat namun menuju suatu bentuk "kesempurnaan" masyarakat (6).

Menurut Spencer dalam Alpizar (2008), suatu organisme akan bertambah sempurna apabila bertambah kompleks dan diferensiasi antar organ-organnya. Kesempurnaan organisme dicirikan oleh kompleksitas, diferensiasi dan integrasi. Perkembangan masyarakat pada dasarnya berarti pertambahan diferensiasi dan integrasi, pembagian kerja dan perubahan dari keadaan homogen menjadi heterogen. Spencer berusaha meyakinkan bahwa masyarakat tanpa diferensiasi pada tahap pra industri secara intern justru tidak stabil yang disebabkan oleh pertentangan di antara mereka sendiri. Pada masyarakat industri yang telah terdiferensiasi dengan mantap akan terjadi suatu stabilitas menuju kehidupan yang damai. Masyarakat industri ditandai dengan meningkatnya perlindungan atas hak individu, berkurangnya kekuasaan pemerintah, berakhirnya peperangan antar negara, terhapusnya batas-batas negara dan terwujudnya masyarakat global (5).

Seperti halnya Spencer, pemikiran Comte sangat dipengaruhi oleh pemikiran ilmu alam. Pemikiran Comte yang dikenal dengan aliran positivisme, memandang bahwa masyarakat harus menjalani berbagai tahap evolusi yang pada masing-masing tahap tersebut dihubungkan dengan pola pemikiran tertentu. Selanjutnya Comte menjelaskan bahwa setiap kemunculan tahap baru akan diawali dengan pertentangan antara pemikiran tradisional dan pemikiran yang bersifat progresif. Sebagaimana Spencer yang menggunakan analogi perkembangan mahkluk hidup, Comte menyatakan bahwa dengan adanya pembagian kerja, masyarakat akan menjadi semakin kompleks, terdeferiansi dan terspesialisasi (5).

Membahas tentang perubahan sosial, Comte membaginya dalam dua konsep yaitu social statics (bangunan struktural) dan social dynamics (dinamika struktural). Bangunan struktural merupakan struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu. Bahasan utamanya mengenai struktur sosial yang ada di masyarakat yang melandasi dan menunjang kestabilan masyarakat. Sedangkan dinamika struktural merupakan hal-hal

yang berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Perubahan pada bangunan struktural maupun dinamika struktural merupakan bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan (6).

Kornblum (1988) dalam Assa'di (2009), berusaha memberikan suatu pengertian tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial. Penekannya adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat (3).

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan.

Moore (2000) dalam Dankfsugiana (2008), perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan. Aksi sosial dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat, karena perubahan sosial merupakan bentuk intervensi sosial yang memberi pengaruh kepada klien atau sistem klien yang tidak terlepas dari upaya melakukan perubahan berencana. Pemberian pengaruh sebagai bentuk intervensi berupaya menciptakan suatu kondisi atau perkembangan yang ditujukan kepada seorang klien atau sistem agar termotivasi untuk bersedia berpartisipasi dalam usaha perubahan sosial (2).

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan. Sorokin (1957) dalam bobo (1994), berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan sosial tidak akan berhasil baik (3).

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan.

C. Pendekatan Pengembangan Masyarakat

Sebagai upaya dalam melakukan suatu intervensi masyarakat melalui pengembangan masyarakat, maka dibutuhkan suatu pendekatan yang dilakukan oleh community worker dalam implementasi dilapangan. Batten (1967) dalam Pimbert (1995) mengatakan terdapat dua pendekatan dalam pengembangan masyarakat (8);

1. Pendekatan Direktif (Instruktif)

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa community worker tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini peranan community worker bersifat lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari community worker. Community worker-lah yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya dan menyediakan

sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. Dengan pendekatan ini, prakarsa dan pengambilan keputusan berada ditangan masyarakat.

2. Pendekatan Nondirektif (Partisipatif)

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan untuk mereka. Pada pendekatan ini, apa vang baik community worker tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan vang baik dan buruk bagi apa masyarakat. Pemeran utama perubahan masyarakat adalah community worker lebih bersifat masvarakat itu sendiri, menggali dan mengembangkan potensi masayakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan yang berguna bagi mereka sendiri, serta mereka diberi kesempatan penuh dalam penentuan cara-cara untuk mecapai tujuan yang mereka inginkan. Tujuan dari pendekatan ini agar masyarakat memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan dirinya melalui pemikiran dan tindakan yang dirumuskan oleh mereka.

D. Kendala dalam Pengembangan Masyarakat

Watson dalam Assa'di (2009) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan (pembangunan). Kendala tersebut adalah (6):

1. Kendala yang berasal dari individu

a. Kestabilan (Homeostasis)

Homeostasis merupakan dorongan internal individu yang berfungsi untuk menstabilkan dorongan-dorongan dari luar. Proses pelatihan yang diberikan dalam waktu yang relatif singkat belum tentu dapat membuat perubahan yang permanen pada diri individu bila tidak diikuti dengan penguatan yang relatif terus menerus dari sistem yang melingkupinya.

b. Kebiasaan (*Habit*)

Setiap individu akan bereaksi sesuai dengan kebiasaan yang mereka anggap paling menguntungkan (otonomi fungsional). Ini dapat menjadi hambatan bila mana misalnya

community worker ingin mengembangkan pola hidup buang air besar di WC padahal di pemukiman tersebut, nilai individual pada umumnya mengganggap bahwa buang air besar di kali ataupun di selokan depan rumah adalah hal yang menguntungkan serta mereka biasa melakukannya. Maka dari itu kebiasaan yang ada pada individu dapat menjadi faktor penghambat terjadinya suatu perubahan.

c. Hal yang utama (*Primacy*)

Bila tindakan yang pertama dilakukan seseorang mendatangkan hasil yang memuaskan ketika menghadapi suatu situasi tertentu, ia cenderung mengulanginya pada saat yang lain (ketika menghadapi situasi yang sama). Ini menjadi suatu hambatan apalagi tindakan tersebut sudah terpola pada individu tersebut.

d. Seleksi ingatan dan persepsi

Penyeleksian persepsi yang ada dapat membantu community worker dan masyarakat dalam mengambil keputusan. Tetapi, di sisi lain penyelesaian ini dapat pula menghambat perubahan yang terjadi. Karena dengan adanya persepsi seseorang terhadap objek sikap yang didapat dari pengalamannya akan mengakibatkan sulitnya terjadi perubahan.

2. Kendala yang berasal dari sistem sosial

Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis "mengikat" sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu. Pada titik tertentu, norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaruan) yang ingin diwujudkan. Misalkan untuk beberapa pemukiman kumuh dapat terlihat norma masyarakat yang mendukung kebiasaan masyarakat untuk buang air besar sembarangan

E. Upaya dalam Mengatasi Kendala / Hambatan Pada Pengembangan Masyarakat

Untuk mengurangi hambatan tersebut, Watson juga memberikan beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan.

Pada intinya rekomendasi tersebut terkait dengan tiga pertanyaan dasar, yaitu (3):

- 1. Siapa yang melakukan perubahan?
 - a. Kendala yang ada dapat dikurangi bila komunitas dapat merasakan bahwa perubahan yang mereka lakukan bukanlah perubahan yang dilakukan oleh "orang luar".
 - b. Kendala dapat dikurangi bila proyek pengembangan masyarakat didukung baik oleh masyarakat dan para pimpinan puncak yang terkait.
- 2. Bentuk perubahan yang seperti apa yang akan dilakukan?
 - a. kendala dapat dikurangi bila partisipan (warga komunitas) dapat melihat bahwa perubahan yang dilakukan dapat mengurangi beban yang mereka rasakan dan bukan sebaliknya.
 - b. kendala dapat dikurangi bila proyek atau program pengembangan masyarakat yang dijalankan sesuai (tidak bertentangan) dengan norma dan nilai dalam masyarakat.
 - c. kendala dapat dikurangi bila program yang dikembangkan dapat menampilkan hal yang baru dan menarik minat warga masyarakat.

F. Positive Deviance, Sebuah Pendekatan untuk Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan keniscayaan yang mesti dilakukan dalam evolusioner kehidupan manusia, seiring dengan kebutuhan manusia itu sendiri menuju kehidupan yang lebih layak. Banyak sudah teori-teori dan praktek perubahan sosial yang telah diciptakan, dipromosikan, dan dilakukan. Namun tidak sedikit dari praktek terbaik perubahan sosial tersebut yang "harus dipaksakan" demi tercapainya kebutuhan "global" yang pada akhirnya harus masuk ke dalam kantong TBU (*True But Useless*) atau "benar tapi sia-sia" (9).

Perkembangan model perubahan sosial (social change) yang menarik perhatian banyak pihak, salah satunya adalah Positive Deviance (Penyimpangan Positif) yang menuntut keterlibatan

masyarakat, menggunakan resources yang ada pada masyarakat sehingga sustainability-nya akan terjaga. Namun model Positive Deviance ini harus dimulai pada kelompok kecil yang intensitas interaksi sosial mereka cukup tinggi dan pada akhirnya ditemukan solusi dalam kelompok kecil tersebut, tidak dari luar kelompok. Sehingga model ini memberikan impact yang signifikan bagi komunitas sekitarnya.

Positive Deviance sebagai sebuah model perubahan prilaku telah dibuktikan di puluhan negara berkembang, seperti perubahan prilaku dalam mengurangi malnutrisi di Vietnam, Myanmar, Nepal/Buthan, Bolivia, Bangladesh dan lainnya; pencegahan penyebaran HIV/AIDS di dunia ketiga, pencegahan mutilasi perempuan di Egypt, konflik etnis di Afrika dan lainnya (10).

G. Kilas Perjalanan Positive Deviance

"Solutions to community problems already exist within the community", Jerry Sternin dalam Donna (2000) mengadopsi sebuah pendekatan radikal untuk melakukan perubahan dengan pemikiran: perubahan yang sesungguhnya dimulai dari dalam (11).

Setidaknya menurut Jerry Sternin permasalahannya tidak terletak pada para pakar atau pada komunitas tersebut, penerapan model tradisional untuk melakukan perubahan sosial dan organisasional tidak akan berhasil dan belum pernah berhasil, mungkin permasalahannya terletak pada proses bagaimana perubahan itu terjadi secara holistik, namun esensinya adalah bahwa kita tidak bisa mengimpor perubahan dari luar ke dalam. Solusi yang bijak adalah kita harus mencari kegiatan-kegiatan kecil yang "menyimpang" akan tapi terbukti berhasil yang ada di komunitas dan kemudian memperkuat kegiatan-kegiatan tersebut. Awal perubahan besar akan terjadi ketika kita berhasil menemukannya (12).

Itu telah dibuktikan Sternin ketika bertugas membantu menyelamatkan anak-anak kelaparan dan mengalami kasus gizi buruk di Vietnam dengan menggunakan pendekatan yang telah

terbukti berhasil menumbangkan pemikiran-pemikiran konvensional secara terencana, tegas, dramatis dan sukses.

Pendekatan Sternin didasarkan dari hasil kerja yang dilakukan oleh Marian Zeitlin di Universitas Tufts pada akhir 1980-an melakukan penelitian di beberapa rumah sakit di komunitas yang sedang berkembang untuk mengetahui mengapa sebahagian kecil anak-anak yang menderita kekurangan gizi (para penyimpang) mengatasi kondisi tersebut dengan lebih baik dibanding dengan sebahagian besar anak-anak penderita kekurangan gizi lainnya, apa yang membuat mereka mampu dengan cepat mengatasinya? (11).

Dari penelitian ini muncul pemikiran untuk memperkuat penyimpangan positif sebagai sebuah teori yang diuji oleh Sternin dan istrinya Monique pada tahun 1990-an dalam situasi yang berbeda. Ide ini muncul sebagai tanggapan dari permintaan pemerintah Vietnam untuk membantu mengurangi angka malnutrisi yang luar biasa (13).

Sternin tidak memakai solusi konvensional karena solusi itu hanya tentang: sistim sanitasi yang buruk, ketidakpedulian, pola distribusi makanan, kemiskinan, dan buruknya akses terhadap air bersih. Sementara ribuan bahkan jutaan anak tidak dapat menunggu sampai masalah tersebut bisa diatasi. Akhirnya Sternin dan istrinya memutuskan untuk memperkuat penyimpangan positif (14).

Dalam setiap komunitas, organiasi, atau kelompok sosial, terdapat beberapa individu yang mempunyai prilaku dan kebiasaan tersendiri yang membuat mereka mampu mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan orang di sekitarnya meskipun mereka mempunyai sumberdaya yang sama. Tanpa disadari para "penyimpang positif" ini telah menemukan jalur keberhasilan untuk seluruh kelompok apabila rahasia mereka dapat dianalisa, diisolasi, dan kemudian dibagikan kepada seluruh kelompok (4).

Dalam melakukan tugasnya di Vietnam, Sternin menjalani langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, jangan beranggapan kalau anda sudah memiliki solusinya; Kedua, jangan menganggapnya sebagai sebuah pesta makan malam dengan

banyak orang dan sumberdaya yang berbeda; Ketiga, biarkan mereka melakukannya sendiri; Keempat, identifikasi kebijakan konfensional; Kelima, identifikasi dan analisa para penyimpang; Keenam, biarkan para penyimpang mengadopsi penyimpangan dengan sendirinya; Ketujuh, amati hasil dan publikasikan; Kedelapan, ulangi langkah satu hingga tujuh (11).

H. Konsep Umum Positive Deviance

Dalam *positive deviance*, secara teoritis ada tahapan yang harus dilakukan yang disebut dengan istilah 6 "D" sebagai langkah yang harus dilalui dengan catatan yang melakukannya adalah komunitas yang bersangkutan yang didampingi oleh fasilitator. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut (14):

Define, tetapkan atau definisikan masalah dan solusinya, dengarkan apa penyebabnya (analisis situasi) menurut mereka/komunitas sehingga lahir problem statement dari komunitas. Misalnya, dalam suatu kelompok masyarakat, anakanak keluarga miskin mengalami kekurangan gizi.

Determine, tentukan apakah ada orang-orang dari komunitas mereka yang telah menunjukkan prilaku yang diharapkan atau menyimpang (deviants) dari keluarga miskin yang lain. Misalnya, ada anak dari keluarga miskin yang gizinya baik, sementara mereka berasal dari tempat yang sama dan menggunakan sumber yang sama

Discover, cari tahu apa yang membuat "penyimpang" mampu menemukan solusi yang lebih baik dari pada tetanggganya. Misalnya, "penyimpang" memberikan makanan secara aktif kepada anaknya, memberikan makanan yang bergizi (bersumber lokal) walau tidak biasa dikonsumsi oleh orang lain, memberi makan lebih sering kepada anaknya. Pastikan "penyimpang" tidak mendapatkan subsidi dari sanak keluarganya yang mampu, baik yang berada di perkampungan itu maupun di daerah lain, sehingga itu juga merupakan penyebab anak tersebut menjadi lebih sehat.

Design, rancang dan susun strategi yang memampukan orang lain mengakses dan mengadopsi prilaku baru tersebut. Misalnya, membuat program gizi dan peserta diwajibkan

membawa food contributions berupa makanan "penyimpang" dan mempraktekkannya secara aktif. Atau ada strategi lain yang bersumber kepada kebiasaan lokal yang bisa mendukung pengadopsian prilaku "penyimpang" yang sehat tadi.

Discern, amati tingkat efektivitas intervensi melalui pengawasan dan monitoring yang dilakukan secara terus menerus. Misalnya, mengukur status gizi anak-anak yang ikut program gizi dengan penimbangan dan dampaknya kepada anak-anak sepanjang waktu. Juga jangan lupa mengukur tingkat kepedulian anggota masyarakat lain terhadap peningkatan gizi anak, karena ini juga merupakan peningkatan kapasitas masyarakat terhadap kesehatan terutama gizi anak.

Disseminate, sebarluaskan kesuksesan kepada kelompok lain yang sesuai. Misalnya, bentuk sebuah "Universitas Hidup" (laboratorium sosial) sebagai tempat belajar bagi orang lain yang tertarik untuk mengadopsi prilaku mereka sendiri di tempat lain dan siap berpartisipasi dalam program tersebut. Untuk pendukung juga lebih bagus dilakukan kampanye terhadap peningkatan status gizi anak yang lebih efektif dan efisien daripada pola yang konvensional. Jadikan isu ini menjadi isu komunitas, tidak isu pribadi hanya keluarga yang terkena kasus gizi buruk saja.

Referensi

- 1. Hendropuspito. 1989. Sosiologi Sistematik. Yogyakarta: Kanisius
- 2. Dankfsugiana. 2008. Konsep Dasar Komunikasi Sosial dan Pembangunan. http://dankfsugiana.wordpress.com/2008/04/22/konsep-dasar-komunikasi-sosial-dan-pembangunan/ [5 September 2009]
- 3. Bobo. Kim, Jackie Kendall, Steve Max. Organize. (1994). Organizing for sosial Change. A Manual for Activist in The 1990s. Seven Locks Press. California.
- 4. Soekanto, S. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Grafindo.

- 5. Alpizar. 2008. Islam dan Perubahan Sosial. http://www.uinsuska.info/ushuluddin/attachments/074 islam%20dan%20 perubahan%20sosial.pdf [8 September 2009]
- 6. Assa'di Husain. 2009. Islam dan Perubahan Sosial. http://abstrakkonkrit.wordpress.com/2009/05/01/islam-dan-perubahan-sosial/ [5 September 2009]
- 7. Deanden, K., N. Quan, M. Do, D. Marsh, D. Schroeder, H. Pachon, L. Tran, Influences on Health Behavior, Child Survival Connections
- 8. Pimbert, M. P and J. N. Pretty. 1995. Parks, people and professionals. UNRISD, Geneva.
- 9. Mercy Corps, Notulensi Training Penyimpangan Positif, Padang, 2003
- 10. PCI/Indonesia, Training Deviasi Positif (DePo), Jakarta, 2002
- 11. Donna Sillan, Deviasi Positif/Hearth, Child Survival and Collaborations and Resources (CORE) Group Dorsey, David, Positive Deviance, FC, 2000
- 12. Sternin, Jerry and Choo, Robert, The Power of Positive Deviancy, Harvard Bussines Review, 2000
- 13. The PD Network, Positive Deviance Pendekatan Pemecahan Masalah Masyarakat Berbasis Masyarakat, Vol 1, No 1, 2003
- 14. Supported by a Grant From The Ford Foundation Save The Children Experience, The Positive Deviance Hearth Nutrition Model, 2002

BAB VII PERUBAHAN BUDAYA

Perubahan kebudayaan adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terjadi karena ketidak sesuaian diantara unsurunsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan.

Perubahan budaya juga bisa timbul karena adanya modernisasi. Modernisasi muncul sebagai produk dari interaksi dan proses sosial di dalam masyarakat. Sebaliknya modernisasi itu secara bertahap akan berangsur-angsur mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat guna terus menerus meningkatkan mutu kehidupan. Pengaruh modernisasi terhadap masyarakat berlangsung melalui saluran-saluran sosial dan akhirnya memasuki semua segi-segi kehidupan yang ada. Perubahan budaya dapat berpengaruh positif namun ada yang menimbulkan pengaruh negatif (1).

Perubahan budaya mencangkup semua bagian, yaitu (2):

- 1. Kesenian
- 2. Ilmu pengetahuan
- 3. Tekhnologi
- 4. Filsafat

Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan budaya (3).

1. Mendorong Perubahan Kebudayaan

Adanya unsur-unsur kebudayaan yang memiliki potensi mudah berubah terutama unsur-unsur tekhnologi dan ekonomi (kebudayaan material). Adanya individu-individu yang mudah menerima unsur-unsur perubahan kebudayaan terutama generasi muda.

2. Menghambat Perubahan Kebudayaan

Adanya unsur-unsur kebudayaan yang memiliki potensi sukar berubah seperti adat istiadat dan keyakinan agama (non material). Adanya individu-individu yang sukar menerima unsur-unsur perubahan terutama generasi yang kolot.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan (4):

1. Faktor intern

a. Perubahan demografis

Perubahan demografis disuatu daerah biasanya cenderung terus berubah, akan mengakibatkan terjadinya perubahan diberbagai sector kehidupan contoh: bidang perekonomian, pertambahan penduduk akan mempengaruhi persediaan kebutuhan sandang, pangan, dan papan

b. Konflik Sosial

Konflik sosial dapat mempemgaruhi terjadinya perubahan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Contoh: konflik kepentingan antara kaum pendatang dengan penduduk setempat di daerah transmigrasi, untuk mengatasinya pemerintah mengikutsertakan penduduk setempat dalam program pembangunan bersama sama para transmigrasi.

c. Bencana Alam

Bencana alam yang menimpa masyarakat dapat mempengaruhi perubahan. Contoh: bencana banjir, longsor, letusan gunung berapi, masyarakat akan dievakuasi dan dipindahkan ketempat yang baru, disanalah mereka harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan budaya setempat sehingga terjadi proses asimilasi maupun akulturasi.

d. Perubahan lingkungan alam

Perubahan lingkungan ada beberapa faktor misalnya pendangkalan muara sungai yang membentuk delta, rusaknya hutan karena erosi atau perubahan iklim sehingga membebtuk tegalan. Perubahan demikian dapat merubah kebudayaan, hal ini disebabkan karena kebudayaan mempunyai daya adaptasi dengan lingkungan setempat.

2. Faktor Ekstern

a. Perdagangan

Indonesia terletak pada jalur perdagangan Asia Timur dengan India, Timur Tengah bahkan Eropa Barat. Itulah sebabnya Indonesia sebagai persinggahan pedagang-pedagang besar selain berdagang mereka juga memperkenalkan budaya

mereka pada masyarakat setempat sehingga terjadilah perubahan budaya dengan percampuran budaya yang ada.

b. Penyebaran agama

Maraknya unsur-unsur budaya Hindu dan Budha dari India atau budaya Arab bersamaan proses penyebaran agama Hindu dan Islam ke Indonesia, demikian pula masuknya unsur-unsur budaya barat melalui proses penyebaran agama Kristen dan kolonialisme.

c. Peperangan

Kedatangan bangsa barat ke Indonesia umunya menimbulkan perlawanan keras dalam bentuk peperangan, dalam suasana tersebut ikut masuk pula unsur-unsur budaya bangsa asing ke Indonesia.

Pengaruh positif dan pengaruh negatif dari perubahan budaya (3):

- 1. Pengaruh positif dari perubahan budaya
 - a. Peningkatan penghasilan
 - b. Peningkatan kelancaran perhubungan dan transportasi
 - c. Peningkatan dalam bidang pendidikan,kesehatan dll.
- 2. Pengaruh negatif dari perubahan budaya
 - a. Pencemaran Lingkungan dan Alam

Sebagai contoh dalam dunia industri , semua orang membuat berbagai barang dengan tenaga manusia kemudian digantikan dengan tenaga mesin. Hal ini mengakibatkan rusaknya ekosistem di laut, di sungai, dan di darat serta di udara akibat limbah mesin-mesin industri.

b. Menurunkan solidaritas sosial

Dalam dunia pertanian di pedesaan, semua petani mengerjakan tanah, memelihara tanaman, dan menuai hasil dilakukan dengan gotong royong. Kemudian dibuat peralatan baru yang ternyata merusak dan menghentikan budaya gotong royong dari warga masyarakat pedesaan.

c. Pergeseran nilai dan kemerosotan moral

Proses pergantian budaya lama dalam dunia industry dan peralatan manusia telah membuat segi kehidupan material maju dengan pesat sementara perkembangan dari kehidupan spiritual tetap dan bahkan cenderung terhimpit waktu dan

perhatiannya, Akibat dari tersisihnya segi kehidupan spiritual inilah timbul kemerosotan moral manusia.

d. Meluasnya pandangan materialstis dan individualism Dengan mekanisme industri dan kerja serta peralatan rumah tangga telah membuat orang menjadi sangat berorientasi pada perolehan materi dengan keuntungan diri dan kelompoknya. Hal ini terjadi secara besar besaran dewasa ini yang merupakan akibat dari perubahan dunia peralatan dan tata kerja manusia.

A. Pola Pengembangan Kesehatan (Pengembangan Sistem Kesehatan Masyarakat)

Kesehatan masyarakat sangat penting bagi ketersediaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang menentukan daya saing bangsa. Pembangunan kesehatan merupakan pembangunan investasi SDM berkelanjutan. Namun, diakui atau tidak, dewasa ini persoalan kesehatan masyarakat semakin kompleks, baik di pedesaan maupun perkotaan (1).

Beberapa akar permasalahan kesehatan, seperti (2):

- Kemiskinan dan Lingkungan Menyebabkan masyarakat tidak berdaya untuk mengakses pelayanan publik karena terbebani oleh stigma-stigma tertentu.
- 2. Faktor psikososial keluarga dan individu Seperti stress, ketergantungan NAPZA (Narkotika, psikotropika, dan Zat adiktif)
- 3. Faktor yang berkaitan dengan anak jalanan, pekerja seks komersial, petugas kebersihan kota, remaja kota dan usia lanjut atau manula
- 4. Keterbatasan jumlah tenaga medis di wilayah-wilayah pedalaman
- 5. Minimnya ketersediaan infrastruktur prasarana pelayanan kesehatan.
- 6. Minimnya pelatihan tentang upaya perbaikan gizi masyarakat dengan pembudidayaan dan pemanfaatan berbagai sumber makanan nabati, seperti ubi ubian,kacangkacangan dll yang dimiliki bangsa Indonesia.

- 7. Minimnya penanganan gizi buruk, busung lapar, serta diare bayi dan balita.
- 8. Perilaku masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kesehatannya sendiri atau keluarga.

Dengan demikian, diperlukan pengembangan pola pendekatan kesehatan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak. Pola pendekatan bukan secara medis saja, tetapi bagaimana melakukan pendekatan kombinasi secara medis, kultural, sosiologis, berdasarkan nilai-nilai dan keberagaman budaya bangsa Indonesia.

Disatu pihak, penyakit-penyakit degeneratif, usia lanjut, masalah-masalah kesehatan ibu dan bayi, balita, gizi buruk, busung lapar, danpenyakit infeksi semakin menonjol. Fenomena-fenomena tersebut mnyebabkan biaya kesehatan menjadi semakin besar karena upaya kesehatan harus dilakukan dengan lingkup dan cangkupan yang makin luas. Hal tersebut diperkuat oleh proses industrialisasi yang berkembang begitu cepat akhir akhir ini, yang mempunyai dampak luas bagi bidang ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan fisik dan biologi. Oleh karena itu diperlukan sistem pendekatan yang bertumpu pada kerjasama lintas sektoral dan pendayaguanaan masyarakat luas untuk menciptakan habitus baru bagi warga bangsa bagaimana hidup sehat (3).

Beberapa pendekatan pengembangan sistem kesehatan masyarakat antara lain (4):

1. Pendekatan WHO dan Depkes

Badan kesehatan dunia (World Health Organization-WHO) mendefinisikan sehat sebagai "keadaan sejahtera/sehat dari fisik, mental/rohani, dan sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit, cacat, serta kelemahan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis"

Untuk sehat secara fisik maka ekonomi seseorang harus baik. Hal ini masih menjadi beban masyarakat miskin karena tidak tersedianya pangan yang cukup, daya beli masyarakat yang rendah, gagal panen, dan kesulitan distribusi. Akan tetapi, ekonomi hanyalah sebagai tujuan antara,karena masih harus sehat sosial, mental, dan religius/rohani. Sedangkan kesehatan

manusia dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu: faktor genetik, lingkungan, perilaku dan faktor pelayanan kesehatan.

Deklarasi WHO (1978) di Alma Ata tentang Health for all merekomendasikan beberapa parameter upaya kesehatan primer, antara lain (4):

- a. Pendidikan mengenai masalah-masalah kesehatan dan metode pencegahan serta pengendalian penyakit.
- b. Peningkatan keadaan gizi.
- c. Pengadaan air bersih dan sanitasi dasar yang memadai.
- d. Upaya kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana.
- e. Imunisasi terhada penyakit-penyakit menular
- f. Pencegahan dan pengendalian penyakit endemik yang menyebar di tingkat local secara cepat.
- g. Pengobatan/penatalaksanaan yang tepat terhadap penyakit umum
- h. Menyediakan obat-obat esensial

Rumusan paradigma sehat yang diluncurkan Departemen Kesehatan RI (2):

- a. Lingkungan yang bebas dari polusi
- b. Tersediannya air bersih
- c. Sanitasi lingkungan yang memadai
- d. Perumahan dan pemukiman yang sehat
- e. Perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan
- f. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa

Pendekatan system kesehatan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak berpandangan bahwa kesehatan bukan hanya berpusat pada kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah-Depkes, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan pengendali mekanisme persaingan sehingga masyarakat Indonesia nantinya adalah masyarakat yang berperilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terpaparnya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, masyarakat

mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang berlangsung di berbagai daerah pada akhirnya adalah berhasil dan berdaya guna serta merata bagi semua orang sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

2. Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan di atas akan tumbuh dan berkemnbang sampai akar rumput masyarakat jika proses sosialisasinya dilandasi pendekatan proses pembelajaran yang sistematis, praktis, terukur, dan berkelanjutan.

3. Pendekatan terhadap masalah

Dalam praktiknya di lapangan, berbagai persoalan kesehatan masyarakat yang dijumpai tidak selalu sama antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Pendekatan sistem kesehatan masyarakat yang lebih mengikutsertakan berbagai pihak sebagai tim kesehatan membutuhkankan kepaduan, keselarasan, dan kesamaan visi mengenai sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Lebih dari itu adalah bagaimana membangun suatu tim kesehatan yang dapat menjadi motivator bagi masyarakat.

4. Pendekatan asuransi

Sebagian besar masyarakat Indonesia kini masih dihadapkan pada kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan dan obat yang murah, Kebijakan emerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) setiap tahun telah berdamak pada kenaikan harga obat opbatan di pasaran. Bagi mereka yang memiliki asuransi mungkin tidak menjadi soal, namun bagi masyarakat yang belum mengenal asuransi, merupakan pukulan dan tekanan psikologis serta beban sosial-ekonomi.

Pembangunan kesehatan kini bukan sekedar tanggung jawab pemerintah/Depkes RI semata, tetapi merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Pemerintah tetap menjalankan fungsinya sebagai regulator dan pengendali pasar.

Permasalahan-permasalahan kesehatan masyarakat yang kian kompleks, membutuhkan peran aktif berbagai kelompok masyarakat untuk mencari alternatif penyelesaian masalah yang dihadai masyarakat, baik alternatif penyelesaian medis maupun

non medis. Melalui pola pendekatan berbagai kluster, diharapkan mampu menumbuh kembangkan semangat dan perilaku sehat masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan (3)

B. Kesinambungan antara Perubahan Budaya dan Pola Pengembangan Kesehatan

Perubahan budaya yang mengarah pada perubahan kondisi mendasar fisik sangat berpengaruh pada kesehatan. Contohnya (3):

- 1. Suhu ekstrim atau tingkat radiasi ultraviolet yang bisa disebabkan karena penggunaan AC dapat mempengaruhi biologi manusia dan kesehatan secara langsung misalnya sejenis kanker kulit.
- 2. Faktor kesibukan yang semakin meningkat masyarakat di era globalisasi ini lebih senang mengkonsumsi makanan instan atau siap saji karena dirasa lebih praktis, padahal zat-zat yang terkandung dalam makanan instan dapat membahayakan kesehatan.
- 3. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuandan teknologi, sangat bermanfaat dalam pola pengembangan kesehatan, mengingat semakin kompleknya masalah kesehatan saat ini, karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menciptakan tenaga kesehatan yang professional, terampil, inovatif, dan beretika.

C. Aspek Budaya yang Mempengaruhi Status Kesehatan dan Perilaku Kesehatan

Menurut G.M. Foster (1973), aspek budaya dapat mempengaruhi kesehatan antara lain (1):

- 1. Pengaruh tradisi
 - Ada beberapa tradisi didalam masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat.
- 2. Sikap fatalistis
 - Hal lain adalah sikap fatalistis yang juga mempengaruhi perilaku kesehatan. Contoh: Beberapa anggota masyarakat dikalangan kelompok tertentu (fanatik) yang beragama islam percaya bahwa anak adalah titipan Tuhan, dan sakit atau

mati adalah takdir, sehingga masyarakat kurang berusaha untuk segera mencari pertolongan pengobatan bagi anaknya yang sakit.

- 3. Sikap ethnosentris Sikap yang memandang kebudayaan sendiri yang paling baik jika dibandingkan dengan kebudayaan pihak lain.
- 4. Pengaruh perasaan bangga pada statusnya
 Contoh: Dalam upaya perbaikan gizi, di suatu daerah
 pedesaan tertentu, menolak untuk makan daun singkong,
 walaupun mereka tahu kandungan vitaminnya tinggi.
 Setelah diselidiki ternyata masyarakat bernaggapan daun
 singkong hanya pantas untuk makanan kambing, dan
 mereka menolaknya karena status mereka tidak dapat
 disamakan dengan kambing.
- 5. Pengaruh norma Contoh: upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi banyak mengalami hambatan karena ada norma yang melarang hubungan antara dokter yang memberikan pelayanan dengan bumil sebagai pengguna pelayanan.
- 6. Pengaruh nilai
 Nilai yang berlaku didalam masyarakat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Contoh: masyarakat memandang lebih bergengsi beras putih daipada beras merah, padahal mereka mengetahui bahwa vitamin B1 lebih tinggi diberas merah daripada diberas putih.
- 7. Pengaruh unsur budaya yang dipelajari pada tingkat awal dari proses sosialisasi terhadap perilaku kesehatan. Kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil akan berpengaruh terhadap kebiasaan pada seseorang ketika ia dewasa. Misalnya saja, manusia yang biasa makan nasi sejak kecil, akan sulit diubah kebiasaan makannya setelah dewasa.
- 8. Pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan
 Apabila seorang petugas kesehatan ingin melakukan perubahan perilaku kesehatan masyarakat, maka yang harus dipikirkan adalah konsekuensi apa yang akan terjadi jika melakukan perubahan, menganalisis faktor-faktor yang

terlibat/berpengaruh pada perubahan, dan berusaha untuk memprediksi tentang apa yang akan terjadi dengan perubahan tersebut.

D. Perubahan Sosial Budaya

Menurut Koentjaraningrat, bahwa perubahan budaya yang terjadi di masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk :

- 1. Perubahan yang terjadi secara lambat dan cepat
- 2. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar
- 3. Perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan (5).

E. Hubungan Budaya Dengan Kesehatan

Kebudayaan-kebudayaan ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya jika salah seorang anggota keluarga menderita suatu penyakit (misal demam karena masuk angin) hal yang pertama dilakukan sebelum pergi ke dokter pastilah mencoba untuk menyembuhkannya. Misal dengan kerokan. Ini adalah ciri dari sebuah kebudayaan yang sangat erat hubungannya dengan kesehatan. Dimana anggapan masyarakat mengenai demam karena masuk angin ini akan hilang apabila angin di dalam tubuh keluar. Maka kerokan adalah hal yang paling masuk akal bagi mereka dan tanpa mereka ketahui pula bahwa kerokan ini memiliki dampak yang negatif bagi tubuh kita. Karena pori-pori dalam tubuh akan terbuka dan terluka. Namun dibalik efeknya yang negatif ini tidak bisa kita pungkiri bahwa jasanya sangat besar, karena terbukti dapat menyembuhkan.

Akibat hal inilah banyak masyarakat yang cenderung memegang kokoh prinsip ini. Dimana angin yang terlalu banyak di dalam tubuh hanya dapat dikeluarkan dengan kerokan yang bertujuan membuka pori-pori dan mengeluarkan udara yang mengumpul di dalam tubuh (3).

Selain kerokan di atas masih banyak lagi contoh-contoh kebudayaan yang memiliki hubungan dengan kesehatan. Permisalan yang lain dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat yang masih tradisional. Jika anggota keluarga sakit

mereka akan mengunjungi dukun untuk menyembuhkan. Hal ini dikarenakan keyakinan mereka terhadap si dukun tersebut sangatlah tinggi.

Hal lainnya karena mereka takut dengan dokter. Sebab mereka berpikir jika pergi ke dokter mereka pasti akan disuntik dengan jarum yang besar. Sebab lainnya yakni karena masih menganggap bahwa sakit yang mereka derita ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau mistis. Untuk menghindari hal tersebutlah mengapa mereka lebih memilih untuk menggunakan dan mempercayakan kesehatannya pada dukun tradisional yang notabene belum tentu mengerti (4).

Referensi

- 1. Foster, 1973, Traditional Societes in Technological Change.
- 2. Notoatmodjo, 2005, Promosi kesehatan Teori dan Aplikasi, Jakarta, Rineka Cipta.
- 3. Elling Ray, H, Socio Cultural influences on Health and Health care.
- 4. Medika, Jurnal Kedokteran Indonesia.
- 5. Notoatmodjo, Soekidjo, promosi kesehatan teori dan aplikasi, edisi revisi, rineka cipta, Jakarta, 2010.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUBAHAN SOSIAL

A. Pengertian

Partisipasi secara sederhana dapat diartikan Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama (1).

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (2).

Mikkelsen (1999) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- 1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- 2. Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- 3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- 4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- 5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh

informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka (3).

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991) sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui selukbeluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri (4).

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for International Development (DFID) adalah (5):

- 1. Cakupan.
 - Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- 2. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership).

Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

- 3. Transparansi.
 - Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- 4. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- 5. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*).
 Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- 6. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- 7. Kerjasama.

Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

B. Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representative (6).

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

adalah Partisipasi uang bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha pencapaian bagi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya (3).

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman pengetahuan dan mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk

partisipasi dan beberapa ahli yang mengungkapkannya dapat dilihat dalam Tabel 8.1.

Tabel 8.1. Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi

Nama Pakar	Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi	
(Hamijoyo, 2007: 21; Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.	
(Hamijoyo, 2007: 21; Holil, 1980: 81 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.	
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.	
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.	

(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak,	Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah
2005: 11)	pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasaribu dan Simanjutak, 2005: 11)	Partisipasi sosial, Partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
(Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
(Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)	Partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa (1991) mengidentifikasikan partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan *self mobilization*. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 8.2.

Tabel 8.2. Tipe Partisipasi

No.	Tipologi	Karakteristik
1.	Partisipasi pasif/manipulatif	 a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; b. Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; c. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2.	Partisipasi dengan cara memberikan informasi	 a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; b. Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian;

		c. Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3.	Partisipasi melalui konsultasi	 a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; b. Orang luar mendengarkan dan membangun pandanganpandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapantanggapan masyarakat; c. Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; d. Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditinda klanjuti.
4.	Partisipasi untuk insentif materil	 a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya; b. Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; c. Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.

5.	Partisipasi fungsional	 a. Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek; b. Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusankeputusan utama yang disepakati; c. Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.
6.	Partisipasi interaktif	 a. Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada; b. Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematik; c. Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.
7.	Self mobilization	a. Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-

	sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; b. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuanbantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; c. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.
--	---

Sumber: Sekretariat Bina Desa (1999)

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan (6).

Angell mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu (7):

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang

lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah "di dapur" yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil (1980), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah (6):

- 1. Kepercayaan diri masyarakat;
- 2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
- 3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
- 4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
- 5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
- 6. Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggangan oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
- 7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
- 8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- 9. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu (6):

- 1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
- Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
- 3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
- 4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial,

budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

D. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan Ditinjau dari Indikator Sukses

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sangat mendukung kegiatan PNPM mandiri Perdesaan yang dilaksanakan di desa Sesulu, karena kegiatan ini dianggap dapat menyatu dengan masyarakat, masyarakat vang merencanakan, masyarakat yang melaksanakan, dan masyarakat yang menikmatinya, misalnya gedung-gedung yang telah dibangun dapat digunakan masyarakat sesuai dengan keperluannya, selain itu kegiatan PNPM mandiri perdesaan yang dilakukan di desa Sesulu ini mengutamakan di bidang pendidikan dan kesehatan seperti meberikan keterampilan-keterampilan masyarakat pembangunan sarana kesehatan seperti posyandu. Secara keseluruhan masyarakat desa sesulu mendukung dan proaktif dalam kegiatan karena mereka selalu dilibatkan dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penyampaian hasil kegiatan yang nantinya dapat dirasakan sendiri hasilnya oleh masyarakat desa Sesulu.

2. Tingkat Perkembangan Kelembagaan

Dalam pelaksanaan PNPM perdesaan di setiap desa terdapat kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), seperti halnya di desa Sesulu juga memiliki kader pemberdayaan masyarakat desa. Kader pemberdayaan masyarakat desa yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM mandiri perdesaan yang diawali dengan proses gagasan ditingkat dan penggalian dusun masyarakat. Sebelum Evaluasi PNPM Mandiri Perdesaan, desa Sesulu (Efendi Heru S) melakukan tugasnya mereka pelatihan-pelatihan diberikan agar memiliki akan menjalakan dalam Dalam pemahaman tugasnya.

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan terdapat kader pemberdayaan masyarakat, mereka adalah warga terpilih yang memfasilitasi dan memandu masyarakat dalam pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan di desa Sesulu. Untuk memberikan bekal bagi kader-kader pemberdayaan masyarakat dilakukan pelatihan hal ini juga mempermudah dalam mendampingi masyarakat dan fasilitator kecamatan dalam tahapan kegiatan, Untuk kepengurusan Tim Pengelola Kegiatan di desa Sesulu sendiri belum mengalami Secara keseluruhan dalam peningkatan perubahan. kelembagaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam pedoman teknik operasional, baik itu pelatihan-pelatihan bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan pemilihan tim pengelola kegiatan.

3. Sarana Dan Prasarana Yang Dibangun

Salah satu kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan di desa Sesulu adalah dengan membangun sarana dan prasarana seperti bangunan ataupun fasilitas lainnya. Dalam periode tahun 2011 ini telah terbangun beberapa gedung dan fasilitas diantaranya: pembuatan parit sepanjang 1200m yang dimulai tanggal 15 desember 2011 hingga 25 april 2012 atau 133 hari kerja, jembatan kayu ulin/kayu besi, dan pembangunan gedung PAUD. Dalam pembangunan beberapa fasilitas tersebut maka telah di sepakati sebelumnya melalui musyawarah desa tentang bangunan apa yang akan dibangun nantinya dan apakah bangunan yang akan dibuat dapat berguna bagi masyarakat. Secara keseluruhan dalam membangun sarana dan prasarana Tim Pengelola Kegiatan selalu melibatkan masyarakat, Tim pengelola kegiatan juga selalu kooperatif dengan masyarakat baik dalam menerima usulan warga maupun dalam hal transparansi keuangan (6).

E. Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Ditinjau Dari Indikator Kerja

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

masyarakat Partisipasi sangatlah penting demi kegiatan keberhasilan suatu dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Masyarakat diharapkan berpartisipasi atau terjun dalam program baik secara langsung maupun tidak, mengapa demikian karena masyrakat dalam kebijakan ini yang diberdayakan. Oleh karena itu maka Tim Pengelola kegiatan melakukan usaha-usaha dalam menarik simpati masyarakat desa Sesulu agar mau berpartisipasi kegiatan. Secara keseluruhan yang dapat disimpulkan sebagai penulis dari beberapa pendapat dalam hal upaya peningkatan partisipasi masyarakat adalah dengan menunjukan kinerja mereka baik sebagai pembina maupun tim pengelola kegiatan pada masyarakat, dengan menunjukan kinerja yang baik maka secara langsung dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap mereka dan diharapkan dapat pula mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi.

2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Peningkatan kualitas kelembagaan merupakan usaha untuk memberikan pelatihan ataupun masukan pada lembaga-lembaga baik pemerintahan khususnya yang ada Sesulu ataupunn kelompok-kelompok dalam desa masyarakat lainnya. Untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Sesulu sendiri yang khusus membantu pemerintahan desa ada, salah satunya dalam penyusunan RPIM atau rencana pembangunan jangka menengah desa, disini kami juga melibatkan PNPM dalam penyusunannya. Upaya lain dalam peningkatan kualitas kelembagaan yang khususnya untuk Tim Pengelola Kegiatan dengan cara memberikan pelatihan. Pelatihan tersebut secara langsung diberikan oleh kepengurusan PNPM Mandiri perdesaan yang ada ditingkat kecamatan. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa ada upaya dalam meningkatkan kualitas kelembagaan namun tidak terlalu banyak.

3. Peningkatan Anggaran Dari Pemerintah Daerah

Anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan, dengan adanya dapat mempermudah dalam melaksanakan kegiatan, seperti halnya dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan di desa Sesulu Ini. Peningkatan anggaran pemerintah daerah diharapkan membantu dari mempermudah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan masyarakat. Untuk peningkatan anggaran setiap periode pastinya ada namun presentasenya tidak besar, sedangkan dalam proses pencairan dana setiap desa melalui suatu perangkingan dimana desa yang memiliki kegiatan lebih baik maka akan diutamakan lebih dulu mendapatkan pencairan dana. Dalam hal ini diatur oleh fasilitator kecamatan dan fasilitator teknik mendampingi masyarakat dalam tahapan-tahapan dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sesulu.

4. Faktor Pendukung

kegiatan yang mengedepankan Dalam suatu pemberdayaan masyarakat, kepedulian atau tanggapan sangat dibutuhkan dalam mensukseskan masvarakat kegiatan tersebut. Seperti halnya dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan di desa Sesulu ini, tingkat partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Dukungan dari masyarakat yang cukup besar pendukung merupakan satu faktor salah menyukseskan PNPM Mandiri perdesaan di desa Sesulu, Secara keseluruhan mengenai faktor pendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan di desa sesulu adalah kepedulian masyarakat akan perubahan dirinya dan orang disekitarnya serta daerah tempat tinggal mereka kearah yang lebih maju. Kesadaran masyarakat akan perkembangan jaman membuat masyarakat tergugah untuk berusaha, dan Evaluasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa Sesulu (Efendi Heru S). Melalui PNPM Mandiri Perdesaan vang dilaksanakan di desa Sesulu ini masyarakat masyarakat berpartisipasi.

5. Faktor penghambat

Selain adanya faktor pendukung yang mempermudah program dalam suatu kebijakan terdapat pula fkator penghambat. Seperti halnya dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa sesulu ini, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang harus dihadapi dalam menuju suatu keberhasilan. Secara keseluruhan sebagaimana yang telah disampaikan oleh beberapa responden, penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak ada faktor penghambat yang cukup berarti dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara (6).

F. Peran Serta Masyarakat Tentang Upaya UKBM

1. Wujud peran serta masyarakat

Dari pengamatan pada masyarakat selama ini beberapa wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut (1):

a. Sumber daya manusia

Setiap insan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Wujud insan yang menunjukkan peran serta masyarakat dibidang kesehatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemimpin masyarakat yang berwawasan kesehatan
- 2) Tokoh masyarakat yang berwawasan kesehatan, baik tokoh agama, politisi, cendikiawan, artis/seniman, budayaan, pelawak, dan lain-lain
- 3) Kader kesehatan, yang sekarang banyak sekali ragamnya misalnya: kader posyandu, kader lansia, kader kesehatan lingkungan, kader kesehatan gigi, kader KB, dokter kecil, saka bakti husada, santri husada, taruna husada, dan lain-lain.

b. Institusi/lembaga/organisasi masyarakat

Bentuk lain peran serta masyarakat adalah semua jenis institusi, lembaga atau kelompok kegiatan

masyarakat yang mempunyai aktivitas dibidang kesehatan. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yaitu segala bentuk kegiatan kesehatan yang bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat, yaitu:
- a) Pos pelayanan terpadu (posyandu)
- b) Pos obat desa (POD)
- c) Pos upaya kesehatan kerja (Pos UKK)
- d) Pos kesehatan di Pondok Pesantren (poskestren)
- e) Pemberantasan penyakit menular dengan pendekatan PKMD (P2M-PKMD)
- f) Penyehatan lingkungan pemungkitan dengan pendekatan PKMD (PLp-PKMD) sering disebut dengan desa percontohan kesehatan lingkungan (DPKL)
- g) Suka Bakti Husada (SBH)
- h) Tanaman obat keluarga (TOGA)
- i) Bina keluarga balita (BKB)
- j) Pondok bersalin desa (Polindes)
- k) Pos pembinaan terpadu lanjut usia (Posbindu Lansia/Posyandu Lansia)
- 1) Pemantau dan stimulasi perkembangan balita (PSPB
- m) Keluarga mandiri
- n) Upaya kesehatan masjid
- 2) Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mempunyai kegiatan dibidang kesehatan. Banyak sekali LSM yang berkiprah dibidang kesehatan, aktifitas mereka beragam sesuai dengan peminatnya. Organisasi swadaya yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, balai pengobatan, dokter praktik, klinik 24 jam, dan sebagainya.

Referensi

1. Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa

- dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- 2. Isbandi Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.
- 3. Mikkelsen, Britha. (1999). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- 4. Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- 5. Sumampouw, Monique. (2004). "Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif." Jacub Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.
- 6. Holil Soelaiman. (1980). *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung.
- 7. Ross, Murray G., and B.W. Lappin. (1967). *Community Organization: theory, principles and practice*. Second Edition. NewYork: Harper & Row Publishers.

BAB IX

PARTISIPASI DARI PERUSAHAAN MELALUI PROGRAM CSR DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT YANG BERADA DI WILAYAH KERJA PERUSAHAAN

Perusahaan sebagai sebuah sistem, dalam keberlanjutan dan keseimbangannya tidak dapat berdiri sendiri. Keberadaan perusahaan dalam lingkungan masyarakat membawa pengaruh bagi kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya (1). Dalam perjalanannya, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan bersinggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengingat dan memperhatikan aspek sosial budaya (2). Salah satunya adalah dengan membina hubungan baik yang bersifat reciprocal (timbal balik) dengan stakeholder-stakeholder lain, baik pemerintah, swasta, maupun dari berbagai tingkatan elemen masyarakat. Hubungan baik ini dapat dibentuk dari adanya interaksi antar stakeholder dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program CSR (Corporate Social Responsibility) (3).

Konsep CSR (Corporate Social Responsibility) memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Definisi CSR berasal dari konsep dan pemikiran yang dicetuskan oleh John Elkington (1997) dalam bukunya yang berjudul "Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business", dimana dalam buku tersebut Elkington mengemukakan konsep "3P" (profit, people, dan planet) yang menerangkan bahwa dalam perusahaan, menialankan operasional selain profit/keuntungan ekonomis sebuah korporasi harus dapat memberikan kontribusi positif bagi people (masyarakat) dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) (4). ISO 26000, CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku

kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan normanorma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (5). Telaah lebih lanjut atas berbagai literatur menunjukkan bahwa ada empat skema yang biasa dipergunakan untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu (1) kontribusi pada program pengembangan masyarakat, (2) pendanaan kegiatan sesuai dengan kerangka legal, (3) partisipasi masyarakat dalam bisnis, dan (4) tanggapan atas tekanan kelompok kepentingan. Perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan CSR menggunakan tahapan implementasi CSR sebagai berikut (4):

1. Tahap Perencanaan

Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu Awareness CSR Assesment, dan CSR Manual Building. Building merupakan langkah awal Awareness membangun kesadaran perusahaan mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen, upaya ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan lain-lain (6). CSR Assesment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif (7). Pada tahap membangun, CSR manual, dilakukan melalui benchmarking, menggali dari referensi atau meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif, dan efisien (8).

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan seperti pengorganisasian sumber daya, penyusunan untuk menempatkan orang sesuai dengan jenis tugas, pengarahan, pengawasan, pelaksanaan, pekerjaan sesuai dengan rencana, serta penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan.

3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Tahap ini perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauhmana efektivitas penerapan CSR sehingga membantu perusahaan untuk memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi CSR sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi.

4. Tahap Pelaporan

Pelaporan perlu dilakukan untuk membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Ide mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) adalah hal mendasar bagi kebanyakan perusahaan, bahkan ide ini mewakili substansi dari bagaimana sebuah perusahaan dibangun dan dikelola, serta menjadi penting berkaitan dengan manajemen strategis secara khusus Stakeholders, yang jamak diterjemahkan dengan pemangku kepentingan adalah pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau perusahaan, karenanya kelompok-kelompok dan aktivitas tersebut mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh perusahaan (10). Menurut Sukada (2007), pelibatan pemangku kepentingan berdasarkan derajat relevansinva ditentukan keberadaan serta program yang akan diselenggarakan. Sukada (2007) menambahkan, semakin relevan pemangku kepentingan dengan kegiatan maupun aktivitas pengembangan masyarakat perusahaan, maka pelibatannya menjadi keharusan (9).

A. Community Development

Community Development (Pengembangan Masyarakat) sebagai salah satu dari tujuh isu CSR merupakan sarana aktualisasi CSR yang paling baik jika dibandingkan dengan implementasi yang hanya berupa charity, philantrophy, atau dimensi-dimensi CSR yang lain, karena dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat terdapat prinsip-prinsip kolaborasi kepentingan bersama antara perusahaan dengan komunitas,

adanya partisipasi, produktivitas, keberlanjutan, dan mampu meningkatkan perasaan solidaritas (11). Tanggung jawab sosial dapat diwujudkan melalui pengembangan potensi kedermawanan perusahaan. Kedermawanan perusahaan sesungguhnya adalah kedermawanan sosial dalam kerangka kesadaran dan komitmen perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya (10).

Menurut Steiner (1994) dalam Nursahid (2006), terdapat sejumlah alasan mengapa perusahaan memiliki program-program filantropik atau kedermawanan sosial, yaitu pertama, untuk mempraktikkan konsep "good corporate citizenship"; kedua, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan ketiga, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdidik (12).

B. Konsep Partisipasi

Menurut Nasdian (2006), pemberdayaan merupakan jalan atau sarana menuju partisipasi. Sebelum mencapai tahap tersebut, tentu saja dibutuhkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan memiliki dua elemen pokok, yakni kemandirian dan partisipasi. Nasdian (2006) mendefinisikan partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara dari partisipasi adalah memutuskan, efektif. Titik tolak bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar. Nasdian (2006) juga memaparkan bahwasanya partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat (13). Cohen dan Uphoff (1979) membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut (14):

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap

- pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program.
- 2. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaanya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek (15).
- 3. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.
- 4. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Keseluruhan tingkatan partisipasi di atas merupakan kesatuan integratif dari kegiatan pengembangan perdesaan, meskipun sebuah siklus konsisten dari kegiatan partisipatoris mungkin dinilai belum biasa (16).

Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan (17). Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan.

Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (citizen partisipation is citizen power). Partisipasi masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan (18).

C. Konsep Modal Sosial

Modal sosial adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan yang memungkinkan sekelompok warga dapat

bekerjasama secara efektif dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan-tujuannnya (19). Komponen modal sosial ada dua kategori, yaitu pertama, kategori struktural yang dihubungkan dengan berbagai bentuk asosiasi sosial dan kedua, kategori kognitif dihubungkan dengan proses-proses mental dan ide-ide yang berbasis pada ideologi dan budaya. Komponen-komponen modal social tersebut diantaranya (14):

- 1. Hubungan sosial (jaringan); merupakan pola-pola hubungan pertukaran dan kerjasama yang melibatkan materi dan non materi. Hubungan ini memfasilitasi tindakan kolektif yang saling menguntungkan dan berbasis pada kebutuhan. Komponen ini termasuk pada kategori structural (20).
- 2. Norma; kesepakatan-kesepakatan tentang aturan yang diyakini dan disetujui bersama.
- 3. Kepercayaan; komponen ini menunjukkan norma tentang hubungan timbal balik, nilai-nilai untuk menjadi seseorang yang layak dipercaya. Pada bentuk ini juga dikembangkan keyakinan bahwa anggota lain akan memiliki keinginan untuk bertindak sama. Komponen ini termasuk dalam kategori kognitif (21).
- 4. Solidaritas; terdapat norma-norma untuk menolong orang lain, bersama-sama, menutupi biaya bersama untuk keuntungan kelompok. Sikap-sikap kepatuhan dan kesetiaan terhadap kelompok dan keyakinan bahwa anggota lain akan melaksanakannya. Komponen ini termasuk dalam kategori struktural (22).
- 5. Kerjasama; terdapat norma-norma untuk bekerjasama bukan bekerja sendiri. Sikap-sikap kooperatif, keinginan untuk membaktikan diri, akomodatif, menerima tugas dan penugasan untuk kemaslahatan bersama, keyakinan bahwa kerjasama akan menguntungkan. Komponen ini termasuk dalam kategori kognitif. Modal sosial yang ideal adalah modal sosial yang tumbuh di masyarakat. Modal sosial yang dimiliki seyogianya memiliki muatan nilai-nilai yang merupakan kombinasi antara nilai-nilai universal yang berbasis humanisme dan nilai-nilai pencapaian (achievement values) dengan nilai-nilai lokal.

D. Konsep Dampak Program CSR

Min-Dong Paul Lee (2008) melakukan studi khusus terkait bagaimana jejak dan perkembangan mengenai teori tanggung jawab sosial perusahaan diulas secara detail dalam jurnalnya yang berjudul "A Review of the Theories of Corporate Social Responsibility: Its Evolutionary Path and the Road Ahead". Studi ini ditujukan untuk menunjukkan jejak evolusioner konseptual dari teori-teori tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan untuk melihat refleksi implikasinya terhadap pembangunan. Restropeksi menunjukkan bahwa perkembangan tren telah menjadi sebuah rasionalisasi progresif dari konsep dengan sebuah fokus tertentu dalam ikatan lebih kuat terhadap tujuan finansial perusahaan. Telah banyak upaya dilakukan oleh berbagai pihak di dunia untuk menstimulasi pelibatan aktif masyarakat, bagaimana membangun kemitraan baik untuk mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungan (23).

Jurnal Reporting on Community Impacts: A survey conducted by Reporting Initiative, menambahkan Global the peningkatan terjadi ketika upaya tersebut disusun secara strategis dan dikaitkan dengan kerangka internasional seperti halnya Millenium Development Goals (MDGs). Pada waktu yang pertumbuhan atau peningkatan vang teriadi sama. memperkuat pemahaman mengenai dampak dari kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Ada peningkatan kepentingan dari stakeholders kepada perusahaan untuk mendemonstrasikan mengklarifikasi dampaknya. dan Bagaimanapun juga, berdasarkan sebuah penelitian dampak dari CSR pada perusahaan besar agar mampu melihat dampak secara umum, kasus bisnis, sikap bisnis, kesadaran dan praktik seharusnya juga mengetahui secara baik kebiasaan stakeholder, tetapi upaya untuk mengklarifikasi dampak pada hubungan terhadap manusia. Oleh karena itu, saat ini makin maraknya tren terhadap kepentingan yang lebih dari sebuah perusahaan dan stakeholdernya untuk mengukur hasil dan memahami bagaimana CSR dapat memberikan nilai baik bagi perusahaan maupun bagi komunitas.

Jalal (2010) mengemukakan bahwasanya praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh banyak perusahaan di Indonesia masyarakat berhubungan dengan vang disekitarnya belum dapat dibilang memadai, tampaknya kesimpulan itu tidak akan ditolak. Pertanyaan penting berkaitan dengan kondisi itu adalah bagaimana cara untuk mengetahui masvarakat oleh program pengembangan sebuah perusahaan telah dapat dianggap memadai. Jawaban tersebut pada fungsi sebenarnnva ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan akan menjadi sangat penting manakala perusahaan hendak mengetahui kinerja program pengembangan masvarakatnya, atau hendak menyusun rencana strategik yang menginginkan tingkat kinerja tertentu (24).

Referensi

- 1. Anonim, 2009. Annual Report Perusahaan Geothermal. Jakarta: Perusahaan Geothermal.
- 2. Kriyantono, Rahmat. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group
- 3. Anonim, 2008. Annual Report Perusahaan Geothermal. Jakarta: Perusahaan Geothermal.
- 4. Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility). Gresik: Fascho Publishing.
- 5. Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat "Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial". Bandung :PT Refika Aditama.
- 6. Lakin, Nick dan Veronica Scheubel.Corporate Community Involvement: The Definitive Guide to Maximizing Your Business Societal Engagement. Greenleaf Publishing, 2010.
- 7. Dragicevic, Damir dkk. Reporting on Community Impacts: A survey conducted by the Global Reporting Initiative.Global Reporting Initiative, 2008.
- 8. Ambadar, Jackie. 2008. CSR dalam Praktik di Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- 9. Sukada, Sonny dkk. 2007.Membumikan Bisnis Berkelanjutan. Jakarta: Indonesia Business Links.

- 10. Saidi, Zaim dkk. 2003. Sumbangan Sosial Perusahaan: Profil dan Pola Distribusinya di Indonesia Survei 226 Perusahaan di 10 Kota. Jakarta Selatan: Piramedia.
- 11. Dahlsrud, Alexander. How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Volume 15, 2008, hal. 1-13. www.interscience.wiley.com DOI: 10.1002/csr.132.
- 12. Nursahid, Fajar. 2006. Tanggung jawab sosial BUMN: Analisis Terhadap Model Kedermawanan Sosial Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia. Depok: Piramedia.
- 13. Nasdian, Fredian Tonny. 2006. Pengembangan Masyarakat (Community Development). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- 14. Uphoff, NT., Cohen, JM., dan Goldsmith, AA. Rural Development Committee: Feasibility and Application of Rural Development Participation: State-of-the-Arth Paper. New York: Cornell University.
- 15. Wicaksono, Mohammad Arya. 2010. Analisis Tingkat Partisipasi Warga Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus: PT Isuzu Astra Motor Indonesia Assy Plant Pondok Ungu). Skripsi. Tidak Diterbitkan. Program Studi Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- 16. Soemanto, Bakdi dkk. 2007.Sustainable Corporate: Implikasi Hubungan Harmonis Perusahaan dan Masyarakat.Gresik: PT Semen Gresik (Persero).
- 17. Rahman, Reza. 2009. Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan Yogyakarta: Media Pressindo
- 18. Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder Warga Negara Partisipasi. http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html diakses pada 26 Januari 2011.
- 19. Rahman, Arief. Implementasi Corporate Social Responsibility sebagai Kenggulan Kompetitif Perusahaan. Jurnal Sinergi

- (Kajian Bisnis dan Manajemen), Volume 6, No. 2, 2004, hal. 37-46.
- 20. Pemerintah Desa Cihamerang. 2010. "Profil Desa Cihamerang". Kecamatan Kabandungan. Kabupaten Sukabumi.
- 21. Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia
- 22. Sitorus, Felix. 1998. Penelitian Kualitatif "Suatu Perkenalan". Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu sosial untuk laboratorium Sosiologi, Antropologi dan Kependudukan Jurusan Ilmu sosial dan Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB.
- 23. Lee, Min-Dong Paul. A Review of the Theories of Corporate Social Responsibility:Its Evolutionary Path and the Road Ahead. International Journal of Management Reviews Doi: 10.1111/j.1468-2370.2007.00226.xx, 2008.
- 24. Djohan, Robby. 2007. Lead to togetherness. Fund Asia Eduaction. Jakarta.

BABX PENUTUP

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada pemberdayaan adalah hakikatnya sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. masyarakat diharapkan Pada tahap kedua, halangan-halangan atau factor-faktor melepaskan bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki dalam mengembangkan dirinya tanggung jawab komunitasnya. keempat yaitu Tahap upaya mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada tahap kelima ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya.

Pada tahap ketujuh masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

Apabila kita cermati dari serangkaian literatur tentang konsep-konsep pemberdayaan masyarakat maka konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

Pengembangan masyarakat (community development) model pendekatan pembangunan sebagai salah satu (bottoming up approach) merupakan upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada. Dan dalam pengembangan masyarakat hendaknya diperhatikan bahwa masyarakat punya tradisi, dan punya adat-istiadat, kemungkinan sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial.

Adapun pertimbangan dasar dari pengembangan masyarakat adalah yang pertama, melaksanakan perintah agama untuk membantu sesamanya dalam hal kebaikan. Kedua, adalah pertimbangan kemanusiaan, karena pada dasarnya manusia itu bersaudara. Sehingga pengembangan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat, agar mereka dapat hidup lebih baik dalam arti mutu atau kualitas hidupnya.

Pengembangan masyarakat (community development) terdiri dari dua konsep, yaitu "pengembangan" dan "masyarakat". Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidangbidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor,

yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu:

- 1. Masyarakat sebagai sebuah "tempat bersama", yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
- 2. Masyarakat sebagai "kepentingan bersama", yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Istilah masyarakat dalam pengembangan masyarakat biasanya diterapkan terhadap pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan yang membedakannya dengan pelayananpelayanan sosial kelembagaan. Pelayanan perawatan manula yang diberikan di rumah mereka dan/atau di pusat-pusat pelayanan yang terletak di suatu masyarakat merupakan pelayanan kemasyarakatan. Sedangkan contoh sosial perawatan manula di sebuah rumah sakit khusus manula contoh pelayanan sosial kelembagaan. masyarakat juga sering dikontraskan dengan "negara". Misalnya, "sektor masyarakat" sering diasosiasikan dengan bentuk-bentuk pemberian pelayanan sosial yang kecil, informal dan bersifat bottom-up. Sedangkan lawannya, yakni "sektor publik", kerap diartikan sebagai bentuk-bentuk pelayanan sosial yang relatif lebih besar dan lebih birokratis.

Pengembangan masyarakat yang berbasis masyarakat seringkali diartikan dengan pelayanan sosial gratis dan swadaya yang biasanya muncul sebagai respon terhadap melebarnya kesenjangan antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan. Pengembangan masyarakat juga umumnya diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan

(empowerment) yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan.

Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Menurut Twelvetrees, pengembangan masyarakat adalah "the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions." Secara khusus pengembangan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.